



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PERUSAHAAN TAMBANG
(Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. International Nickel
Indonesia di Kab. Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan)**

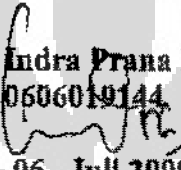
TESIS

**INDRA PRANA RADJA
0606019144**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL
DEPOK
JULI, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indra Prana Radja
NPM : 0506019144
Tanda tangan : 
Tanggal : 06 Juli 2009



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Indra Prana Radja
NPM : 0606019144
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial
Judul Tesis : *Kajian Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. International Nickel Indonesia di Kab. Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan)*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D (.....) 

Sekretaris Sidang : Dra. Fitriyah, M.Si (.....) 

Pembimbing : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....) 

Penguji Ahli : Dra. Djoemeliasanti, MA (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT pemilik segala Keagungan dan Kebenaran, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "KAJIAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN TAMBANG (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. International Nickel Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan). Tesis ini diharapkan dapat menggali seputar pelaksanaan CSR PT. Inco serta manfaat yang diperoleh masyarakat dan perusahaan, sehingga dapat menjadi masukan dan bagi pelaksana program CSR di tempat lain

Berbagai pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah di Program Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, maupun dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Fentiny Nugroho MA, Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan (dari awal, hingga tesis ini selesai) dengan kesabaran dan ketelitian sehingga tesis ini terus mengalami perbaikan - baik secara teknis maupun dalam substansinya, Sekaligus selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia.
2. Dra. Fitriyah, M.Si selaku Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Dengan penuh perhatian dan kesabarannya senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami mahasiswa pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya selalu ingat dengan ungkapan " *terimalah apa yang tidak bisa dirubah, dan rubahlah apa yang tidak bisa diterima*". Terima kasih atas segala pengertian dan kerjasamanya,
3. Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D selaku Ketua Tim Penguji yang telah memberikan masukan demi perbaikan tesis ini dan Dra Djoemeliarasanti, MA selaku Penguji Ahli yang dengan sabar dan kebaikn beliau dalam memberikan bimbingan kepada peneliti demi penyusunan tesis ini sehingga lebih sistematis. Dengan bantuan dan arahan dari Mba, sehingga tesis ini lebih punya *ruh*.
4. Seluruh Staf Pengajar di Konsentrasi Pembangunan Sosial. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi cahaya bagi kegelapan, penunjuk bagi arah dalam jejak langkah kehidupan penulis setelah selesai di Universitas Indonesia. Juga buat seluruh Staf Akademik yang selama ini membantu dan melayani kami dengan baik.
5. Bapak Sawedi Muhammad (Manager Departemen External Relation PT. INCO), Bapak Muhammad Rasyid (Manager Comdev PT. INCO), Andi Hatta Marakarma (Bupati Kabupaten Luwu Timur), Bapak Anwar Hafid (Kepala Kecamatan Nuha), Bapak Andi (Ketua KAWAS) serta para informan dalam pelaksanaan penelitian lapangan.
6. Ibu Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, SE (Anggota DPD RI – MPR RI) selaku Atasan dan Guru bagi penulis yang telah banyak memberikan

- bantuan dan kelonggaran tugas-tugas kantor selama penulis kuliah di Program Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia
7. Seorang yang selalu mencintai dan menyayangi, pelengkap bagi segala kekurangan yang ada pada ku, kekasih sekaligus teman dan sahabat dalam diskusiku. Selalu sabar dan ikhlas membantu dan mendampingi penulis. DHIANA AFWINA, terima kasih atas segalanya, semoga waktu kan berpihak pada kita tuk bersama bahagia.
 8. Teman-teman seperjuangan - khususnya angkatan tahun 2006 Program Pembangunan Sosial - yang selama ini telah memberikan dorongan motivasi dan buah pikiran dalam penelitian ini. Terima kasih atas kerja samanya. Kebersamaan kita memang singkat kawan, namun kualitasnya sangat tinggi bagiku, aku bangga dapat menjadi bagian dari kalian, putera-puteri terbaik bangsa ini. Semoga kebersamaan kita tetap terjalin selamanya.
 9. Teman-teman seperjuangan di Komunitas AMPUH, Pusat Studi Pembaharuan (PSP) Jakarta. Perubahan itu tidak datang dari langit, tapi diperjuangkan dengan sedikit keras kepala, konsistensi, dan keikhlasan.
 10. Saudara tercinta, Kak Sandra Waru, Sandra Lily, Sandra Siang dan Sandra Lipu. Kita memang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tapi kita boleh punya mimpi, mimpi tentang masa depan. Mulai dari mimpi-mimpi dan mengejanya dengan kaki dan tangan kita sendiri, kelak mimpi itu akan kita raih dan menghasilkan karya dalam episode kehidupan kita. Serta keluarga yang selama ini telah banyak membantu khususnya Kak Husni Sunusi, Kak Calli, Kak Iwan serta seluruh keluarga

Tesis ini didedikasikan untuk (alm) Ibunda Hj. St. Zainab. Dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, membesarkan penulis. Ibu, kasih dan sayang mu tetap ada dan selalu ada dalam jiwa kami (anak-anakmu). Ya Ilahi Robbi, kepadamu kami memohon, muliakanlah beliau dan tempatkanlah bersama orang-orang yang kau sucikan. Juga buat ayahanda Syamsuddin Andi Gessa. Opu, kaulah mendidik dan membesarkanku, kaulah yang mengajariku tentang hidup dan kehidupan, tentang prinsip dan cita-cita serta kebijaksanaan dan *tawaddu*.

Depok, Juli 2009

Penulis,

Indra Prana Radja

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Prana Radja
NPM : 0606019144
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. International Nickel Indonesia di Kab. Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan)

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Yang menyatakan



(Indra Prana Radja)

ABSTRAK

Nama : Indra Prana Radja
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial
Judul : Kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus Pelaksanaan CSR PT. International Nickel Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan).

Penelitian ini memaparkan kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) di daerah tambang, khususnya di PT. Inco

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan CSR PT. Inco menempatkan *comdev* sebagai strategi utamanya. Kebijakan yang terintegrasi dalam semua departemen dan mitra bisnis perusahaan serta penyelesaian dampak negatif dari perusahaan, keberhasilan program *comdev* akan tercapai. Diperlukan kemitraan yang kuat antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah dengan komunikasi dua arah dan model pembangunan masyarakat yang partisipatif. Manfaat dari program CSR terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Kata Kunci:
Corporate Social Responsibility, Community Development

ABSTRACT

Name : Indra Prana Radja
Course Study : Social Welfare Science Specialized Social Development
Title : Corporate Social Responsibility Study (CSR) in the Corporate Mining ; Case Study Implementation of CSR PT. International Nickel Indonesia in Distric Luwu, South Sulawesi Province.

The thesis was discussed on *Corporate Social Responsibility* (CSR) in mining area, especially in Inco corporate.

The result showed that the implementation of CSR in Inco Corporate placed *comdev* as its main strategy. Integrated policy in all department and *comdev* program would be achieved. Stong partnership between corporation, community and local government were needed with two ways communication and participatory community development model. CSR program benefit especially at education, health and agriculture.

Key Words:
Corporate Social Responsibility, Community Developmen.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Signifikansi Penelitian	13
1.4.1 Signifikansi Akademis.....	13
1.4.2 Signifikansi Praktis	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian.....	15
1.5.2 Peran Peneliti.....	16
1.5.3 Waktu dan Tempat Penelitian	17
1.5.4 Pemilihan Informan	18
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	21
1.5.6 Prosedur Analisis Data	22
1.6 Sistematika Penulisan	23
2. CSR dan Manfaat CSR	25
2.1 Perkembangan CSR.....	25
2.2 Landasan Hukum CSR di Indonesia.....	29
2.3 Model dan Cakupan CSR	31
2.4 Pendekatan Teoritis Konsep CSR	32
2.4.1. Hubungan Negara, Dunia Bisnis dan Masyarakat	32
2.4.2. Motif Kedermawanan Perusahaan dan Produk Kebijakan Sosial	35
2.4.3. Transformasi Kedermawanan	36
2.4.4. Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	38
2.4.5. Tipologi Perusahaan dan CSR	43
2.4.6. Manfaat CSR bagi Perusahaan dan Masyarakat	45
2.4.7. Pelaksanaan CSR yang Baik	46
2.5 Kerangka Konseptual	48

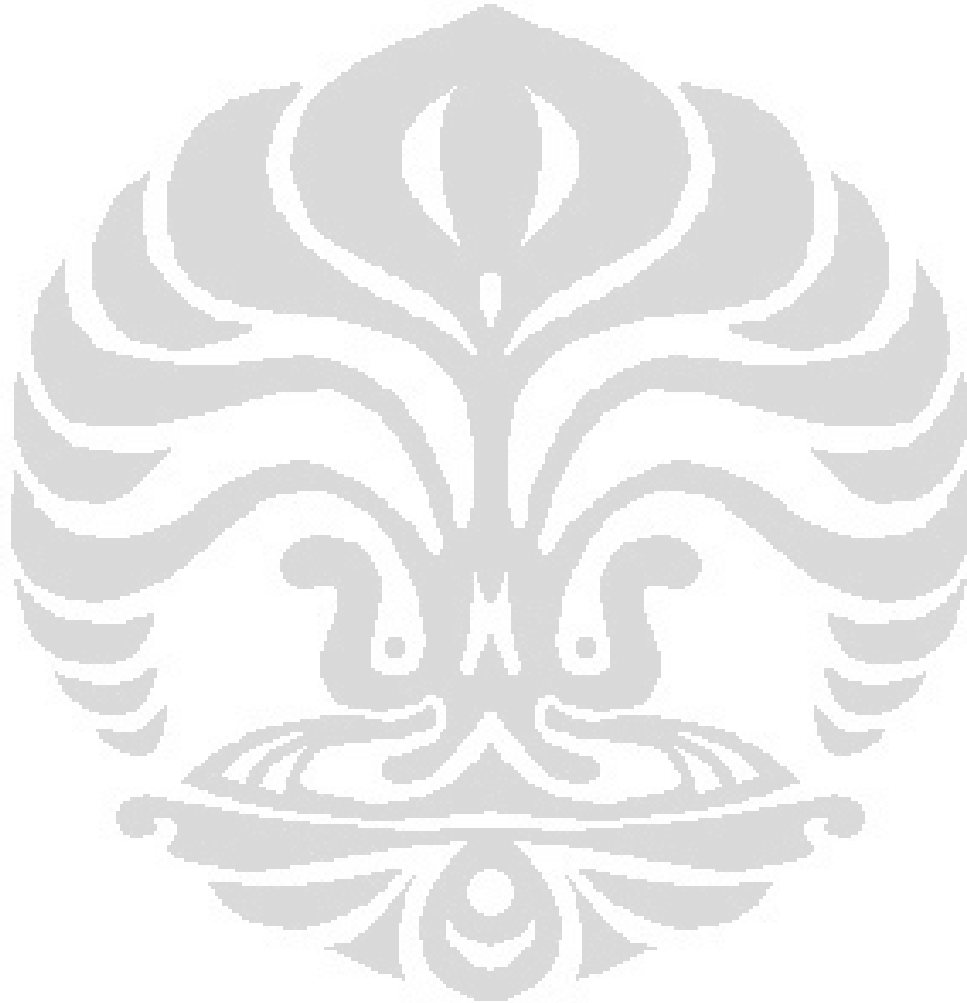
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROFIL	
PT. INCO DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM CSR	54
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
3.1.1. Profil Kabupaten Luwu Timur	54
3.1.2. Profil PT. INCO	55
A. Sejarah Perusahaan	55
B. Visi dan Misi Perusahaan	58
C. Struktur Organisasi Community Development PT. INCO	59
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan CSR PT. Inco	61
3.2.1. Fase Sebelum Tahun 2004	61
3.2.2. Fase Setelah Tahun 2004	64
3.2.2.1. Need Assesment atau Penjaringan Kebutuhan	68
A. Teknik Penelusuran Sejarah Desa	69
B. Teknik Identifikasi Masalah atau Kebutuhan dari Kalender Musim	70
C. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa	71
D. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi Melalui Penelusuran Desa	71
E. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi Bagaitu Hubungan Kelembagaan	72
F. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan dan Wawancara Keluarga	73
G. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan Melalui Focus Group Discussion (FGD)	73
H. Pengelompokan dan Penentuan Peringkat Kebutuhan atau masalah	73
3.2.2.2. Program Pendampingan Tahap I	74
3.2.2.3. Program Pendampingan Tahap II	75
4. TEMUAN LAPANGAN	76
4.1 Pelaksanaan CSR PT. INCO	76
4.2 Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dan PT. INCO	82
4.2.2. Manfaat yang Diperoleh Masyarakat	82
4.2.2.1. Bidang Pendidikan	84
4.2.2.2. Bidang Kesehatan	88
4.2.2.3. Bidang Sarana dan Prasarana	91
4.2.2.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	93
4.2.2.5. Bidang Pengembangan Usaha Lokal	94
4.2.2.6. Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Perdamaian.....	95
4.2.2.7. Bidang Lingkungan	97
4.2.1. Manfaat yang Diperoleh PT. INCO	98
4.2.3. Manfaat yang diperoleh Karyawan	101

5. PEMBAHASAN.....	103
5.1 Pelaksanaan CSR PT. INCO	103
5.2 Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dan PT. INCO	111
5.3 Keterbatasan Penelitian	115
6. KESIMPULAN DAN SARAN	117
6.1 Kesimpulan.....	117
6.2 Saran	119
DAFTAR REFERENSI	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Informasi yang dicari dan Sumber Informan	20
Tabel 2.1 Karakteristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan	37
Tabel 2.2 Komposisi Isu-Isu CSR di Tujuh Negara Asia.....	42
Tabel 3.1 Tahap-tahap Pelaksanaan Program Community Development PT. INCO.....	67

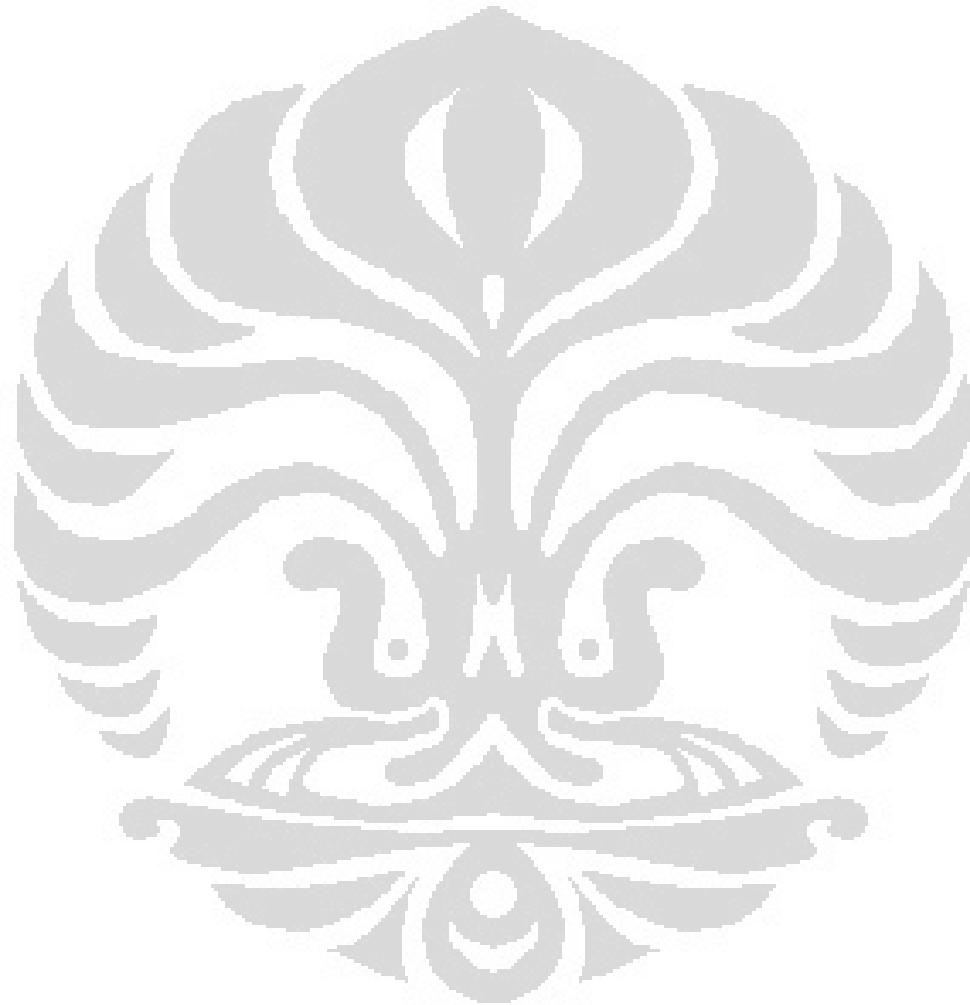


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan Hubungan Negara, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (model Analisis Tiga Sektor)	32
Gambar 2.2. Kategori Perusahaan Berdasarkan Profil Perusahaan dan Anggaran CSR	44
Gambar 2.3. Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR	44
Gambar 2.4. Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan	50
Gambar 2.5. Triple Bottom Lines dalam CSR	51
Gambar 2.6. Kerangka Konseptual	53
Gambar 3.1. Laba Bersih perusahaan 2003 – 2007	57
Gambar 3.2. Jumlah Hasil Produksi Perusahaan 2003 – 2007	57
Gambar 3.3. Struktur Organisasi External Relation Departemen PT. INCO	60
Gambar 3.4. Paradigma Lama Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat PT. INCO	63
Gambar 3.5. Paradigma Baru Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat PT. INCO	65
Gambar 4.1. Pengeluaran PT. INCO bagi Program Pengembangan Masyarakat 2004 – 2008 dalam Juta Dollar	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Framework Kajian CSR
- Lampiran 2 : Panduan Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara



DAFTAR ISTILAH

<i>Ad Hock</i>	: Bersifat sementara
<i>Altruisme</i>	: Sifat mementingkan orang lain
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
<i>Bottom up</i>	: Pendekatan dari bawah ke atas
<i>Communal property</i>	: Badan usaha yang dikelola oleh individu dan kelompok
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
CD/Comdev	: <i>Community Development</i> , Pengembangan Masyarakat.
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
<i>Charity</i>	: kedermawanan atas dasar belas kasihan
CSA	: <i>Corporate Social Activity</i>
CSO	: <i>Corporate Social Obligation</i>
<i>Dual Society</i>	: Kesenjangan yang terjadi dalam satu area dimana perusahaan berjalan dengan menggunakan teknologi tinggi di satu sisi dan masyarakat yang tertinggal secara ekonomi di sisi lain
<i>Empowerment</i>	: Pemberdayaan Masyarakat, Kemandirian Masyarakat
<i>Enclave</i>	: Keterpisahan antara perusahaan dengan masyarakat
<i>External Driven</i>	: Dorongan dari luar
<i>Global Compact Programm</i>	: Gerakan Internasional yang bersifat sukarela terhadap tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat.
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i> , Tata Kelola Perusahaan yang baik

<i>HRD</i>	: <i>Human Resource Development</i>
<i>HAM</i>	: Hak Azasi Manusia
<i>ILO</i>	: <i>International Labour Organization</i> , Badan PBB yang khusus menangani masalah Buruh
<i>Indepth Interview</i>	: Wawancara Mendalam
<i>Internal Driven</i>	: Dorongan dari dalam
<i>Interview Guide</i>	: Panduan wawancara
<i>ISRA</i>	: <i>Indonesia Sustainability Reporting Awards</i>
<i>KAT</i>	: Komunitas Adat Terpencil
<i>LSM</i>	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<i>Market Oriented</i>	: Berorientasi Pasar
<i>NGO</i>	: Non Government Organization
<i>Non Renewable</i>	: Tidak dapat diperbaharui
<i>Observasi</i>	: Pengamatan
<i>PBB</i>	: Perserikatan Bangsa-bangsa
<i>PRA</i>	: <i>Participatory Rural Appraisal</i> , Memahami desa secara cepat.
<i>Privat Poverty</i>	: Badan Usaha yang status kepemilikannya berada ditangan individu atau kelompok usaha.
<i>Self Interest</i>	: Kepentingan Sendiri
<i>Snowball</i>	: Bola salju
<i>Stakeholders</i>	: pihak-pihak yang berkepentingan
<i>State Poverty</i>	: Badan usaha yang status kepemilikannya oleh Negara
<i>Top down</i>	: Pendekatan dari atas ke bawah
<i>Transnasional Corporate</i>	: Perusahaan Multi-nasional
<i>Triangulasi</i>	: Pengecekan data untuk kebenaran dan keabsahan data

<i>Triple Bottom Lines</i>	: Konsep CSR yang dipopulerkan oleh Elkington dengan menggarisbawahi 3 hal yakni <i>profit, people, procedure</i> .
<i>UNFCCC</i>	: <i>United Nation Framework Convention on Climate Change</i> .
<i>Voluntary</i>	: bersifat sukarela
<i>Welfare System</i>	: Sistem Kesejahteraan
<i>WCED</i>	: <i>the World Commission on Environmental and Development</i>

Defenisi CSR dari berbagai sumber :

- **World Business Council for Sustainable Development** : komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
- **International Finance Corporation** : komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan
- **Institute of Chartered Accountants, England and Wales** : jaminan bahwa organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan seraya memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) mereka.
- **Canadian Government** : kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

- **European Commission** : sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
- **CSR Asia** : komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.
- **ISO 26000** mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR, meskipun pedoman CSR standar internasional ini baru akan ditetapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah : tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3, 2007).

Hati Manusia menyimpan terlalu banyak keinginan
namun jiwa kita tetap satu...
Kepalanya menyusun terlalu banyak rencana
Namun kemampuan kita ada batasnya....

ada baiknya Sang Manusia ...
sesekali menatap mata kanak-kanak
serta merenung dan berserah diri pada-Nya....

untuk kembali bisa menyadari :
bahwa Kebahagiaan datang karena kita memberi ...
Cinta ada karena kita berbagi...
Ketakutan kita sirna karena kita tak memiliki rasa dengki ...
Karena hidup itu "indah"

DAN UNTUK HIDUP, itu LEBIH DARI CUKUP

(Saduran Puisi Sri Lanka- pengarang tak dikenal)

**Kupersembahkan Untuknya, Untukku dan Untuk semua
yang telah menjadi "dase" dalam kehidupanku**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran penting sumber daya alam dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia begitu esensial. Hal ini disebabkan sebagian besar kebutuhan dasar manusia dipenuhi baik secara langsung maupun melalui pengolahan lebih lanjut dari sumber daya alam seperti air, udara, makanan, minyak, gas bumi dll. Optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara memadai dan berkelanjutan. Urgensi pengelolaan ini menjadi jauh lebih penting apabila terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) atau sumber daya alam dalam kelompok *stock*, mengingat ketersediaannya yang terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaharunya. Dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang lebih mampu menjaga keberlanjutannya, meminimalisir dampak eksternalitas negatifnya serta penyiapan konversinya dalam bentuk sumber daya lainnya agar pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan umat manusia, dan pada sisi lain tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada *stock* tersebut dapat diserap disektor lain.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ada tiga model pengelolaan sumber daya alam yang biasa dipraktekkan yaitu, *state property* dimana klaim kepemilikan berada ditangan negara, *private property* dimana klaim kepemilikan berada di tangan individu atau kelompok usaha (korporasi), dan *common property* atau *communal property*, dimana individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama (Gibb and Bromley, 1989). Perbedaan ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya alam adalah keputusan politik yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan sebuah Negara yang tergantung dari konfigurasi dan dinamika kekuatan politik yang ada. Di Indonesia sendiri, sumber daya alam dikelola dengan watak yang terlalu berpusat pada negara dengan sifat pengelolaan secara otoriter dan oligarkis (Aditjondro, 2006). Munculnya ribuan perlawanan rakyat atas pengelolaan

sumber daya alam disebabkan oleh pola pengelolaannya yang dianggap tidak adil dan cenderung berpihak pada kepentingan modal (Aditjondro, 2006; Jhamtani et al, 2006).

Terhitung sejak tahun 2002, bisnis pertambangan di Indonesia meningkat pesat, hal ini dikarenakan tingginya harga komoditas pertambangan yang membuat banyak investor seperti Cina, Jepang, Eropa Timur dan banyak negara lain melakukan kerjasama dengan pihak Indonesia dalam bisnis pertambangan. Sejak akhir tahun 2002 hingga kini terjadi kenaikan harga komoditas secara signifikan. Sebagai contoh, sejak tahun 2003 hingga kini harga nikel naik 89 persen, tembaga 129 persen, zinc 84 persen, dan alumunium 40 persen.

Harus diakui, di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik umum korporasi skala besar biasanya beroperasi secara *enclave*, dan melahirkan perspektif *dual society*, tumbuhnya dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi perekonomian masyarakat justru berjalan sangat lambat (Prayogo, 2004).

Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut industri pertambangan lebih banyak menyedot tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat sehingga tenaga-tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang. Keterpisahan (*enclavism*) inilah yang kemudian menyebabkan hubungan industri pertambangan dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik.

Berbagai tuntutan seperti ganti-rugi atas kerusakan lingkungan, penempatan tenaga kerja lokal, pembagian keuntungan, dan lain-lain sangat jarang memperoleh solusi yang mendasar dan memuaskan masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang bersifat *profit-oriented* semata. Di masa lalu, keadaan seperti ini dipandang sebagai tidak ada masalah karena tradisi represif dalam pemerintahan kita masih sangat dominan.

Transisi sistemik yang terjadi di era pemerintahan Habibie melalui liberalisasi politik (transisi menuju demokrasi), otonomi daerah (transisi pemerintahan menuju desentralisasi, dan liberalisasi ekonomi (transisi menuju ekonomi berbasis pasar) berimplikasi pada perubahan struktural dalam pola hubungan negara, pasar dan masyarakat. Perubahan struktural ini ditandai oleh relatif melemahnya kekuatan Negara berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan baik vertikal maupun horizontal. Perubahan struktur sosial ini dan peningkatan eskalasi konflik juga terjadi diseperti pengelolaan sumber daya alam yang sejak zaman Orde Baru memang telah banyak terjadi baik konflik yang sifatnya manifest maupun laten. Banyaknya konflik antara korporasi dan masyarakat khususnya di sektor pertambangan menunjukkan geliat perubahan ini yang dimediasi akibat terciptanya ruang baru pasca reformasi 1998, delegitimasi otoritas dan otonomi daerah 1999. Pada sisi lain juga didorong oleh semakin berdayanya masyarakat (*empowerment*) akibat demokratisasi, kehadiran NGO dan Pers, serta dukungan eksternal/dana (Prayogo, 2004)

Empat tahun belakangan ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) memang sedang menjadi *trend* di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus. Perusahaan cukup berlindung dibalik kekuasaan oknum-oknum tertentu saja untuk menghindar dari tuntutan masyarakat. Akhirnya masyarakat semakin marjinal dan miskin. Karena disadari atau tidak, lebih dari tiga dekade, ekonomi Indonesia dibangun atas dasar *market oriented* yang memberikan peluang tak terbatas pada perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam.

CSR menurut Suharto (2008) diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak korporasi industri tambang telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam tataran praktis, yaitu

sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan.

Jika dipetakan, definisi CSR yang relatif mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *triple bottom lines* (Elkington, 1998) dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yakni *procedure* dengan demikian definisi *Corporate Social Responsibility* adalah : kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional (Suharto Edi, 2007).

Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American Tobacco (BAT), misalnya, pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya *lip service* belaka. Program CSR bersifat *ad hoc* dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi "ciuman" berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat *myopic*, berjangka pendek, dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial.

Industri tambang perlu diyakinkan bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional dan domestik terhadap industri ini. Karena itu, penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai *cost* semata-mata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Selama ini, CSR di lingkungan perusahaan swasta masih bersifat sukarela (*voluntary*), dan karena itu wajar jika penerapannya masih bebas tafsir berdasarkan kepentingan korporasi masing-masing (Suharto, 2007).

Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia menurut Suharto, 2008) agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus neo-liberalisme seperti sekarang ini. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa

seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku

CSR kini jadi frase yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* telah mendorong CSR semakin besar artinya bagi dunia bisnis (Nursahid, 2006).

Di tanah air, CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1)

Sayangnya, pendekatan *altruisme* (sifat mementingkan kepentingan orang lain) belum menjadi *mainstream* sebagian besar industri tambang. Pengambil keputusan ini memandang filantropi sebagai pencerahan atas kepentingan pribadi (*self interest*). *Self interest* merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam praktek kedermawanan sosial perusahaan. Motif industri tambang dalam menyumbang seringkali tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan tanggungjawab moral, melainkan dalam bentuk pemberian motif *charity* (amal atau derma), *image building* (promosi), *tax-facility* (fasilitas pajak) *security-prosperity* (keamanan dan peningkatan kesejahteraan), atau bahkan *money laundering* (Nursahid, 2006 : 21).

Pada tanggal 26 Juli 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan *Global Compact Program* sebagai sebuah gerakan internasional yang bersifat sukarela. Hal ini ditujukan kepada dunia Bisnis, Institusi, dan LSM di seluruh dunia untuk menerapkan sepuluh prinsip tentang Hak Asasi manusia (HAM), Tenaga Kerja, Lingkungan dan Anti Korupsi. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat internasional dan kepentingan bisnis perusahaan. Kesepuluh prinsip tersebut merupakan turunan dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya yakni prinsip dasar *International Labour Organization* (ILO) tentang Hak di Tempat Kerja, serta Deklarasi RIO tentang Lingkungan dan Pembangunan.

Global Compact adalah suatu inisiatif internasional untuk mempertemukan perusahaan-perusahaan swasta dengan badan PBB, Organisasi Buruh dan Masyarakat Sipil guna mendukung sepuluh prinsip dalam HAM, Perburuhan dan Lingkungan Hidup. Kesepuluh prinsip tersebut adalah (CSR review, 2008) :

1. Perusahaan harus mendukung dan menghargai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam ruang lingkup pengaruh perusahaannya.
2. Perusahaan bisnis harus memastikan agar tidak terlibat dalam pelanggaran HAM buruh.
3. Perusahaan seharusnya mendorong kebebasan berserikat dan pengakuan tentang hak melakukan negosiasi secara kolektif.
4. Menghapus segala bentuk kekerasan dan beban kerja kepada buruh.
5. Menghapus segala bentuk buruh anak.
6. Menghapus diskriminasi berkaitan dengan pencarian tenaga kerja dan pekerjaan.
7. Perusahaan harus mendukung pendekatan terhadap tantangan-tantangan lingkungan dalam perubahan lingkungan.
8. Mengambil inisiatif untuk mendorong lebih luas pertanggungjawaban bisnis terhadap lingkungan.
9. Mendorong pembangunan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
10. Perusahaan seharusnya melawan segala bentuk korupsi, termasuk didalamnya pemerasan dan penyuapan.

Dengan demikian, melalui kekuatan upaya kolektif, *Global Compact* mencoba memajukan tata pengelolaan perusahaan yang bertanggungjawab sehingga bisnis dapat mengambil bagian dalam memecahkan masalah globalisasi, terutama dalam mempromosikan perekonomian global yang berkelanjutan dan adil bagi pelaku bisnis, masyarakat dan juga lingkungan (CSR review-online.com).

Dari hasil penelitian Bandu (2001), melihat tanggungjawab sosial perusahaan *Transnasional Corporate* dalam hal ini PT. Newmon Nusa Tenggara terhadap masyarakat sekitar tambang ditemukan bahwa berbagai aktivitas dan

program yang mengarah kepada tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian perlindungan terhadap hak-hak karyawan, memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar area tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal seperti bahaya limbah perusahaan, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses penambangan, sampai pada persoalan *cultural shock* bagi masyarakat sekitar tambang. Sehingga lebih lanjut menurut Bandu diperlukan sebuah komitmen dari semua *stakeholders* terhadap perbaikan kondisi masyarakat di sekitar area tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian Jahya (2004: 129-131) yang meneliti tentang efektifitas pelaksanaan CSR PT Berau Coal di Kalimantan Timur menemukan bahwa bantuan (*charity*) yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (63 %). Berdasarkan pengalaman lapangan, Jahya memberikan masukan perencanaan sosial bagi pelaksanaan CSR yang dikembangkan melalui manajemen *Community Development (CD)* yang kolaboratif dengan mengedepankan antara lain : Pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat yang beragam (dengan difasilitasi oleh *Community Development Officer/CDO* bagi kelompok baru); Melibatkan masyarakat dalam monitoring (meskipun baru pada kegiatan pengembangan ekonomi) setiap bulannya; dan Evaluasi kegiatan bersama masyarakat untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan perencanaan berikutnya. Tentang pelaksanaan program CSR di PT Berau Coal ini telah membawa PT Berau Coal menjadi pemenang kategori sosial, kategori ekonomi dan kategori lingkungan dalam CSR Award 2005 (Pambudi, 2005: 34). Keberhasilan ini sangat didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian Jahya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian evaluasi program, berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan ini yakni

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan mulai dari cara pandang perusahaan terhadap CSR, bagaimana strategi perusahaan dalam mengimplementasikan CSR nya dan seperti apa manfaat yang diperoleh oleh pihak perusahaan dan masyarakat terhadap pelaksanaan CSR tersebut.

Salah satu sektor usaha yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program CSR adalah dunia industri yang cukup banyak tersebar di Indonesia. Dunia industri diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi pada masyarakat sekitar mengingat lingkungan kerjanya yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat sekitar dan sarat dengan masalah seperti pencemaran lingkungan dan kesenjangan sosial. Hal ini bisa dilihat dari maraknya aksi demonstrasi masyarakat di sekitar industri tersebut (Wahjoedi, 2004 : 6).

PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT.INCO), di mana penelitian ini dilaksanakan merupakan salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di dunia, yang memiliki daerah konsesi di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pusat operasinya sendiri berada di daerah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Mulai beroperasi sejak tahun 1968, saat ini telah memasuki Kontrak Karya ke dua. Perusahaan ini menyediakan lapangan kerja terampil, mewujudkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di daerah operasinya dengan melaksanakan program-program CSR dimana pengembangan masyarakat (*comdev*) menjadi salah satu strategi utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dengan menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dalam pelaksanaan *comdev*-nya. Selain itu juga menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan memberi sumbangan positif terhadap ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2007 PT. INCO menerima penghargaan dari *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA) untuk kategori *commendation for sustainability reporting, First time sustainability Reporting*. Pada tahun yang sama juga memperoleh sertifikasi ISO 17025 untuk *laboratorium process technology*. Sebelumnya pada tahun 2006 meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi untuk kategori penghargaan

pengendalian erosi dan sedimentasi kegiatan pertambangan mineral tahun 2005 – 2006, dan penghargaan Pratama Keselamatan Pertambangan pada tahun 2006. Disamping itu juga sering kali ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye pengelolaan lingkungan yang sustainable, ramah lingkungan dan lain sebagainya, seperti pada pelaksanaan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 2007 di Bali.

Selain itu PT. INCO juga telah membangun sarana dan prasarana umum bagi masyarakat seperti penyediaan sarana Pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan Institut Teknologi Sorowako (ITS), disamping juga melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Negeri Makassar untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru) yang ada di kabupaten Luwu Timur. Di bidang kesehatan, PT INCO membangun Rumah Sakit yang terletak di wilayah Sorowako, disamping itu juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk pembangunan daerah di 4 (empat) kecamatan dari 11 (Sebelas) kecamatan yang terdapat di kabupaten Luwu Timur.

Namun demikian, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 menunjukkan bahwa 70 % penduduk di Kabupaten ini tidak tamat SMP. Disamping itu juga masih terlihat keadaan atau situasi dimana kehidupan ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan di satu sisi, dan hingar bingar bisnis pertambangan yang sarat dengan teknologi tinggi dan kehidupan karyawan perusahaan yang *high cost* pada sisi lain.

1.2. Masalah Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan kajian melalui studi kasus agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas konsep pelaksanaan CSR pada perusahaan Tambang nikel terbesar di dunia yang beroperasi di Sulawesi Selatan (PT. INCO). Dari hasil observasi memperlihatkan perusahaan tambang ini beroperasi di daerah pegunungan atau hutan dimana terdapat komunitas masyarakat yang tinggal dan menetap disekitar wilayah tersebut, juga bagaimana perusahaan melakukan aktivitas pertambangannya dengan cara yang bertanggungjawab bagi lingkungan. Disamping itu cakupan permasalahan yang dihadapi juga sangat luas mulai dari konflik atas sumberdaya

alam, kemiskinan masyarakat, masalah lingkungan hidup, serta keuntungan bagi perusahaan sendiri.

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini. *Pertama*, kamufase. PT. Inco pada fase sebelum tahun 2004, pelaksanaan CSR bagi masyarakat sekitar perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh adanya tekanan dari kelompok elit atau broker yang memanfaatkan perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau proyek-proyek dari PT. Inco, sehingga pelaksanaan CSR bukan murni dari keinginan atau kesadaran perusahaan melainkan dari tekanan-tekanan yang datangnya dari masyarakat (laporan Comdev PT. Inco, 2004). *Kedua*, generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan *template* atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan *copy-paste* (kadang dengan sedikit modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan. *Ketiga*, *directive*. Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara *top-down* dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (*shareholders*) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip *stakeholders engagement* yang benar. *Keempat*, *lip service*. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului oleh *needs assessment* dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan (Suharto, 2008).

Definisi CSR akan sangat menentukan pendekatan apa yang akan dipakai dalam melaksanakan program CSR itu sendiri. Sayangnya sampai saat ini belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi (lihat Majalah Bisnis dan CSR; sukada dan Jalal, 2007) seperti *World Business Council for Sustainable Development*, *International Finance Corporation*, dan lain sebagainya selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran 1 tesis ini.

CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama yakni *the*

environment, social development, human right, organization governance, labor practices, fair operating practices dan *consumer issues* (lihat Sukada dan Jalal, 2007)

Dengan demikian permasalahan CSR ini menjadi menarik perhatian untuk dikaji terkait fenomena tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dengan cara bagaimana perusahaan memandang konsep CSR itu sendiri. Cara pandang perusahaan terhadap CSR terdiri dari beberapa jenis yakni, *external driven, reputation driven, internal driven*. *External driven* merupakan cara pandang perusahaan yang terkait dengan faktor di luar perusahaan. *External driven* ini terdiri dari *environmental driven* yang berarti bahwa perusahaan melakukan CSR karena terdapat dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. *External driven* juga terdiri dari *reputation driven* yang berarti bahwa perusahaan melakukan CSR karena ingin mendongkrak citra perusahaan. *Compliance* merupakan cara pandang perusahaan yang berarti bahwa perusahaan melakukan CSR karena adanya peraturan atau hukum yang mengaturnya, sedangkan *internal driven* berarti bahwa perusahaan melakukan CSR karena ada dorongan tulus dari perusahaan untuk melakukannya (Suharto, 2005).

Teori mengenai cara pandang perusahaan terhadap CSR tersebut dapat mengemukakan pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana pandangan perusahaan mengenai CSR. Pertanyaan tersebut terkait dengan pandangan perusahaan terhadap konsep CSR. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dijabarkan dan diketahui apakah perusahaan yang akan diteliti telah mengenal CSR dan apakah perusahaan tersebut telah menjalankan CSR. Pertanyaan ini penting untuk dikaji mengingat seberapa besar CSR telah terinternalisasi dan berlaku di perusahaan. PT Inco sendiri sebagai perusahaan yang menjadi tempat penelitian dalam melaksanakan CSR dibagi dalam 2 (dua) fase, yakni fase sebelum tahun 2004 dimana perusahaan masih berpandangan bahwa CSR hanya sekedar derma perusahaan kepada masyarakat sehingga pada fase ini pelaksanaan CSR lebih banyak dipengaruhi oleh desakan atau permintaan masyarakat yang seringkali hanya diwakili oleh kelompok-kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan dana bantuan dari perusahaan. Sedangkan pada

fase berikutnya, yakni fase setelah tahun 2004, pandangan perusahaan terhadap CSR merupakan hal yang menjadi mandat perusahaan sebagai konsekwensi kegiatan pertambangan di daerah tersebut, sehingga pelaksanaan CSR perusahaan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar daerah pertambangan dengan mengadopsi pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam perencanaannya dengan metode *bottom up* dan berlandaskan pada kebutuhan dasar masyarakat.

Strategi dalam penerapan CSR penting untuk memantapkan tujuan dan mencapai program yang bermanfaat. Strategi yang dijalankan perusahaan, dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap program yang dilaksanakan. Pelaksanaan dari strategi perusahaan, kemudian dapat dijalankan secara terstruktur ataupun disesuaikan dengan keadaan apabila terjadi perubahan pada saat program berjalan. Agar dapat terstruktur dengan baik, maka dalam strategi dapat dilibatkan tahap-tahap CSR, dimana pada tahap tersebut terdiri dari tahap perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan. Terkait dengan hal tersebut, setiap perusahaan tertentu memiliki kebijakan yang beragam, hal ini tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan berikutnya yakni bagaimana strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam melakukan CSR. pertanyaan ini mencakup bagaimana strategi perusahaan dari segi perencanaan, implementasi, evaluasi sampai pada tahap pelaporan.

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, manfaat yang diperoleh perusahaan maupun komunitas lokal juga merupakan hal yang dapat dijadikan bukti secara nyata bahwa perusahaan telah melakukan program CSR, karena dalam hal ini perusahaan maupun komunitas lokal dan masyarakat umum merupakan *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) yang sangat terkait dengan pelaksanaan program CSR. Dalam melakukan tanggung jawab sosialnya, perusahaan tentunya berkepentingan agar programnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Setiap program yang dijalankan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh komunitas lokal. Pada kasus yang diteliti, masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas keterampilan teknis dan pengetahuan wiraswasta sebagai

mitra perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan terjadi peningkatan kualitas hidup, selain itu juga peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, air bersih dan penerangan bagi masyarakat . Selain itu, dari sisi internal perusahaan juga memungkinkan untuk menginginkan terjadinya penambahan keuntungan maupun perolehan citra yang positif dari program CSR. Masyarakat sebagai penerima program CSR tentunya dapat merasakan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengukung hal-hal positif. Bagi perusahaan, program CSR dapat berguna untuk mempertahankan usaha perusahaan dengan membangun citra positif kepada masyarakat secara umum dan komunitas lokal secara khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini yakni manfaat apa yang diperoleh masyarakat dan pihak perusahaan sendiri pada penerapan konsep CSR

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan CSR PT. Inco
2. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dan pihak perusahaan pada penerapan konsep CSR.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang digambarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjajaki pelaksanaan CSR
2. Menjajaki manfaat yang diperoleh masyarakat dan pihak perusahaan pada penerapan konsep CSR tersebut

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berupa :

1.4.1. Signifikansi Akademis

1. Penelitian ini mencoba menerapkan dan melakukan refleksi dari gugus teori yang terikat dalam paradigma CSR. Karena itu penelitian ini akan mengarah pada pembedahan sebuah kasus bersandarkan pada sebuah

paradigma CSR sekaligus melihat relevansi paradigma CSR dengan Perusahaan serta masyarakat Indonesia di era transisi.

2. Dari segi kegiatan penelitian, diharapkan temuan studi ini dapat mendorong peneliti lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif tentang CSR di Indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat kajian Pembangunan Sosial di mana CSR merupakan salah satu kajian penting agar usaha pertambangan lebih mencerminkan humanisasi.

1.4.2. Signifikansi praktis

1. Signifikansi Kebijakan

- Berhubung CSR di Indonesia baru tertuang dalam Undang Undang dan sampai saat ini turunan dari Undang Undang tersebut baru dirumuskan dalam KEPMEN tentang BUMN sehingga penerapan CSR bagi perusahaan swasta belum ada. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pemahaman dan pengaturan pelaksanaan CSR di Indonesia.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (legislatif dan eksekutif) serta bagi pihak perusahaan tambang khususnya PT. INCO dalam melaksanakan CSR.

2. Signifikansi bagi Perusahaan Tambang di Indonesia.

Sektor pertambangan di Indonesia adalah sektor yang sangat penting baik dari segi penerimaan Negara maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Kekayaan tambang yang dimiliki oleh Indonesia akan banyak memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bila dapat dikelola dengan baik. Sayangnya kekayaan bahan tambang Indonesia kadangkala berubah menjadi kutukan yang menyebabkan terjadinya konflik antara seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Sejalan dengan transisi yang berlangsung, sektor pertambangan banyak mendapatkan kritik. Walaupun disadari penelitian ini hanya terbatas pada PT. INCO, namun diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana sektor pertambangan di Indonesia memberikan

peran penting dalam pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam *good governance* dimana sektor swasta ikut berperan serta dalam proses pembangunan yang selanjutnya dikerucutkan dalam *good corporate governance*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami tentang Analisis CSR, yang tentu saja membutuhkan pengamatan mendalam dan holistik. Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada dan melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang berbeda, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992 ; 15-16), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang sebagian besar data-datanya berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut dikumpulkan dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, studi literature dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk memahami dan menjelaskan situasi tersebut dalam pelaksanaan CSR PT. Inco. Disamping itu, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan asumsi pendekatan kualitatif (Hendrarso, 2005).

Karakteristik dari penelitian kualitatif sejalan dengan tujuan penelitian ditambah dengan beberapa karakteristik khusus yang dimilikinya, sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih mendalam maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Taylor & Bogdan, 1984; Marshall & Rossman, 1989). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan holistik tersebut tentang tahap-tahap pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Inco, strategi yang digunakan oleh perusahaan dan manfaatnya bagi masyarakat dan pihak perusahaan sendiri.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah penelitian eksploratif yaitu menjajaki konsep, aplikasi dan manfaat pelaksanaan CSR bagi pihak masyarakat dan pihak perusahaan pada PT. Inco. Jenis penelitian ini, menurut Singarimbun dan Sofian (1981) bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesis. Pengetahuan peneliti tentang gejala yang diteliti masih sedikit. Penelitian jenis ini sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk

penelitian yang lebih mendalam, baik untuk penelitian penjelasan maupun penelitian deskriptif

1.5.2. Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memiliki beberapa asumsi menyangkut peran peneliti yaitu menyangkut asumsi *epistemology* dan asumsi *axiology* (Creswell, 1994). Asumsi *epistemologis* menegaskan bahwa penulis tidak independent terhadap yang diteliti sementara asumsi *axiology* menegaskan bahwa penelitian kualitatif sarat nilai dan bias. Karena itu, bias nilai ketidaknetralan dan penilaian peneliti dari sejak awal sudah harus dinyatakan secara tegas oleh peneliti. Keterbukaan seperti ini dapat bermanfaat positif, bukannya meragukan (Locke, et all, 1987). Keterbukaan ini akan saya uraikan dengan lebih jelas mulai dari paradigma yang saya anut, latar belakang pekerjaan saya sekaligus interaksi saya dengan tema dan teman-teman lain yang terkait dengan penelitian ini.

Dari sejak awal, buku dan teori yang banyak di konsumsi adalah teori yang termasuk dalam gugus paradigma pembangunan dimana ketertarikan saya pada wacana pembangunan alternatif atau pembangunan yang berpusat pada manusia. Yaitu sebuah paradigma yang mendasarkan asumsinya bahwa pembangunan sangat ditentukan oleh aspek manusianya sehingga dalam pelaksanaan pembangunan semestinya setiap elemen masyarakat sedapat mungkin dilibatkan di dalamnya. *Good governance* memberikan pemahaman yang baru dimana pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sendiri. Arah pembangunan yang didesain oleh pemerintah sangat ditentukan oleh paradigma atau cara pandang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta formasi kekuatan politik dan dinamika dari kekuatan politik yang ada. Dalam sebuah masyarakat yang kapitalistik, kekuatan modal akan banyak bekerjasama dengan Negara dalam meminggirkan masyarakat. Karena itu, upaya penguatan masyarakat agar mampu berhadapan dengan kekuatan modal dan Negara perlu diintensifkan di era transisi ini.

Pertambahan dan pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu bagian dalam dunia kerja saya sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang, sebagai staff ahli di Panitia *Ad Hock* II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

yang membidangi masalah ekonomi dan sumberdaya alam. Selama bertugas di DPD RI, menemukan banyaknya permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan yang mengalami peningkatan eskalasi sejak masa transisi. Hal itu mengantarkan saya pada kesimpulan, bahwa pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar merupakan warisan era orde baru dengan model pengelolaan Negara secara sentralistik dan terpusat tanpa melibatkan masyarakat, menjadi akar dari beberapa permasalahan yang muncul sehingga perlu dikoreksi pengelolaannya.

Pada sisi lain latar belakang organisasi kemahasiswaan saya dan kedekatan saya dengan beberapa teman-teman NGO yang terlibat dalam advokasi lingkungan hidup dan masyarakat seperti Walhi, Jatam, Pusat Studi Pembaharuan dan lain-lain semakin menguatkan kesimpulan saya. Karena itu persepsi saya yang terbangun sampai saat ini bahwa alienasi dan marginalisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dikarenakan oleh ketidak berdayaan masyarakat dan posisi tawar masyarakat yang lemah terhadap kebijakan. Situasi transisi yang terjadi harusnya menjadi momentum pembenahan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial dengan memberdayakan masyarakat setempat.

1.5.3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan tambang Nikel terbesar di dunia yakni di PT. Inco, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebelum menentukan lokasi penelitian, dilakukan observasi terlebih dahulu melalui penelusuran kepustakaan baik dari surat kabar, buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta media online (internet). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2009 sampai bulan Mei 2009. Penelitian yang dimaksud adalah waktu penelitian intensif di lapangan hingga pengolahan data dan analisis data

Pemilihan PT. Inco sebagai tempat pelaksanaan penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain :

1. PT. Inco mulai beroperasi sejak tahun 1968 dengan luas daerah konsesi 218.530 Ha dan baru melaksanakan CSR pada tahun 2000-an. Dimulai dengan pendekatan karitas pada fase sebelum tahun 2004 dan pada fase

setelah tahun 2004 baru mengimplementasikan program CSR pada seluruh mata rantai kegiatan pertambangannya.

2. Pusat daerah operasi pertambangan PT. Inco yang terletak di daerah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur banyak terdapat kantong-kantong usaha yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan pertambangan.
3. Dari laporan pelaksanaan CSR PT. Inco yang dipublikasikan pada tahun 2006 dikatakan bahwa fokus perusahaan dalam program CSR nya terfokus pada enam sektor utama, yakni Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan bisnis lokal dan sosial budaya. Selain itu juga melakukan program yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan seperti revegetasi hutan, menjaga kualitas air, dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Kebutuhan akan barang dan jasa PT. Inco senilai Rp. 185 Milyar dipenuhi terutama oleh perusahaan lokal. Anggaran untuk program pengembangan masyarakat pada tahun 2005 sejumlah US\$ 721,265,00 Selain itu, perusahaan juga mengalokasikan 12,13% dari total sumbangan tahunan dan program pengembangan masyarakat untuk membantu memperkuat perusahaan lokal, pertanian dan peternakan. Disamping itu 5,51 % dari dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.
5. Dari data statistik Kabupaten Luwu Timur tahun 2003, 70 % penduduk di kabupaten tersebut tidak tamat SMP, sementara Kabupaten Luwu Timur merupakan pusat wilayah operasi PT. INCO. Disisi lain, perusahaan telah membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain, namun kecenderungan terjadinya *dual society* masih terlihat dengan kasat mata.

1.5.4. Pemilihan Informan

Untuk memperoleh informasi yang akurat sangat ditentukan oleh pemilihan nara sumber (informan). Menurut Moleong (2000 : 132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi/kondisi latar penelitian serta mempunyai pengalaman/pengetahuan tentang latar penelitian.

Untuk itu maka teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* di mana informan ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini karena informan mempunyai informasi yang dibutuhkan untuk memahami masalah penelitian.

Sesuai dengan kebutuhan penelitian, informan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni

1. Pihak Perusahaan sebagai pelaksana program dan pengambil kebijakan dalam program CSR. Untuk pihak perusahaan, peneliti menetapkan sumber informannya adalah *Chief Executive Officer* sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam perusahaan, Kepala Departemen *External Relation* sebagai ujung tombak bagi perusahaan dalam berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah daerah, selain itu juga sebagai penanggungjawab dan pelaksana program CSR bagi perusahaan dan karyawan yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan CSR perusahaan secara internal
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai penentu kebijakan tertinggi di wilayah administratif kabupaten Luwu Timur yang menjadi pusat wilayah operasi PT. INCO. Untuk kelompok pemerintah daerah, peneliti menetapkan Bupati Kabupaten Luwu Timur dan Kepala Kecamatan Nuha sebagai salah satu kecamatan yang menjadi daerah sasaran pelaksanaan CSR PT. Inco
3. Masyarakat setempat sebagai penerima sasaran program CSR perusahaan dan penerima manfaat dari program tersebut. Dari pihak masyarakat peneliti menetapkan 4 (empat) orang yang masing-masing dipilih dari masing-masing kecamatan yang menjadi daerah sasaran program CSR PT. Inco di empat kecamatan dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 1.1. Informasi yang Dicari dan Sumber Informan

Informasi yang dicari	Informan	Jumlah
Pandangan dan pencapaian perusahaan tentang CSR, sumber dan kondisi pos anggaran CSR, pelaksanaan dan dampak CSR terkait dengan peningkatan kesejahteraan social, hambatan dalam melaksanakan CSR, manfaat CSR bagi perusahaan	CEO/Board of Directors	1 Orang
Program yang menjadi focus konsep CSR, alasan pemilihan program, dukungan Pemerintah daerah dan Ormas, manfaat bagi masyarakat, pemda dan perusahaan, keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah, hambatan operasional dalam pelaksanaan CSR, ketersediaan dana,	Kepala Departemen External Relation	1 Orang
Pandangan Pemda tentang CSR PT INCO, keterlibatan Pemda dengan program CSR PT. Inco, dampak bagi pencapaian program Pemda, hambatan kerjasama, harapan Pemda terhadap program CSR PT. Inco	Pemerintah Daerah	2 Orang
Pandangan tentang CSR PT INCO, peran dalam program CSR, hambatan yang dihadapi dalam kerjasama, keterlibatan masyarakat dalam program, manfaat program, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat	LSM dan masyarakat yang menjadi sasaran program dan karyawan	LSM 1 orang Masyarakat 3 Orang Karyawan 1 orang
Jumlah		9 Orang

Sumber : Telah Diolah Kembali

Untuk Informan dari LSM, dipilih yang menjadi mitra perusahaan dalam melaksanakan program CSR, sedangkan untuk masyarakat, dipilih dari masyarakat yang berada di daerah pemberdayaan PT. Inco yakni Kecamatan Nuha, Kecamatan Towoti, Kecamatan Wosponda dan Kecamatan Malili yang selanjutnya menjadi daerah pendampingan perusahaan dalam pengembangan masyarakatnya, dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*). Dengan teknik ini peneliti melakukan pengambilan sampel secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai sebelumnya, demikian seterusnya (Patton, 2002: 237). Teknik ini digunakan untuk memperluas dan melacak informan kunci yang kaya akan informasi dengan kasus-kasus yang unik. Dengan

teknik ini maka pencarian informan dimulai melalui wawancara pertama dengan Fasilitator Wilayah atau Tenaga Pendamping Lapangan sebagai orang yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan para penerima manfaat program untuk seterusnya bergulir sampai tercapai sejumlah informan.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subyek yang diteliti dan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari lembaga atau institusi tertentu yang terkait dengan penelitian (Hendrarso, 2005). Dua data ini dikumpulkan dengan penggunaan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi literatur

Bentuk dari studi literatur ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, hasil penelitian dan dokumen lainnya. Maksud dari studi literatur ini adalah untuk memberi dan menambah pemahaman penulis terhadap permasalahan penelitian, kerangka pemikiran dengan konsep-konsep yang dikembangkan dari teori-teori para ahli dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, studi literatur akan membantu dan menggiring peneliti kepada tujuan penelitian yang lebih terarah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai jenis dokumen yang memiliki tema baik secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, yaitu kajian CSR pada perusahaan tambang dan metode penelitian sosial.

2. Wawancara mendalam, (*indepth interview*)

Teknik wawancara menghasilkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang membutuhkan penggalian informasi lebih mendalam maka dibutuhkan wawancara mendalam (*in-depth*) yang ditujukan langsung kepada informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*). Bentuk dari pedoman wawancara adalah pedoman wawancara tidak berstruktur yang memuat garis besar dari pertanyaan penelitian sehingga diharapkan wawancara bisa lebih berkembang. Tujuan yang

diharapkan dari tehnik wawancara tidak berstruktur ini adalah agar bisa menggali dan memperoleh lebih dalam informasi tentang semua aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik wawancara yakni wawancara langsung, wawancara dengan menggunakan email, dan dengan pembicaraan via telepon.

Wawancara difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan konsep CSR oleh PT Inco. Sehingga informan yang dimintai informasinya adalah informan yang mewakili aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan konsep CSR tersebut yaitu dari pihak perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, yang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi. Analisis aktor ini akan dipadukan dengan analisis struktural mengingat keterkaitan antara aktor dan struktur sebagai sebuah dualitas (Giddens, 1995; Bourdieu, 1990).

3. Pengamatan (observasi)

Menurut Patton (2002: 262). Tujuan dilakukannya observasi langsung adalah untuk menggambarkan situasi subyek yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam situasi tersebut, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan maknanya menurut perspektif mereka yang diobservasi. Dengan observasi langsung peneliti dapat menangkap dan memahami konteks program dan berbagai interaksi yang terjadi di dalamnya. Pemahaman tentang konteks sangat penting untuk memperoleh perspektif yang menyeluruh.

1.5.6. Prosedur Analisis Data

Berdasarkan tehnik pengumpulan data di atas, maka setelah mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, baik data yang diperoleh dari dokumen/arsip, literatur perpustakaan, pengamatan langsung maupun wawancara. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Moleong (2000 : 280) analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun tahapan analisa data dalam penelitian ini mengikuti proses analisa data sebagaimana yang dikemukakan oleh Irawan, (2006 : 89), yaitu :

1. Pengumpulan data mentah. Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, kajian dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan pencatatan dengan apa adanya di lapangan, dan rekaman.
2. Transkrip data. Yaitu tahapan memindahkan data-data rekaman atau hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis (narasi). Transkrip data ini harus ditulis apa adanya.
3. Pembuatan koding. Pada tahap ini penulis membaca ulang secara hati-hati dan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu, penulis akan berupaya menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian diambil kata kuncinya, dimana kata kunci itu akan diberi kode.
4. Kategori data. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan "kategori".
5. Kesimpulan sementara. Pada tahap ini peneliti telah menyimpulkan sementara hasil yang ada berdasarkan data.
6. Triangulasi. Untuk mengecek kebenaran (*truthworthiness*), mengurangi bias dan kesalahan data perlu menggunakan "teknik triangulasi" atau pemeriksaan silang check & recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 6 (enam) bab yang disusun secara sistematis dengan mengikuti kaidah umum dalam format penulisan ilmiah sehingga pembaca diharapkan dapat dengan mudah memahami tesis ini. Pada Bab 1. Memuat tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan metode penelitian

Pada bagian selanjutnya , di bab 2 memuat tentang gugus teori yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan CSR dan manfaat CSR. Pada bab ini memaparkan tentang landasan hukum CSR di Indonesia, model dan cakupan CSR, hubungan Negara, dunia bisnis dan masyarakat, motif kedemawanan perusahaan dan produk kebijakan sosial, sampai pada kerangka konseptual.

Pada bab 3 memuat tentang gambaran umum lokasi Penelitian yang mencakup profil Kabupaten Luwu Timur, Profil PT. Inco dan gambaran umum pelaksanaan CSR PT. Inco, baik pada fase sebelum tahun 2004 dan fase setelah tahun 2004.

Bab 4 memaparkan hasil eksploratif tentang pelaksanaan CSR PT. Inco serta manfaat dari pelaksanaannya bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah operasi pertambangan PT. Inco dan manfaat bagi perusahaan sendiri.

Bab 5 merupakan analisis dimana hasil temuan lapangan diinterpretasikan dengan untuk selanjutnya dikaitkan dengan gugus teori yang digunakan pada bab sebelumnya.

Bagian terakhir yakni bab 6 merupakan bagian yang memuat tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari peneliti berkaitan dengan pelaksanaan CSR di PT. Inco untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

BAB 2

CSR DAN MANFAAT CSR

Dewasa ini para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktek bisnis yang bertanggungjawab. Dari hasil survey *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) terhadap 750 *Chief Executive Officer* menunjukkan bahwa peningkatan tekanan untuk menerapkan CSR menempati ranking kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling penting di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan Hope, 2004).

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan hanya setahun sekali telah merasa melaksanakan CSR, tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan "*copy-paste design*" atau sekedar menghabiskan anggaran, karenanya aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih, sehingga niat untuk memberdayakan masyarakat, CSR akhirnya menjadi Candu (menimbulkan ketergantungan kepada masyarakat), Sandera (menjadi alat bagi masyarakat untuk memeras perusahaan) dan Racun (merusak perusahaan dan masyarakat), (Suharto, 2008).

2.1. Perkembangan CSR

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington yang mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development* yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *The World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report* (1987). Elkington mengemas CSR dalam tiga focus, yakni *Profit*, *Planet* dan *People*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008).

Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena *deaf* (tuli/tidak mendengar) di dunia industri. *Deaf* adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2007 : 103 - 4).

- Dehumanisasi industri. Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Merger dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.
- Emansipasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh dampak aktifitas perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
- Aquariumisasi dunia industri. Perusahaan yang hanya memburu keuntungan ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan *filantropi* tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.
- Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (*child care*) atau pusat-pusat kegiatan olahraga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.

Menurut Thomas Silk (dalam Witoelar, 1995:5), filantropi dapat diartikan sebagai keikhlasan menolong dan memberi sebagian harta, tenaga maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Aktivitas ini dilakukan dengan tanpa memikirkan atau memperhitungkan kepentingan maupun keuntungan diri sendiri. Karenanya, dalam melaksanakan filantropi, seseorang atau suatu pihak tidak hanya sekedar memberi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Tetapi yang lebih penting lagi pemberian tersebut harus memperdulikan siapa, untuk apa, dan apa dampaknya agar benar-benar membawa manfaat bagi yang menerima. Untuk itu digunakan konsep filantropi sosial yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan program sosial yang dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat.

Menurut catatan Mauss (1992), tradisi bersedekah telah muncul di masyarakat kuno. Masyarakat Hausa di Tripolitania, misalnya, mempunyai tradisi memberi hadiah gandum kepada orang-orang miskin jika terjangkit suatu penyakit. Mereka juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberian kepada anak-anak dan orang miskin membuat mereka yang sudah mati merasa bahagia. Dari sinilah menurut Mauss, asal mula teori filantropi itu berasal.

Dalam konteks beroperasinya perusahaan, Stainer memberikan definisi tentang filantropi perusahaan yakni pemberian sejumlah uang, waktu, produk atau jasa untuk membantu kebutuhan atau mendukung bekerjanya lembaga-lembaga menuju kesejahteraan manusia yang lebih baik (Stainer, 1994). Sejarah filantropi perusahaan dimulai pada masa kolonialisme Amerika, berawal dari gagasan dari para pelaku bisnis yang tercerahkan untuk memberikan berbagai kontribusi karikatif kepada masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, pemberian ini tumbuh lebih terorganisir dan berkelanjutan di mana respon sosial perusahaan kemudian dilembagakan melalui program-program filantropik.

Pertanyaan mengenai mengapa CSR penting, tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa CSR telah diamanatkan UU. Jika CSR dianggap penting hanya karena Undang-Undang, perusahaan akan cenderung terpaksa dan setengah hati melaksanakan CSR. Harus ada pemahaman filosofis dan komitmen etis tentang CSR (Saidi, 2004).

Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian *genuine* dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan (Suharto, 2006).

Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih di Indonesia yang menganut *residual welfare state*, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak-anak, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Akibatnya, sebagian besar dari mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai (Saidi, 2004).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktifitas sosial perusahaan. Meskipun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual kegiatannya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt” sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga Pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (*for better of worse*), bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders*, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan (Suharto, 2008)

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif

berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).

2.2. Landasan Hukum CSR di Indonesia

CSR di Indonesia semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Perseroan terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2,3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah atau aturan pemerintah dibawah Undang-Undang, yang hingga kini sepanjang pengetahuan penulis baru terdapat satu, yakni Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap Badan Usaha atau Usaha Perseorangan yang mengabaikan CSR (pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan dalam negeri.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya Permen Negara

BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 % yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha yang memiliki aset bersih minimal Rp. 200 juta atau memiliki omset maksimal Rp 1 milyar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007). Namun demikian Undang-Undang inipun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR.

Meskipun CSR telah diatur oleh Undang-Undang debat mengenai CSR menyangkut aspek kewajiban perusahaan masih terus berkembang. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu tim investasi karena program CSR merupakan beban biaya bagi perusahaan. Ditengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan di samping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis. Definisi dan singkatan CSR, terutama terkait huruf "R" (*Responsibility*) dalam bahasa Inggris berasal dari kata *response* (tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu) dan *ability* (kemampuan). Sehingga *responsibility* merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena respon yang dilakukan sesuai dengan *ability* perusahaan yang bersangkutan. Menurut pandangan ini jika CSR bersifat wajib maka singkatannya harus dirubah menjadi CSO (*Corporate Social Obligation*).

Kalangan yang kontra Undang-Undang CSR berpendapat bahwa *core business* perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, ketika perusahaan diwajibkan memperhatikan masalah lingkungan dan sosial sama artinya dengan mendesak *Greenpeace* dan *Save The Children* untuk berubah menjadi korporasi yang mencari keuntungan ekonomi. Kelompok yang setuju dengan UU CSR umumnya berargumen bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan *Brand Differentiation* perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh *license to operate*, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga berfungsi sebagai *risk management* perusahaan (Suharto 2007).

2.3. Model dan Cakupan CSR

CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* atau *public relations*. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk secara terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggungjawab ke CEO atau ke dewan direksi. (Suharto, 2008).

Sebagian besar perusahaan Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR (Suharto, 2007).

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi *charity* dan kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial* dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekedar *do good* dan *to look good* (berbuat baik agar terlihat baik). Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori perusahaan impresif yang lebih mementingkan tebar pesona (promosi) ketimbang tebar karya (pemberdayaan) (Suharto, 2008).

Dewasa ini, semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan *charity* semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *community development* kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* selanjutnya menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

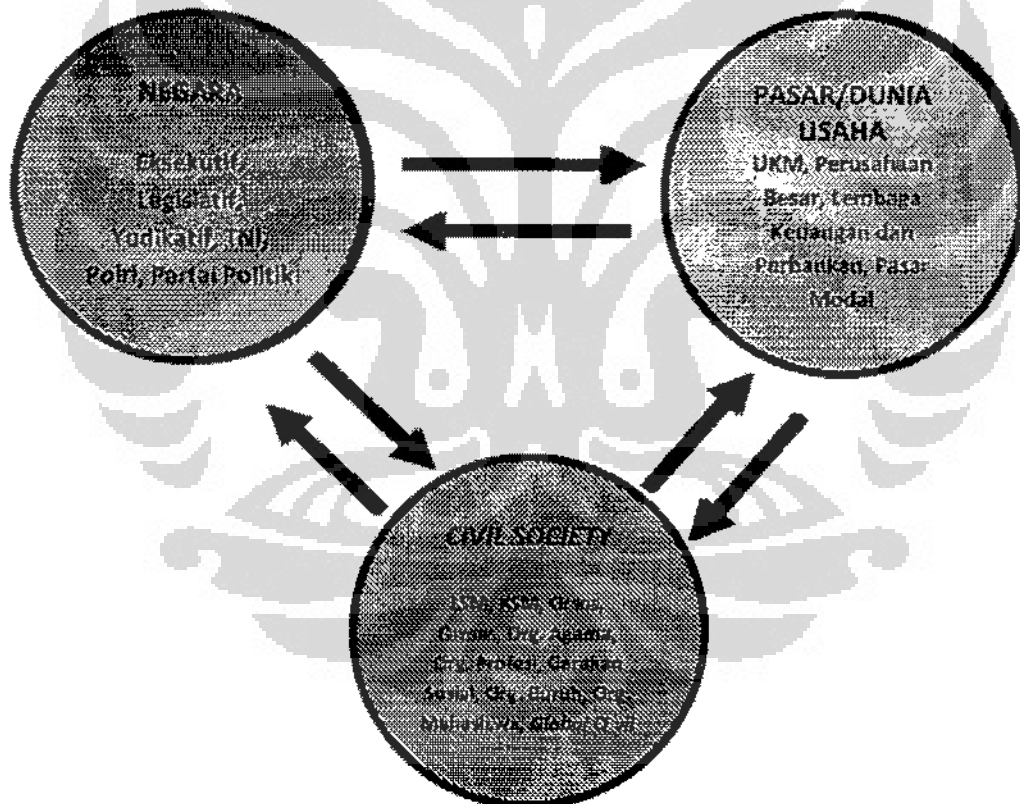
Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini

tidak sekedar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Suharto, 2008).

2.4. Pendekatan Teoritis Konsep CSR

2.4.1. Hubungan Negara, Dunia Bisnis dan Masyarakat

Dalam perspektif negara modern terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun relasi di antara ketiga pihak tersebut baik yang bersifat dua pihak (*dual relation*) maupun tiga pihak sekaligus (*triple relation*) sulit dihindari. Hubungan ketiga pihak tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Hubungan Negara, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil (Model Analisis Tiga Sektor)

Sumber : Diadaptasi dari Ismid Hadad dalam Fajar Nursahid, 2006

Menurut model ini, negara melalui aparatnya memberikan jaminan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, hukum atau keadilan, perlindungan, serta menciptakan iklim dan lingkungan kondusif yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat sipil dan dunia usaha untuk berkembang sesuai fungsinya dalam kerangka konstitusional. Pasar atau dunia usaha (perusahaan), memberikan akses pendapatan, keuntungan, dan kekayaan kepada negara dalam bentuk pajak dan retribusi; dan kepada masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja. Dengan demikian keberadaan pasar dan dunia usaha adalah memberikan modal uang (*financial capital*). Sementara masyarakat sipil memberikan modal sosial (*social capital*) antara lain mengembangkan sikap saling percaya, solidaritas sosial, toleransi dan kerja sama. Selain itu, organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil dapat membantu individu sebagai warga negara untuk mendapatkan kebutuhan atau aspirasi yang tidak dapat dipenuhi baik oleh negara maupun pasar (Ibrahim, 2002)

Pandangan yang mencerminkan hubungan integratif antara negara dan dunia usaha dalam melihat berbagai persoalan masyarakat dijelaskan oleh teori sistem kesejahteraan (*welfare system*). Teori ini berpandangan bahwa negara dan bisnis berusaha bersama-sama mengentaskan kemiskinan karena kemiskinan dipandang sebagai bagian dari ketidakberuntungan masyarakat. Bukan hanya kepada masyarakat, peran penting negara juga dilakukan melalui dukungannya terhadap keberadaan dunia bisnis melalui pelayanan dan subsidi yang diperlukan (wilson, 1990:182-183).

Sebagaimana tampak pada bagan analisa tiga sektor di atas, bisnis atau dunia usaha merupakan sektor tersendiri yang terpisah dari kedua sektor lain, yakni negara dan masyarakat. Sektor bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, mempunyai kekuasaan yang melintasi batas-batas negara sehingga dunia bisnis mempunyai pengaruh yang tidak kecil baik terhadap negara maupun masyarakat.

Namun demikian, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat tersebut bersifat paradoksal. Di satu sisi dunia bisnis mengantarkan manusia pada berbagai kemudahan seperti kemajuan telekomunikasi, transportasi dan komputerisasi; di sisi lain kemajuan ini juga mengakibatkan berbagai krisis antara lain semakin

langkanya bahan bakar minyak, polusi, pemanasan global, melonjaknya angka kematian, wabah, penyakit yang tak disembuhkan, perubahan iklim dan rusaknya lahan-lahan pertanian (Giddens, 1999 dalam Nugroho, 2003).

Oleh karena itu, meminjam istilah Nugroho, penting dilakukan upaya demokratisasi kekuasaan bisnis agar praktek bisnis yang berkembang pesat dewasa ini dapat lebih arif dan terhindar sebagai penimbul berbagai dampak yang tidak menguntungkan tersebut. Upaya demokratisasi kekuasaan bisnis dapat dilakukan melalui kontrol masyarakat terhadap perusahaan yang pada hakekatnya mempunyai dimensi kekuasaan. Dengan demikian, upaya demokratisasi kekuasaan bisnis mengandaikan andil masyarakat yang besar, atau setidaknya masyarakat menjadi *stakeholder* yang diperhatikan dalam menentukan kebijakan-kebijakan sosial perusahaan.

Menurut Miller (2001), perusahaan bisnis harus memiliki tujuan mulia (*noble purpose*), dan tujuan ini harus dinyatakan secara jelas oleh manajemen perusahaan. Memang benar tujuan bisnis adalah untuk menciptakan keuntungan dan kesejahteraan, tetapi bukan untuk segelintir orang. Kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan bukanlah sekedar uang, melainkan dapat pula berupa pelayanan. Termasuk di dalamnya upaya pengentasan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan wabah penyakit. Untuk itu, dunia bisnis dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menunjang pencapaian tujuan mulia tersebut dan mengkomunikasikannya kepada seluruh tingkatan manager dan pekerja perusahaan. Misi ini, tegas Miller, merupakan prioritas pertama dari kepemimpinan bisnis era sekarang ini

Hal senada disampaikan Drucker (1974) dalam Miller (2001) bahwa dalam dunia di mana kita tersekat-sekat oleh politik dan obsesi nasionalisme, manajemen bisnis merupakan salah satu dari sedikit institusi yang kapabel mengatasi sekat-sekat antar negara tersebut. Hal ini mencerminkan besarnya harapan terhadap dunia bisnis dewasa ini agar lebih dapat berperan secara sosial diluar mandatnya sebagai institusi bisnis yang bertujuan untuk mencari laba.

Kalangan dunia bisnis dewasa ini juga berkembang upaya penciptaan iklim usaha berdasarkan dimensi tata – kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimana di dalamnya tercakup dua dimensi yang menonjol,

yakni transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan wacana ini, *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* berhasil menyusun indeks persepsi mengenai Tata – kelola Korporasi (*Corporate Governance Perception Index*) yang salah satu variabel pokoknya mengatur tentang hubungan perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam indeks ini disebutkan bahwa perlakuan terhadap stakeholder merupakan wujud interaksi organ korporasi dalam rangka menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui berbagai program, seperti tanggung jawab sosial dan pengembangan komunitas sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat. Indikatornya adalah sejauhmana suatu perusahaan memiliki dan melaksanakan program pengendalian aspek dan dampak penting lingkungan hidup di mana perusahaan itu beroperasi (G. Suprayitno, et.al. 2004).

2.4.2. Motif Kedermawanan Perusahaan dan Produk Kebijakan Sosial

Menurut Stainer (1994), terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memiliki program-program filantropik, yakni *pertama*, untuk mempraktikkan konsep *good corporate citizenship*; *Kedua*, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup; *ketiga*, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdidik. Kedermawanan sosial perusahaan biasanya didasari dua motif sekaligus, yakni motivasi untuk menyenangkan atau membahagiakan orang lain (*altruisme*) pada satu sisi, dan pada saat yang sama terjadi pula bias kepentingan perusahaan disisi lain. Meski demikian, Stainer menganjurkan kita untuk percaya bahwa para pengambil keputusan perusahaan memandang kedermawanan sosial sebagai pencerahan atas kepentingan perusahaan (*self interest*).

Self interest merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam praktek kedermawanan sosial perusahaan. Sering kali motif perusahaan dalam menyumbang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan tanggung jawab sosial. Tipologi perusahaan dalam memberikan kedermawanan sosial dapat dibedakan dalam lima kategori, yakni *charity* (amal), *image building* (pencitraan atau promosi), *facility* (insentif pajak), *security prosperity* (ketahanan hidup atau peningkatan kesejahteraan), dan *money laundering* (manipulas) (Saidi, 2006 : 21).

Setiap institusi, baik itu institusi politik, sosial ataupun bisnis tidak pernah lepas dari konsep kebijakan sosial (*social policy*) dimana setiap institusi tersebut

mengambil sikap terhadap sesuatu hal. *Policy* merupakan konsep yang dinamis yang harus diimplementasikan, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan.

Menurut Blakemore (1998), *social policy* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, meskipun tujuan ini sulit dan mungkin sering kali gagal dilakukan. Selain itu, kebijakan sosial juga dimaksudkan untuk mempertemukan berbagai kebutuhan manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketahanan sosial. Prinsip-prinsip kebijakan sosial dalam pendekatan kesejahteraan sosial, dimana kebijakan sosial harus didasarkan pada prinsip kesetaraan (*equality*), kebutuhan (*need*), dan kebebasan (*freedom*).

Prinsip-prinsip dasar dalam perumusan suatu kebijakan sosial ini penting karena terkait erat dengan kebijakan perusahaan dalam mengalokasikan sebagian keuntungannya melalui berbagai aktivitas derma. Praktik kedermawanan sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan tak lepas dari konteks dan filosofi kebijakan sosial ini, yakni bagaimana kedermawanan sebagai sebuah produk kebijakan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, baik dalam lingkungan perusahaan itu sendiri maupun untuk masyarakat luas. Meskipun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut masih sekedar sikap etis yang belum berwujud aturan (*rules*), dan belum dibakukan dalam sebuah kebijakan formal perusahaan.

2.4.3. Transformasi Kedermawanan

Praktik filantropi telah sangat berkembang dan modern dengan cirinya yang berkelanjutan dan mengekalkan diri. Perkembangan ini memunculkan dimensi lain dari filantropi menyangkut hubungan negara dengan masyarakat. Di satu sisi, tradisi berderma hidup subur di masyarakat sebagai tradisi yang bebas daripengaruh negara, tetapi di sisi lain kegiatan derma sosial dalam jumlah yang besar tak lepas dari kemungkinan penyelewengan, sehingga diperlukan standar mengenai etika, bahkan aturan baku dan hukum yang jelas.

Selain pengembangan kerangka hukum, transformasi juga menjadi upaya penting dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan. Hal ini disadari bahwa sebagian besar donasi perusahaan berbentuk hibah sosial, dan masih sedikit yang berbentuk hibah pembangunan (PIRAC dalam Saidi : 2003). Hibah

sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, sedekah atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima, sedangkan hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan (Velasco, 1996).

Transformasi terhadap orientasi sumbangan perusahaan ini perlu dilakukan karena hibah sosial umumnya adalah hibah yang diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan sesaat dan sifatnya konsumtif. Oleh karena itu perlu didorong kegiatan kedermawanan dari aktivitas yang bersifat sedekah menuju kepada pengembangan dan akhirnya pemberdayaan, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Karakteristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan

Tahapan	Charity	Philanthropy	Corporate citizenship
Motivasi	Agama, tradisi, adat	Norma, Etika, hukum universal; redistribusi kekayaan	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan keterlibatan sosial
Misi	Mengatasi masalah sesaat	Mencari dan mengatasi masalah	Memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek, menyelesaikan masalah sesaat	Terencana, terorganisir, terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/Dana abadi, profesional	Keterlibatan baik dana maupun sumberdaya lain
Penerima Manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah (sosial maupun pembangunan) dan keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban	Kemanusiaan	Kepentingan bersama

Sumber : Zaim Saidi, 2004.

2.4.4. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbicara tentang etika dalam organisasi, Jones (2001) mengemukakan bahwa etika organisasi adalah nilai-nilai moral, keyakinan, dan aturan yang menentukan bagaimana para *stakeholder* organisasi memperlakukan satu sama lain dalam suatu lingkungan organisasi (Jones, 2001 : 140). Etika berkembang melalui negosiasi, kompromi, dan *bargaining* antar *stakeholders* organisasi sehingga muncul nilai-nilai, keyakinan maupun aturan yang dipahami dan dipraktekkan bersama dalam lingkungan organisasi.

Penerapan prinsip etik dalam dunia bisnis berkaitan erat dengan apa yang sekarang ini berkembang dan dikenal sebagai konsep CSR yakni tanggungjawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholders*-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dari aktifitas perusahaan. Perusahaan dapat mengadopsi konsep CSR ini dalam pengertian terbatas dan luas, meski pada umumnya pengertian dalam arti luas lebih dapat diterima.

Dalam pengertian terbatas, tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memahami konteks di sekitar aturan tersebut, karena perusahaan mungkin saja menginterpretasikan secara kreatif aturan-aturan hukum untuk kepentingan mereka, terutama ketika aturan tersebut tidak cukup spesifik mengatur apa yang legal dan yang tidak legal, atau perilaku apa yang diperbolehkan untuk mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu, menurut Friedman, salah seorang pengusung konsep terbatas ini, ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial bisnis yaitu menggunakan seluruh sumberdayanya untuk aktifitas yang mengabdikan pada akumulasi laba (Friedman, 2001 : 151).

Dalam pengertian luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi termasuk didalamnya organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian kendati tanpa aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik

atau paling sedikit merugikan *stakeholder*-nya. *The right action produces a greatest benefit for the most people*, artinya tindakan tepat yang dilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan prinsip moral dengan sendirinya akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini mengingat, *pertama*, pendiri dan pemilik perusahaan adalah individu bagian dari masyarakat, demikian pula eksekutif dan karyawannya. *Kedua*, tujuan perusahaan untuk memasukkan keuntungan tidak mungkin tercapai tanpa adaya masyarakat yang menjadi pasar bagi produknya (Wermasubun, 2003: 17). Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat pula diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat serta lingkungan hidupnya (Wermasubun, 2003). Dengan begitu, perusahaan berkewajiban menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat, bukan malah merugikan bagi para *stakeholder*-nya. *Stakeholder* mencerminkan keragaman kelompok, kepentingan dalam masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Setiap *stakeholder* berhak menuntut perusahaan beroperasi secara sosial dan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan. *Stakeholder* perusahaan meliputi : pemegang saham, karyawan/buruh, serikat pekerja, pembeli, pemasok, konsumen, masyarakat local, LSM/Ornop, dan pemerintah (Wermasubun, 2003 : 19). Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan oleh Carol dalam Teori Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan (Carrol, 1996 : 39).

Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat paling natural dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan (laba). Namun demikian, dalam mencapai tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Upaya melanggar hukum demi memperoleh laba

harus ditentang sehingga perusahaan tidak menggunakan atau menghalalkan segala cara.

Perusahaan juga harus bertanggung jawab secara etis. Ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etis. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat harus menjadi rujukan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Lebih dari itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab filantropis yang mensyaratkan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan operasi bisnis sebuah perusahaan.

Steiner (1994) mengemukakan tiga alasan penting mengapa kalangan bisnis merespon dan mengembangkan isu tanggungjawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Ketiga alasan tersebut adalah : *pertama*, perusahaan adalah makhluk masyarakat dan oleh karenanya harus merespon permintaan sosial. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama. Perusahaan menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan ekonomi, politik budaya dan teknologi yang memaksa. Secara instingtif, perusahaan akan melakukan aksi konformitas terhadap terjadinya perubahan-perubahan atas ekspektasi sosial tersebut (Steiner, 1994 : 116-117).

Kedua, kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Dalam jangka panjang, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upayanya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan.

Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan sampai kepada upaya mempengaruhi peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespon suatu tuntutan sosial (*social demands*), sama halnya mengurangi biaya perusahaan; karena diyakini

bahwa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara umum membuat biaya-biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.

Jeremy Moon dalam Tanaya (2004 : 89) mengelompokkan pendekatan CSR ke dalam tiga gelombang, yakni : keterlibatan komunitas, proses produksi yang bertanggung jawab sosial, dan hubungan pekerja yang bertanggung jawab sosial. Gelombang pertama, yakni keterlibatan komunitas, merupakan pendekatan tradisional di mana CSR dipisahkan dari aktivitas badan usaha dan berada di luarnya dalam bentuk filantropi, kemitraan, sponsor, dan aliansi strategis bersama pemerintah ataupun organisasi komunitas. Sementara gelombang kedua dan ketiga, merefleksikan perubahan paradigma di mana CSR merupakan refleksi bagaimana bisnis dijalankan dan menjadi bagian *inheren* di dalam kebijakan dan praktik bisnis suatu perusahaan. Proses produksi yang bertanggung jawab merujuk pada persoalan lingkungan hidup, HAM dan ketenagakerjaan. Sedangkan hubungan pekerja merujuk pada status pekerja sebagai *stakeholder* dalam konteks pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta praktik CSR itu sendiri.

Berdasarkan penelitian Chambers (2003), keterlibatan komunitas merupakan bentuk paling umum di antara dua gelombang lainnya. Selain itu Chambers juga berhasil memetakan sejumlah isu yang diangkat dalam program-program CSR di tujuh negara Asia (India, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore dan Thailand) sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Komposisi Isu-Isu CSR di Tujuh Negara Asia

No	Isu	Komposisi
1.	Community Involvement	
	• Umum	
	• Agrikultur, Pemberdayaan Ekonomi Lokal	5 %
	• Kesenian dan Kebudayaan	4 %
	• Pengembangan Masyarakat (CD)	4 %
	• Pendidikan dan Pelatihan	8 %
	• Lingkungan dan Konservasi	14 %
	• Kesehatan & Disability (Penyandang Cacat)	12 %
	• Perumahan	10 %
	• Religiusitas (dukungan organisasi keagamaan)	2 %
	• Olah Raga	
	• Kesejahteraan (Kemiskinan, Emergency)	3 %
	• Kepemudaan dan Anak-anak	6 %
	• Lain-lain	2 %
2.	Social Responsibility Products	
	• Lingkungan	
	• Kesehatan dan Keamanan	9 %
	• SDM	5 %
3.	Employee Relation	
	• Etika	3 %
	• Employee Engagement	1 %
		7 %
		2 %

Sumber : Diolah dari Chambers, dalam Nursahid (2003 : 18)

Berdasarkan tabel tersebut, isu-isu mengenai pendidikan dan pelatihan serta permasalahan lingkungan dan konservasi merupakan dua kelompok isu yang sering diangkat dalam CSR. Penelitian Chambers juga menunjukkan bahwa hanya 24% dari perusahaan di Indonesia yang memiliki laporan atas program CSR dalam website mereka dan sekaligus merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan enam negara Asia lainnya. Dari 24% tersebut di atas, hanya 18% yang memberikan laporan secara ekstensif dan 72,7% melaporkan secara minimal (hanya 1-2 halaman). Hal ini menunjukkan rendahnya implementasi CSR sampai pada pelaporannya kepada publik dalam kegiatan bisnis di Indonesia (Tanaya, 2004).

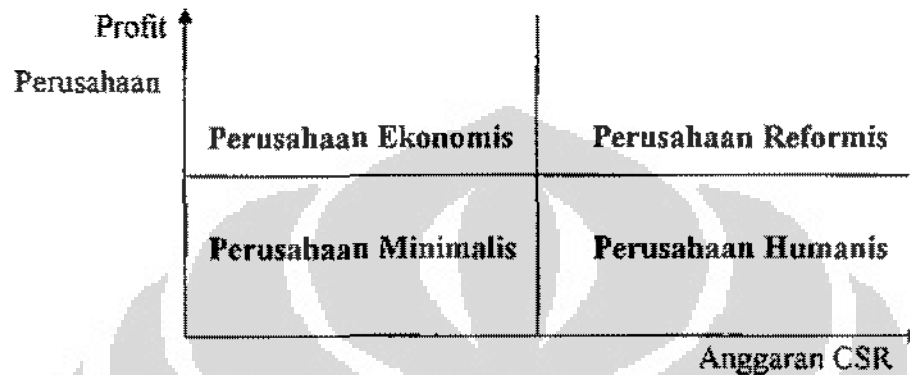
2.4.5. Tipologi Perusahaan dan CSR

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin serta *guideline* untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2008)

Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan menurut Suharto (2008) yakni :

- a. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR
 1. Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya termasuk dalam kategori ini.
 2. Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah. Perusahaan besar, namun pelit
 3. Perusahaan Humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, promosi anggaran CSR-nya relatif tinggi.
 4. Perusahaan Reformis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.
- b. Berdasarkan tujuan CSR; apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat
 5. Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan yang jelas. bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan. Sekedar melakukan kegiatan karikatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan
 6. Perusahaan Impresif. CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan "tebar pesona" ketimbang "tebar karya".
 7. Perusahaan agresif. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona.

8. **Perusahaan Progresif.** Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan juga sekaligus untuk pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan



Gambar 2.2. Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR

Sumber : Suharto (2008)



Gambar 2.3. Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR

Sumber : Suharto (2008)

2.4.6. Manfaat CSR Bagi Masyarakat dan Perusahaan

Pada prinsipnya antara perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan saling ketergantungan. Pola hubungan ini menurut Daniri (2008 : 7) memiliki dua bentuk. Pertama, *inside –out linkages*, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumberdaya manusia, pemasaran, penjualan, logistik dan aktivitas lainnya.

Kedua, *outside-in-linkages*, dimana kondisi sosial eksternal juga mempengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia seperti sumberdaya manusia, infrastruktur transportasi, peraturan dan insentif yang mengatur kompetensi seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi.

Lebih lanjut menurut Daniri (2008) agar pelaksanaan CSR menjadi lebih efektif, memerlukan peran masyarakat yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya, yakni :

- a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR melalui berbagai aktivitas *lobby* dan advokasi.
- b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR.
- c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR.

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan, yakni :

- *Brand differentiation.*

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR dapat memberikan citra perusahaan yang khas, baik, etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*.

- *Human resources.*

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Saat *interview*, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

- *License to operate.*

Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan izin atau restu bisnis, karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

- *Risk management.*

Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya *doing the right thing* berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.

CSR bukanlah strategi generik. CSR mungkin saja cocok pada kondisi tertentu tapi tidak pada kondisi lainnya. Karenanya menurut Vogel, argumen mengenai hubungan positif antara kinerja sosial dengan kinerja perusahaan harus dilihat secara lebih kontekstual (Jalal, 2006).

2.4.7. Pelaksanaan CSR

CSR yang baik memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar di antara ke empat prinsip tersebut. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat *shareholders-driven*, karena lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan. Sebagai contoh *fairness* bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; *transparency* menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan *accountability* diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan (Supomo, 2004).

Sementara itu prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders-driven*, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* perusahaan dapat mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku regulator. Perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu (Supomo, 2004).

CSR yang baik memadukan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya CSR tidak hanya fokus pada hasil yang dicapai, namun juga pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR (Suharto, 2008) :

1. *Engagement*. Pendekatan awal pada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga dapat berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.
2. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan berdasarkan *needs based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan dapat pula pada *rights based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).
3. *Plan of action*. Merumuskan dengan aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan (*shareholders*) di pihak lain.
4. *Action in facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal, namun dapat pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi, dan pendampingan, merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya.

2.5. Kerangka Konseptual

Ide mengenai CSR sebagai sebuah tanggungjawab sosial perusahaan kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang masih baru CSR masih tetap kontroversial, baik bagi kalangan pebisnis maupun akademisi (lihat Saidi dan Abidin, 2004). Kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person atau kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial. Perusahaan telah membayar pajak kepada negara dan karenanya tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan publik telah diambil alih oleh pemerintah

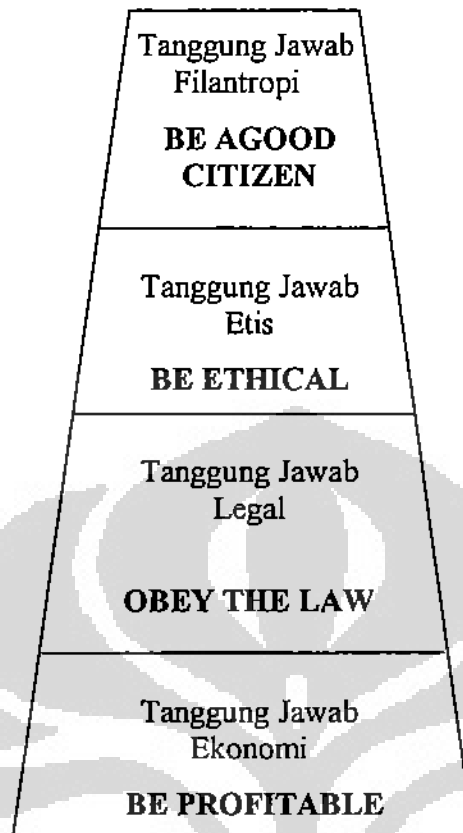
Kelompok lain yang mendukung pendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawan, sehingga mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaannya saja. Melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, alasannya

- Masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan direproduksi oleh perusahaan. Tanpa masyarakat perusahaan tidak akan berarti, bahkan juga tidak akan berfungsi. Tanpa dukungan dari masyarakat, perusahaan mustahil akan memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber produksi lainnya bagi perusahaan
- Meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara tidak berarti telah menghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan publik. Di negara yang kurang memperhatikan kebijakan sosial (*social policy*) atau kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang menjamin warganya dengan berbagai

pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, manfaat pajak seringkali tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

Konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol memberikan justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya (Saidi dan Abidin, 2004: 56-60 ; Elkington, 1998 ; Suharto, 2007). Dalam pandangan Carrol (1996), CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab *filantropis*. Lebih lanjut, bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
- b. Tanggung jawab Legal. Kata kuncinya adalah *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya adalah *be ethical*.
- d. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya adalah *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.



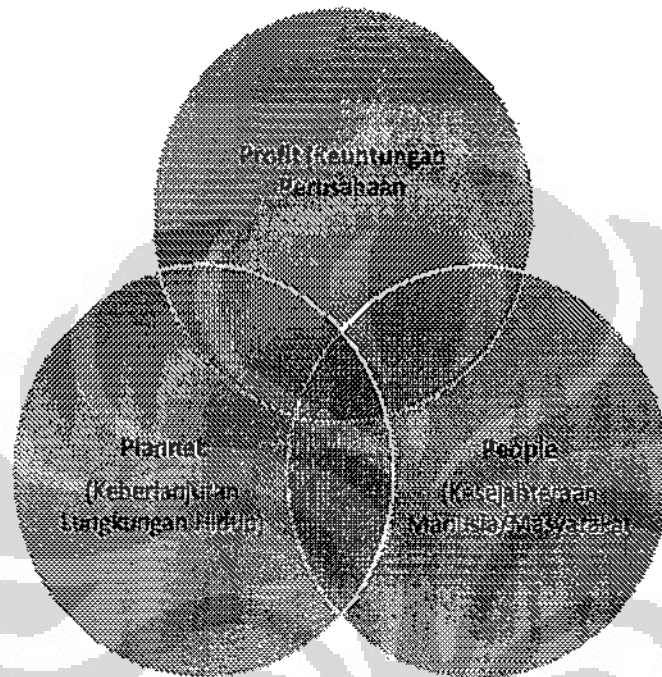
Gambar 2.4. Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sumber : Archie B. Carrol, (1996 : 39)

Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan oleh Archie B. Carrol harus difahami sebagai satu kesatuan. Sebab CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh 3 (tiga) prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yakni *profit*, *people* dan *planet*.

- Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang
- People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

- **Planet.** Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (*ekotourisem*)



Gambar 2.5. Triple Bottom Lines dalam CSR

Sumber : Archie B. Carrol, (1996)

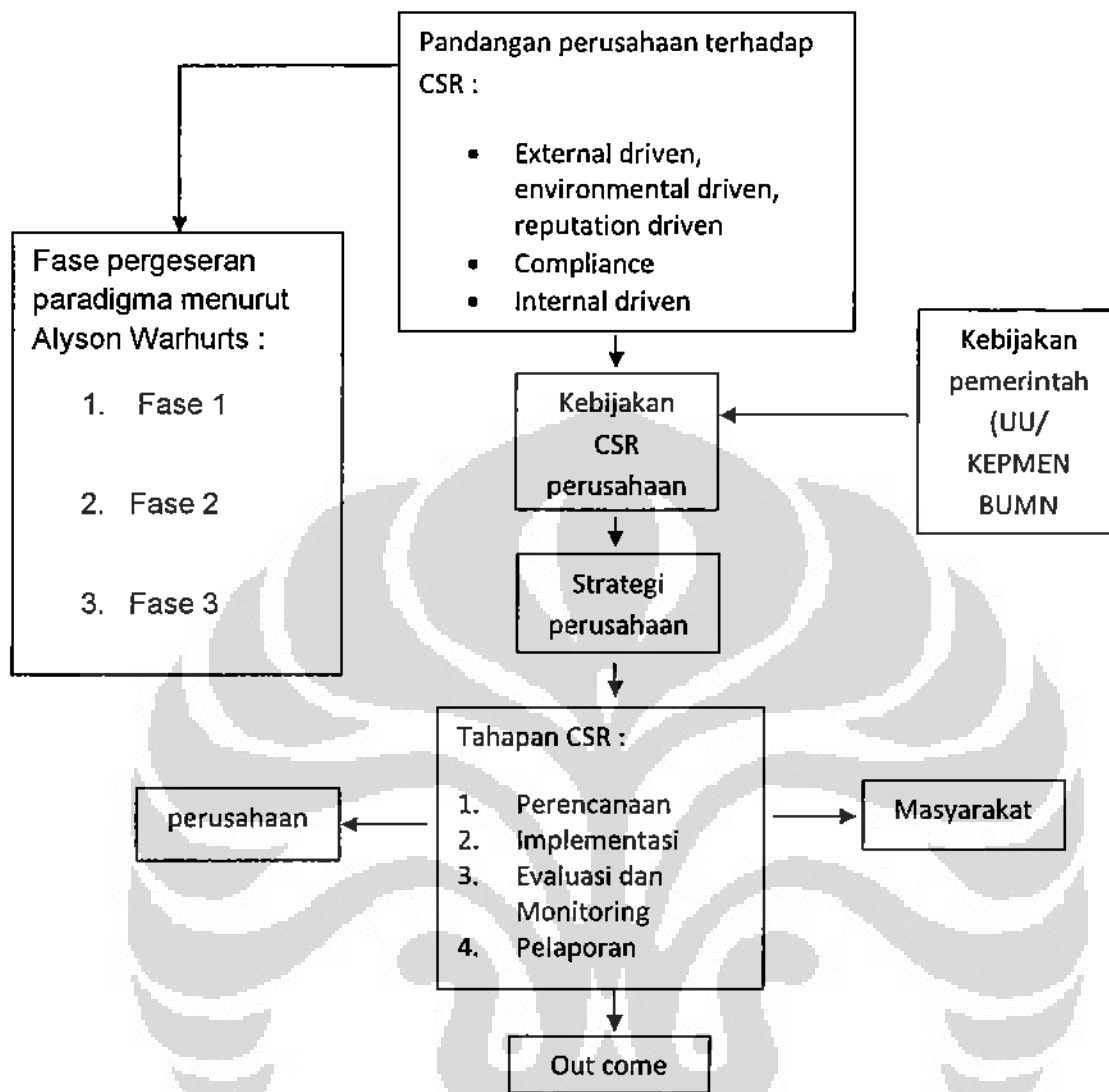
Sesuai dengan perkembangan pembangunan pada berbagai bidang, muncul sebuah konsep yang disebut sebagai CSR, dimana perusahaan mempunyai kewajiban terhadap tanggung jawab sosialnya. Sebagai pembuktian terhadap berbagai konsep CSR, maka perusahaan menerapkan tanggung jawab sosialnya melalui program-program pengembangan masyarakat. Sasaran dari program tersebut yakni komunitas lokal yang bertempat tinggal di daerah sekitar tempat berdirinya perusahaan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain hal tersebut, dalam memahami aplikasi konsep CSR oleh suatu perusahaan tentunya diperlukan beberapa hal untuk menunjukkan adanya wujud tanggung jawab social perusahaan secara nyata, sesuai dengan kebijakan yang telah resmi disepakati. Pandangan perusahaan terhadap CSR sangat dipengaruhi oleh bagaimana

perusahaan membuat kebijakan CSR-nya. Cara pandang perusahaan terhadap CSR dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yakni pertama, sekedar basa-basi atau keterpaksaan yang terdiri dari *external driven*, *environmental driven* dan *reputation driven*. Kategori yang kedua, sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) dan yang ketiga yaitu CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*).

Untuk mengetahui keberadaan perusahaan dalam suatu fase pada paradigma CSR, maka terdapat 3 (tiga) fase yang terkait dengan kebijakan CSR yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Fase tersebut yakni fase pertama timbulnya kesadaran terhadap masalah sosial (*post facto*), fase kedua yakni hubungan untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak negative, serta fase ketiga adalah hubungan untuk mencegah masalah dimasa datang.

Kebijakan yang tertera pada perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dapat pula mencakup strategi perusahaan dalam menjalankan CSR-nya, dimana dalam pelaksanaannya setiap perusahaan tentunya memiliki perencanaan dan standar tertentu agar hasil yang didapatkan dapat sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan perusahaan dalam merancang strategi dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan. Dari hasil yang didapatkan, maka program yang dilaksanakan oleh perusahaan juga harus memiliki manfaat, karena dari manfaat tersebut dapat dilihat sejauh mana perusahaan telah membangun citra positifnya. Sehingga manfaat tersebut selain dapat dirasakan oleh masyarakat, juga oleh pihak perusahaan. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat atas keberadaan perusahaan di sekitarnya dan memberikan dukungan serta memberikan opini positif bagi perusahaan.

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.6. Kerangka Konseptual

Sumber : Telah Diolah Kembali

BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PROFIL PT. INCO DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM CSR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Profil Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutan di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003. Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur terletak di antara 2 0 03' 00" - 3 0 00' 25" Lintang Selatan dan 119 0 28' 56" - 121 0 47' 27" Bujur Timur. Batas sebelah Utara dan sebelah Timur adalah Propinsi Sulawesi Tengah sedangkan batas sebelah Selatan adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat kabupaten ini adalah Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur, yang beribukota di Malili, mempunyai luas wilayah 6 944.88 km² atau meliputi sekitar 11.14 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi kabupaten ini dibagi menjadi 11 kecamatan yang sebelumnya 8 kecamatan. Terdapat 3 kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah antara lain Kecamatan Tomoni, Nuha dan Mangkutana.

Terdapat delapan sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km.

Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sungai Kalaena tercatat sebagai sungai terpanjang di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat tiga danau alami yang sangat indah. Ketiga danau tersebut adalah Danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²) dan Danau Towuti (585 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan Danau Mahalona dan Towuti terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2006 dari 8 stasiun pengamatan tercatat pada musim hujan antara bulan Januari hingga Juni curah hujan rata-rata diatas 150 mm. Pada musim kemarau rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu sebesar 55 mm. Pada bulan Desember saat memasuki musim hujan, rata-rata curah hujan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 330 mm.

3.1.2. Profil PT. INCO.

A. Sejarah Perusahaan

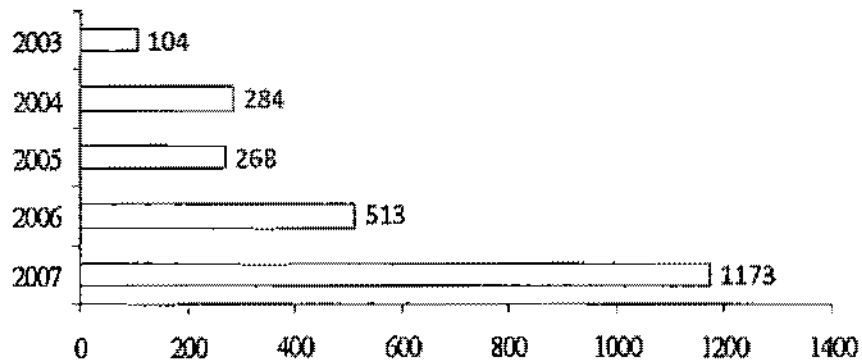
PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. Inco) merupakan salah satu produsen nikel terkemuka di dunia. Selama lebih dari tiga dasawarsa sejak penandatanganan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1968, telah menyediakan lapangan kerja terampil, mewujudkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di daerah operasinya, menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan memberi sumbangan positif terhadap ekonomi Indonesia.

PT. Inco menghasilkan nikel dalam matte, yaitu produk setengah jadi yang diolah dari bijih laterit di fasilitas pertambangan dan pengolahan terpadu dekat Sorowako, Sulawesi Selatan. Seluruh produksi PT Inco dijual dalam Dolar Amerika Serikat berdasarkan kontrak-kontrak jangka panjang untuk dimurnikan di Jepang. PT. Inco didirikan pada bulan Juli 1968 sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Vale Inco Limited. Kelebihan daya saing PT Inco terletak pada cadangan bijih besi berlimpah, tenaga kerja terampil dan terlatih, pembangkit listrik tenaga air berbiaya rendah, fasilitas produksi modern dan pasar terjamin untuk produknya.

PT INCO, menandatangani kontrak karya eksplorasi nikel pada 27 Juli tahun 1968 berdasarkan kontrak karya generasi II dan VI pada tahap operasional hingga saat ini, seluas 218.530 Ha, meliputi 118,387 Ha di wilayah Kabupaten Luwu Timur, 36,638 Ha di Provinsi Sulawesi Tengah dan 63,505 Ha termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan penambangan berada di sekitar Sorowako dan Danau Matano, yang berjarak sekitar 240 km dari Makassar ibukota propinsi Sulawesi Selatan. PT. Inco mulai berproduksi secara komersial pada bulan April 1978. Pada tanggal 15 Januari 1996, PT. Inco menandatangani perjanjian perubahan dan perpanjangan kontrak karya tahun 1968 dengan Pemerintah hingga tahun 2025. Sesuai dengan perjanjian perpanjangan tersebut, PT. Inco berhasil menuntaskan ekspansi berskala besar yang meningkatkan kapasitas rancang tahunan pengolahan menjadi 68.039 metrik ton (150 juta pon) nikel dalam matte dan menambah fasilitas baru pembangkit listrik tenaga air di Balambano, yang selesai pada tahun 1999. Pada tahun 2003, untuk pertama kalinya PT. Inco berhasil melampaui kapasitas rancang dengan produksi sebesar 70.216 metrik ton (154,8 juta pon). Sejak itu, PT. Inco secara konsisten memproduksi nikel dalam matte di atas kapasitas rancang.

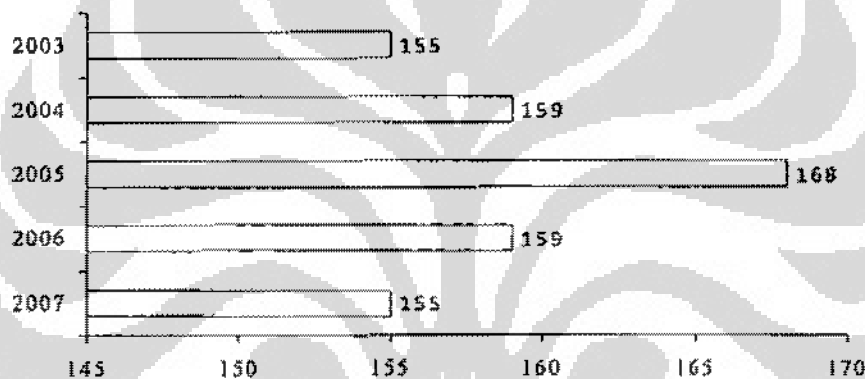
Per 31 Desember 2006, 60,8 persen saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dimiliki oleh CVRD Inco Limited dari Kanada, salah satu produsen nikel terkemuka di dunia. Pada tahun 2006, CVRD Inco Limited diakuisisi oleh Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) dari Brazilia. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (Sumitomo), perusahaan tambang dan peleburan penting di Jepang memiliki 20,1 persen. Selain itu, 19,1 persen saham PT. Inco dimiliki oleh publik dan pemegang saham lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) pada tahun 2004 menunjukkan bahwa kegiatan ekspor dan investasi PT. Inco pada tahun 2000 (tahun terakhir tersedianya informasi ini) memberikan kontribusi sebesar 0,36 persen dari produk domestik bruto Indonesia, 11,86 persen dari produk regional bruto Sulawesi Selatan, dan 77,97 persen dari produk regional bruto Luwu Timur.



Gambar 3.1. Laba Bersih Perusahaan 2003-2007

Sumber : Laporan Tahunan PT. Inco Tahun 2007



Gambar 3.2. Jumlah Hasil Produksi Perusahaan 2003-2007

Sumber : Laporan Tahunan PT. Inco Tahun 2007

Pada tahun 2007, PT. Inco mendapat kehormatan menerima sejumlah penghargaan yang mencerminkan komitmen PT. Inco terhadap kinerja yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat disekitar wilayah operasi PT. Inco. Penghargaan-penghargaan itu adalah:

- PT. Inco mendapatkan penghargaan dari Majalah Investor pada tahun 2007 sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik di antara 330 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Saham Indonesia, berdasarkan kinerja keuangan dan harga saham PT. Inco.
- Peringkat perusahaan-perusahaan terbaik pada tahun 2007 menurut majalah Finance Asia, menampilkan PT. Inco sebagai organisasi kedelapan dengan pengelolaan terbaik dan PT. Inco menempati posisi

kedua di antara perusahaan-perusahaan yang dinilai paling berkomitmen terhadap kebijakan deviden yang kuat.

- Majalah bisnis terkemuka Indonesia, Majalah SWA menempatkan PT. Inco sebagai salah satu dari 25 perusahaan dengan sistem teknologi informasi terbaik yang mendukung dan mendorong kegiatan usaha yang efektif.
- Penghargaan tahun 2007 dari Business Review mengakui PT. Inco sebagai perusahaan dengan kinerja saham terbaik dan kinerja keuangan terbaik.
- PT. Inco masuk dalam daftar 50 perusahaan Asia terbaik versi majalah Business Week dengan menempati urutan ke-17.
- Dewan juri untuk penghargaan laporan tahunan tahun 2006 menempatkan laporan tahunan PT. Inco tahun 2006 dalam deretan teratas kategori Emiten Perusahaan Swasta Non Keuangan.
- Dalam laporan hasil pengamatan tahun 2007 terhadap tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Asian Corporate Governance Association, PT. Inco menempati deretan teratas dari perusahaan-perusahaan yang dievaluasi.
- PT. Inco menerima penghargaan emas (Aditama) dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atas keberhasilan PT. Inco dalam melakukan reklamasi pasca penambangan, dan trofi emas sebagai perusahaan tambang terbaik di Indonesia dalam hal rehabilitasi lahan (dengan pemindahan material tambang sebesar lebih dari 10 juta metrik ton per tahun).

B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Inco adalah “Menjadi salah satu diantara produsen nikel utama terkemuka di dunia”. Misi PT. Inco adalah “Mengembangkan sumber daya Indonesia yang dipercayakan kepada kami sebaik-baiknya bagi manfaat semua pemangku kepentingan” (Laporan tahunan 2007). PT. Inco memenuhi komitmennya kepada penanam modal melalui pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang konsisten. Kepada karyawan dengan memastikan terwujudnya pekerjaan yang memenuhi unsur-unsur keselamatan, kesehatan, dan kepuasan

kerja. Komitmen PT. Inco kepada pelanggan dengan memenuhi kewajiban untuk mengirimkan produk yang berkualitas dengan tepat waktu dan kepada negara dengan menjadi warga perusahaan yang bertanggung jawab, memenuhi komitmen kontrak karya serta memenuhi tanggung jawab PT. Inco terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

PT. Inco memiliki komitmen yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam bingkai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility - CSR*). Salah satu wujud CSR PT. Inco adalah program pemberdayaan masyarakat (*community development*) dengan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area produksi PT. Inco.

Realisasi program pengembangan masyarakat PT. Inco sejalan dengan visi “Tumbuh berkembang bersama masyarakat yang mandiri untuk mendukung kegiatan operasi PT. Inco melalui pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan”. Sejalan pula dengan misi untuk “Memfasilitasi transformasi sosial dalam meningkatkan hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan melalui asistensi teknis, tukar informasi, dan diskusi publik, peningkatan kapasitas, serta penerapan hasil-hasil penelitian secara berkelanjutan” (Laporan Tahunan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco : 2007) .

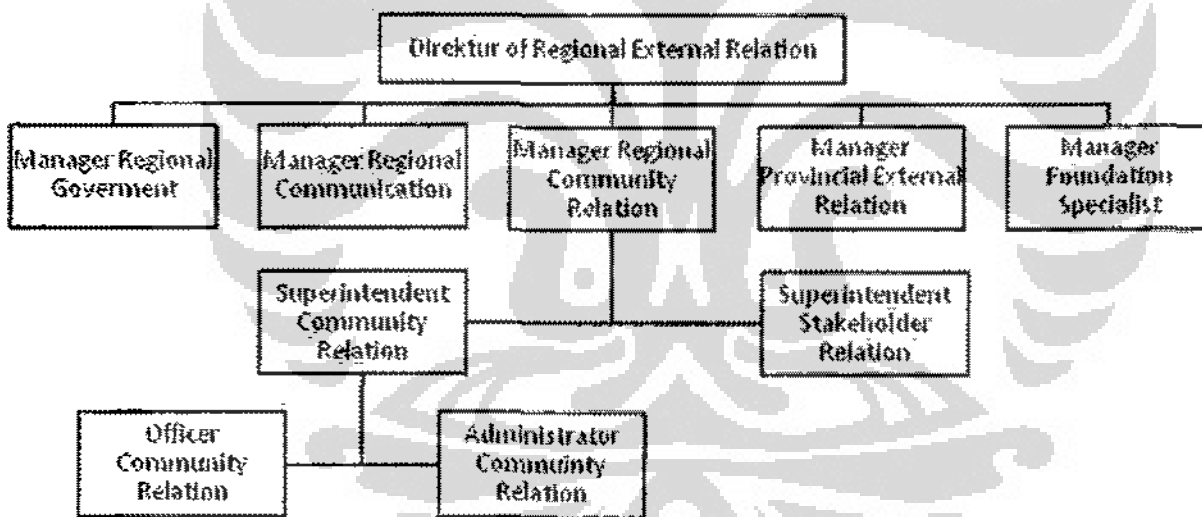
C. Struktur Organisasi *Community Development* PT. Inco

PT. Inco memiliki bagian khusus yang menangani program-program pengembangan masyarakat (*community development*) di sekitar wilayah operasinya. Bagian khusus itu adalah *community relations* yang berada di dalam *External Relations Department*. Bagian ini yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting mengenai program pengembangan masyarakat PT. Inco yang meliputi desain perencanaan, implementasi, hingga pada proses monitoring dan evaluasi program pengembangan masyarakat.

Salah satu daya saing PT. Inco sebagai perusahaan nikel terkemuka di dunia adalah PT. Inco memiliki karyawan yang terampil dan terlatih. Pada bagian manajerial (manajer dan superintendent) *Community Relations Department*, karyawan PT. Inco mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang pengembangan masyarakat. Sedangkan, karyawan (*officer*) PT. Inco yang menangani program pengembangan masyarakat PT. Inco

merupakan para *champion* lokal dengan latar belakang aktivis sosial dan lingkungan. Sampai dengan saat ini, kinerja para officer termasuk baik, akan tetapi di masa depan dengan melihat luasnya daerah pemberdayaan dan banyaknya program pengembangan masyarakat PT. Inco maka penambahan jumlah karyawan yang menangani program menjadi kebutuhan yang mendesak dari perusahaan.

Sebagai perwujudan komitmen PT. Inco terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi, pada tahun 2007 PT. Inco mengkaji kemungkinan untuk mendirikan yayasan untuk mewujudkan kebijakan PT. Inco berkenaan dengan tanggung jawab sosial. Yayasan ini akan dikelola oleh gabungan dari manajemen PT. Inco, perwakilan pemerintah daerah, dan para pakar penasehat. Pada saat penelitian ini berlangsung, rencana pendirian yayasan ini masih dalam tahap pembahasan antara manajemen PT. Inco dengan pihak-pihak yang terkait.



Gambar 3.3. Struktur Organisasi External Relation Department PT. INCO

Sumber : Laporan Tahunan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco (2007)

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan CSR PT. Inco

3.2.1. Fase Sebelum Tahun 2004

PT. Inco menempatkan Community Development (Comdev) sebagai strategi utama dalam pelaksanaan CSR-nya. Hal pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan merekrut tenaga-tenaga comdev yang profesional dari kalangan NGO, mantan aktivis mahasiswa yang berasal dari daerah Luwu Timur serta tokoh masyarakat daerah sekitar yang memiliki kecakapan dalam pengorganisasian dan resolusi konflik, yang selanjutnya ditempatkan sebagai tenaga lapangan di departemen Community Relation. Perekrutan tenaga-tenaga pendamping lapangan ini sangat efektif bagi pihak perusahaan dalam melaksanakan program comdevnya mengingat banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan keinginan atau tuntutan masyarakat terhadap perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan comdevnya berbasis program.

Rumusan Visi PT. Inco yakni, "Menjadi salah satu di antara produsen nikel utama terkemuka di dunia". Dengan Misi "Mengembangkan sumberdaya Indonesia yang dipercayakan kepada kami sebaik-baiknya bagi manfaat semua pemangku kepentingan" (Laporan CSR PT. INCO Tahun 2006).

Secara tegas dalam laporan tahunan CSR PT. Inco, 2005 menyatakan pengertian atau batasan CSR sebagai berikut adalah komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghargai kepentingan para pemangku yaitu investor, pelanggan, karyawan, rekan bisnis, penduduk setempat, lingkungan dan masyarakat umum" (Laporan CSR PT. INCO, 2005).

Berdasarkan laporan program pengembangan masyarakat PT. Inco tahun 2004, dapat ditelusuri lebih lanjut beberapa alasan upaya PT. Inco mengadaptasi konsep CSR. "Pertama, terjadinya perubahan politik nasional yang cukup signifikan menyangkut relasi pusat dan daerah, yang ditandai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan pemerintah ke tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, munculnya semangat berdemokrasi yang cenderung kebablasan. Gejala ini telah menjalar sampai ke akar rumput, sehingga berpeluang menciptakan praktek-praktek berdemokrasi yang cenderung melakukan anarkisme lokal. Ketiga, munculnya kesadaran politik masyarakat

untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan public di aras lokal. Keempat, munculnya kesadaran internal perusahaan untuk merancang program-program pemberdayaan masyarakat jangka panjang (multi years) dengan sistem pengelolaan berkelanjutan (sustainable)"(Laporan Comdev PT. INCO, 2004).

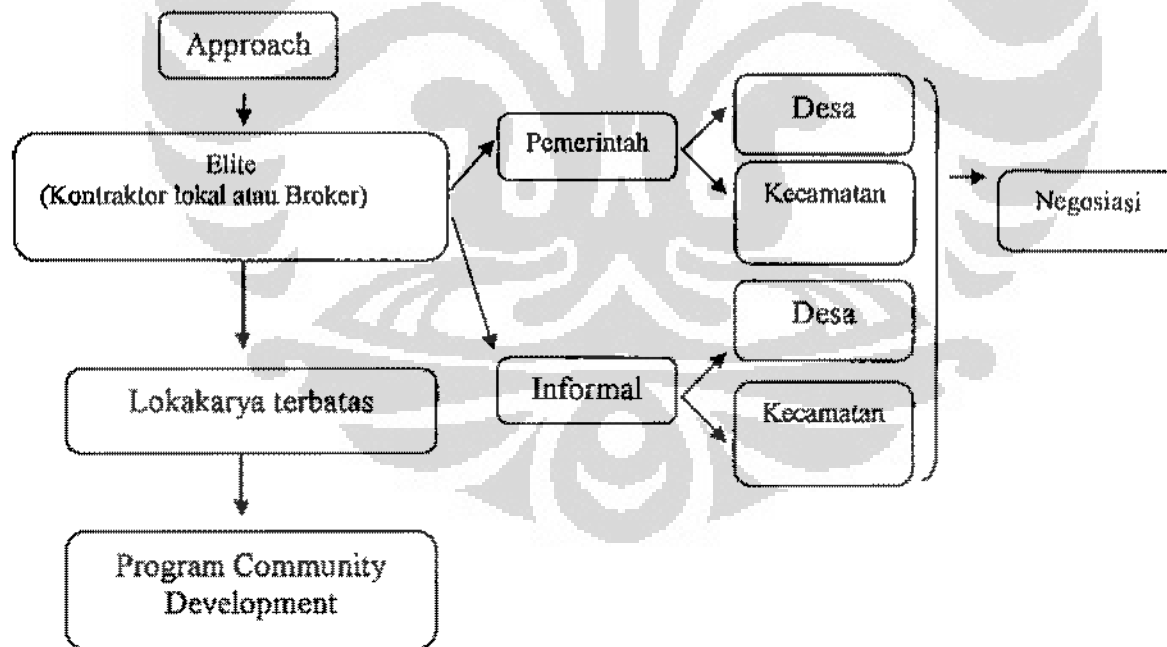
Mencermati keempat alasan yang disebutkan, PT. Inco mengadaptasi konsep CSR dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan strategis jangka panjang yang ingin dicapai dari program pemberdayaan masyarakat PT. Inco dalam rumusan visi-misi pemberdayaan masyarakat PT. Inco sebagaimana termaktub dalam laporan tahunan community development PT. Inco 2004, dan laporan CSR PT. Inco tahun, 2005 dan 2006.

Visi pemberdayaan masyarakat PT Inco yaitu, "Tumbuh bersama masyarakat yang mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan". Dengan Misi "Memfasilitasi transformasi sosial dalam meningkatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan melalui asistensi teknis, tukar informasi dan diskusi publik, peningkatan kapasitas serta penerapan hasil-hasil penelitian secara berkelanjutan" (Laporan Tahunan Comdev PT INCO, 2004;2005;2006).

Sebelum tahun 2004 desain program pengembangan masyarakat PT. Inco menggunakan model perencanaan program *topdown* dimana usulan program berasal dari sebagian elit di masyarakat yang notabene merupakan para kontraktor lokal yang mencari peluang dari proyek-proyek pengembangan masyarakat PT. Inco. Dengan demikian usulan tersebut mengandung kepentingan elite yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas, dan sering kali para elit menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak perusahaan dengan mengatasnamakan rakyat. Pada fase ini perusahaan seringkali memberikan bantuan hanya berdasarkan desakan dan tekanan dari para elite-elite masyarakat yang memanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek dari pihak perusahaan. Bantuan dari perusahaan belum didasarkan atas kesadaran dari dalam perusahaan melainkan dari tekanan pihak luar. Berikut merupakan paradigma lama PT. Inco dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat di sekitar

wilayah operasinya (Sumber: Laporan Tahunan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco 2004):

- Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan dari atas ke bawah (topdown) dimana masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan atau peran.
- Program yang dilakukan seringkali tidak berhasil dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.
- Masyarakat seringkali diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dihadapi sehingga perlu dibantu, didorong, dan sebagainya. Asumsi ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya untuk dilibatkan dalam proses penentuan suatu program pengembangan.



Gambar 3.4. Paradigma Lama Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco

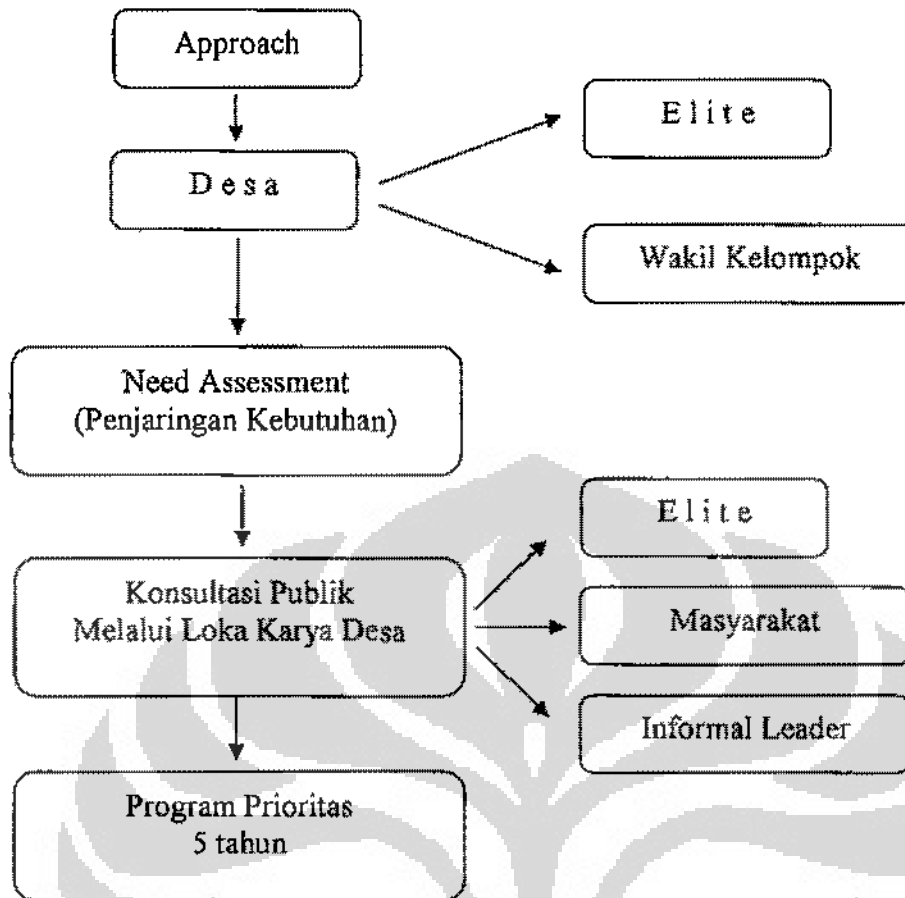
Sumber: Laporan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco 2004.

3.2.2. Fase Setelah Tahun 2004

Perkembangan penanganan CSR PT. Inco mengalami perubahan secara mendasar sejak mengadaptasi konsep CSR terkini yang telah menjadi bagian penilaian maju tidaknya suatu perusahaan/industri. Perkembangan tersebut mensyaratkan kemajuan pandangan PT. Inco dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial.

Paradigma lama tersebut direvisi seiring pergantian manajemen yang menangani program pengembangan masyarakat pada tahun 2004 dan adanya itikad untuk mengadaptasi konsep CSR terkini. Pergantian sumber daya manusia yang bekerja pada *community relations departement* PT. Inco memberikan pendekatan yang baru pada implementasi dan perkembangan konsep pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh PT. Inco (Sumber: Laporan Tahunan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco 2004):

- Proses pembangunan masyarakat yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dan pusat dari pembangunan.
- Melalui perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) dengan menggunakan model perencanaan partisipatif yang dikembangkan dari metode PRA (*participatory rural appraisal*)
- Pembangunan yang bertitik tolak pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3.5. Paradigma Baru Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco

Sumber: Laporan Program Pengembangan Masyarakat PT. Inco 2004.

Paradigma baru tersebut diarahkan pada fokus 6 sektor, yakni, pendidikan kesehatan; pengembangan ekonomi masyarakat; pertanian dan perikanan; infrastruktur dan pelayanan publik; sosial budaya; Olahraga dan kampanye perdamaian.

Upaya mengadaptasi CSR yang dilakukan PT. Inco menetapkan langkah-langkah untuk mengimplementasikan konsep paradigma barunya. Perbedaan terpenting dalam strategi yang dilakukan terutama pada proses perencanaan. Dalam hal ini, melalui laporan tahunan program pemberdayaan masyarakat 2004, PT. Inco dapat ditelusuri upaya merealisasikan konsep CSR yang diadaptasi. Dalam dokumen tersebut ada 4 (empat) tahap yang dilakukan untuk mencapai desain program yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana

komitmen penerapan CSR, keempat tahap yang dilakukan dalam merancang paradigma baru pengembangan masyarakat PT. Inco, yaitu:

1. Tahap persiapan dan konsolidasi

Tahap persiapan dan konsolidasi ke seluruh stakeholder mengenai perubahan paradigma dan pendekatan dari mekanisme top down ke bottom up berikut penjelasan mengenai pentingnya perubahan paradigma tersebut dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang.

2. Tahap pemetaan kebutuhan secara partisipatif

Tahapan ini dianggap cukup krusial, karena melibatkan segenap stakeholder dalam mendefinisikan dan memprioritaskan program-program pengembangan masyarakat secara partisipatif. Artinya, setiap orang dalam masyarakat mempunyai suara, masukan, atau pikiran menyangkut problem yang dialami sehari-hari berikut solusi yang ditawarkan atas problem tersebut.

3. Tahap penyusunan strategi atau rencana tindak

Tahap ini mensyaratkan terumuskannya program prioritas masing-masing wilayah pemberdayaan yang terdiri dari empat kecamatan dan 32 desa. Program prioritas tersebut berupa program unggulan yang ditargetkan selesai di tahun berjalan. Disamping itu, pada tahap ini dirumuskan pula aturan main pelaksanaan program, termasuk pembagian peran antara masyarakat, pemerintah dan PT. Inco.

4. Tahap implementasi strategi rencana tindak

Pada tahap ini, seluruh program prioritas dilaksanakan berdasarkan komitmen pembagian peran yang sudah disepakati bersama.

Pada tahap awal merealisasikan konsep ini program diprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, sosial budaya dan kemasyarakatan. Dalam tahap implementasi terdapat sub tahap monitoring dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap kunci untuk memotret sejauhmana keberhasilan implementasi program dilapangan. Melalui monitoring dan evaluasi tersebut akan diperoleh atau akan didapatkan gambaran tentang program yang berhasil dan yang tidak berhasil. Data yang terekam dalam tahap ini akan sangat berguna sebagai referensi dalam pelaksanaan program yang sama di masa

mendatang. Melalui tahap ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya iklim transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik pelaksanaan program.

Berikut ini tabel tahap-tahap pelaksanaan program pengembangan masyarakat PT. Inco sebagai strategi penerapan konsep CSR.

Tabel 3.1. Tahap-tahap Pelaksanaan Program
Community Development PT. Inco

Tahap-tahap Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat PT. INCO			
Persiapan dan Konsolidasi	Pemetaan Kebutuhan secara Partisipatif	Penyusunan Strategi / Rencana Tindakan	Implementasi Strategi / Rencana Tindakan
<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan <i>stakeholder</i> • Sosialisasi paradigma baru ke seluruh <i>stakeholder</i> • Diskusi dengan <i>stakeholder</i> kunci; Bupati, Bappeda, Camat & Kepala Desa serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat • Konsultasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan <i>stakeholder</i> • <i>Public hearing</i> dan konsultasi publik • Pemetaan kebutuhan secara partisipatif di seluruh desa • Lokakarya desa • Lokakarya kecamatan • Penyiapan strategi rencana tindak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program prioritas • Konsultasi publik • Penyusunan mekanisme pelaksanaan program & pembagian peran 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi program dengan program kabupaten untuk masing-masing dinas • Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif seluruh proses implementasi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program

Sumber : laporan tahunan program pemberdayaan masyarakat 2004, PT. Inco

Untuk memastikan strategi yang telah digariskan, PT. Inco merumuskan konsep alur pendampingan program pengembangan masyarakat PT. Inco yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, sebagaimana data resmi yang disampaikan oleh pihak perusahaan, dalam persentase resminya, yakni sebagai berikut: *need assessment* atau proses penjarangan kebutuhan masyarakat, pendampingan tahap I, dan pendampingan tahap II. Alur tersebut dimaksudkan untuk memastikan semua program berjalan dengan semestinya.

Berikut ini penjelasan masing-masing alur pendampingan program pengembangan masyarakat PT. Inco yang disarikan dari persentase resmi PT. Inco:

3.2.2.1. Need Assesment atau Penjaringan Kebutuhan

Tujuan:

- Untuk mengetahui sejauh mana kondisi riil masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT. Inco.
- Memperkenalkan model perencanaan partisipatif kepada pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam menyusun suatu program pengembangan masyarakat.
- Mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat, berdasarkan skala prioritas yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat.
- Merumuskan visi dan misi pembangunan di setiap desa dan kecamatan yang dijadikan sasaran *need assesment*.
- Merumuskan program-program strategis jangka panjang, menengah, dan pendek pada setiap desa dan kecamatan yang dijadikan sasaran pengembangan masyarakat PT. Inco.
- Mengetahui sejauhmana dampak yang dihasilkan dari keberadaan PT. Inco terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Mengidentifikasi harapan-harapan masyarakat terhadap keberadaan PT. Inco.

Untuk mencapai tujuan dari *need assesment* atau proses penjaringan kebutuhan PT. Inco digunakan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Model perencanaan partisipatif ini digunakan untuk merubah paradigma pembangunan yang sempit menjadi paradigma pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sentral dari pembangunan, sehingga program-program yang dihasilkan bertitik tolak pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana Chambers (1996 ; 41) menyebutkan bahwa orientasi partisipatif PRA telah memberikan dorongan baru padapengembangan metode. Salah satu hal yang menggeberikan dari PRA adalah kurangnya cetak biru (*blue print*). Partisipasi menghasilkan keanekaragaman sehingga masyarakat memainkan suatu bagian dalam interpretasi, penerapan dan terkadang penemuan

metode itu sendiri. masyarakat didorong untuk melakukan improvisasi. Apa yang dikerjakan setiap berbeda setiap waktu sebagai hasil dari suatu interaksi kreatif.

Teknik PRA digunakan untuk merangkul semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang masih buta aksara. Metode ini menggunakan sarana yang tersedia di desa berupa visual atau gambar sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan diri mereka sendiri dan lingkungannya sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka dan selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan program pengembangan masyarakat PT. Inco. Ada beberapa teknik PRA yang digunakan PT. Inco dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan PT. Inco, yaitu:

A. Teknik Penelusuran Sejarah Desa

Setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai sejarahnya sendiri yang menjadikannya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Sejarah ini menjadi bagian dari kebanggaan suatu masyarakat. Sejarah mengenai masyarakat suatu desa bukan hanya sejarah yang tertulis, tetapi juga sejarah lisan yang hidup dikalangan masyarakat dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita rakyat.

Teknik penelusuran sejarah desa adalah teknik PRA yang digunakan untuk mengungkapkan kembali sejarah masyarakat disuatu lokasi tertentu berdasarkan penuturan masyarakat sendiri. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah desa disusun secara berurutan menurut waktu kejadiannya sehingga diperoleh gambaran untuk menghadapi tantangan ke depan. Tujuan kajian sejarah desa adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Memfasilitasi masyarakat agar mengungkapkan pemahamannya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu sehingga mendapat pemahaman yang komperensif untuk menentukan program-program dimasa depan.
- Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji latar belakang perubahan-perubahan di masyarakatnya dan masalah-masalah yang terjadi karena adanya perubahan sosial masyarakat, sehingga bisa dirumuskan solusi untuk menghadapi perubahan sosial tersebut.

- Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan mereka.

B. Teknik Identifikasi Masalah atau Kebutuhan dari Kalender Musim

Peristiwa-peristiwa dalam daur kehidupan masyarakat desa akan sangat terpengaruh oleh siklus musim, seperti musim tanam menjelang musim hujan, musim panen setelah padi mengering, dan musim paceklik jika kemarau terlampaui panjang. Peristiwa sosial juga seringkali berkaitan dengan siklus musim itu, seperti pesta adat dan perkawinan setelah panen yang berhasil, merantau atau migrasi ketika musim paceklik. Dengan mengenali dan mengkaji pola-pola musiman ini, pola kehidupan masyarakat yang merupakan informasi penting dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan program. Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengidentifikasi semua jenis data yang dibutuhkan. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Kalender musim adalah teknik PRA yang mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) dalam kehidupan masyarakat. Dari metode ini, dapat diketahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat yang meliputi masalah pemenuhan kebutuhan dasar yang berulang-ulang pada musim tertentu.

Tujuan kajian kalender musim adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi masalah kekurangan pangan, air bersih, banyak penyakit, keadaan perumahan yang rawan banjir, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan pokok hidup, kesempatan kerja, dan masalah-masalah mendasar yang terjadi di masyarakat.
- Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat yaitu masa-masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah, sehingga disiapkan program pengembangan masyarakat yang sesuai untuk menghadapi permasalahan musim.

C. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa

Salah satu sumber informasi dan bahan perencanaan pembangunan yang umum dikenal adalah peta. Ada beberapa peta yang dapat dibuat, misalnya adalah peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk permukaan wilayah, peta geologi yaitu peta yang menggambarkan susunan dan jenis batu, peta hidrologi yaitu peta yang menggambarkan keadaan sumber-sumber dan aliran air, peta rencana kawasan yaitu peta-peta sosial yang dapat menunjukkan penyebaran penduduk dan batas-batas pemerintahan. Dengan ikut terlibat dalam memetakan, masyarakat akan dapat menyadari kondisi lingkungannya.

Sketsa desa adalah gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumberdaya fisik (alam atau buatan) yang dapat digunakan untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Tujuan kajian sketsa desa adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Menyadari akan jenis, jumlah dan mutu sumber daya yang tersedia di desa masing-masing.
- Menyadari cara, pola, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya tersebut.
- Dapat mengenali masalah, sesuai dengan keadaan desa.
- Dapat menggali potensi untuk memecahkan masalah.
- Dapat menyamakan persepsi dan prioritas masalah yang akan dihadapi bersama.
- Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji perubahan-perubahan keadaan yang terjadi dari sumber daya yang mereka miliki, yaitu mengenai sebab dan akibat dari perubahan tersebut.

D. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi Melalui Penelusuran Desa (Transek)

Hubungan masyarakat pedesaan dengan lingkungan alam sangat tinggi. Mata pencaharian masyarakat desa adalah mengolah alam secara langsung sehingga keadaan alam dan sumber dayanya akan sangat menentukan kesejahteraan mereka. Contohnya adalah, kegiatan pertanian masyarakat akan sangat tergantung pada jenis dan keadaan tanah, ketersediaan air, dan curah hujan. Tingginya hubungan antara masyarakat dengan lingkungan alam menyebabkan

hal ini perlu dipahami dengan mengembangkan program bersama masyarakat. Dengan metode ini masyarakat dapat secara langsung mengamati keadaan lingkungan dan sumber daya dimana mereka hidup. Tujuan dari kajian penelusuran desa adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mendiskusikan keadaan sumber daya dengan cara mengamati langsung lokasinya.
- Hal-hal yang biasa didiskusikan adalah menyangkut masalah pemeliharaan sumber daya pertanian, potensi sumber daya yang dimiliki, dan harapan para petani mengenai keadaan tersebut.

E. Teknik Identifikasi Masalah dan Potensi dari Bagan Hubungan Kelembagaan

Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai lembaga yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri seperti lembaga adat maupun lembaga yang berasal dari luar seperti lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta. Salah satu hal yang penting dalam usaha mengembangkan masyarakat adalah pemanfaatan potensi lembaga-lembaga tersebut. Karenanya, keberadaan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut perlu diperhitungkan dalam setiap usaha pengembangan masyarakat.

Teknik diagram venn merupakan teknik PRA yang sering digunakan untuk melihat hubungan berbagai lembaga yang terdapat di desa, sehingga diagram ini dikenal sebagai bagan hubungan kelembagaan. Sebagai alat kajian, bagan kelembagaan adalah alat untuk mengenali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Tujuan identifikasi masalah dan potensi dengan bagan kelembagaan adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Untuk mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa.
- Untuk mengetahui besarnya manfaat lembaga yang dirasakan oleh masyarakat dan sering tidaknya hubungan antara lembaga di desa dengan masyarakat.

- Untuk memetakan peran masing-masing lembaga dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat desa.

F. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan dan Wawancara Keluarga

Wawancara keluarga dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yaitu kegiatan tanya jawab sistematis dengan warga masyarakat yang dipilih untuk lebih partisipatif, dimana masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya. Wawancara yang dilakukan menghasilkan profil keluarga yaitu gambaran keadaan suatu keluarga sebagai informasi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk, kesehatan penduduk, tingkat pendidikan, serta harapan dan rencananya di masa depan.

G. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan Melalui Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Metode ini dinilai sangat cocok bagi permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. FGD memungkinkan semua masyarakat untuk berpartisipasi mengeluarkan pendapat mereka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

H. Pengelompokan dan Penentuan Peringkat Kebutuhan atau Masalah

Identifikasi masalah dan potensi yang diperoleh melalui beberapa metode diatas masih perlu diidentifikasi dan diperiksa kebenarannya sehingga dapat menampung aspirasi kebutuhan masyarakat. Pengelompokan masyarakat adalah upaya untuk menghimpun, memeriksa kebenaran, mengetahui kualitas dan menentukan pilihan masalah yang sesuai dengan aspirasi dan kondisi desa.

PT. Inco melakukan pengelompokan masalah dengan menghimpun masalah, memilih dan memeriksa kebenaran dari masalah-masalah tersebut dengan mendiskusikan kembali dengan masyarakat, sehingga pengelompokan masalah sesuai dengan bidang-bidang pengembangan masyarakat. Tujuan dari pengelompokan masalah adalah (laporan tahunan program pengembangan masyarakat PT. Inco, 2004):

- Memperoleh data masalah dan potensi sumber daya secara utuh yang dapat dipercaya.
- Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- Mendapatkan informasi masalah yang meyakinkan sebagai hasil alat kajian desa.
- Menghimpun masalah yang kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan bidang pengembangan masyarakat.
- Memperoleh satu kesatuan data yang benar-benar mencerminkan aspirasi semua kelompok masyarakat sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan masyarakat.

3.2.2.2. Program Pendampingan Tahap I

Tujuan umum yang ingin dicapai dari program pendampingan tahap I ini adalah :

- Memfasilitasi persiapan program sosial masyarakat melalui penentuan kriteri penerima manfaat program. Penyusunan mekanisme implementasi program pengembangan masyarakat PT. Inco serta mekanisme evaluasi pertanggungjawaban program-program yang sudah diimplementasikan.
- Memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan usulan kegiatan ke PT. Inco sesuai dengan hasil *need assessment*.
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan komunitas di luar dari program pengembangan masyarakat PT. Inco, tetapi merupakan kegiatan rutin masyarakat yang membutuhkan fasilitas dalam meningkatkan kapasitas kelompok komunitas.

Dampak yang diharapkan dari program pendampingan tahap I ini adalah :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengorganisir diri dalam mengelola sumber daya.
- Terbentuknya pengelolaan program di tingkat komunitas.
- Adanya kemampuan kelompok komunitas membuat pengusulan program (proposal) serta adanya mekanisme pengelolaan sumber daya yang disalurkan oleh PT. Inco.

3.2.2.3. Program Pendampingan Tahap II

Tujuan umum program pendampingan tahap II ini adalah :

- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat
- Memfasilitasi proses perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi serta proses pertanggungjawaban secara partisipatif.
- Menjadi katalisator proses pembangunan desa dan masyarakat dalam wilayah pemberdayaan PT. Inco.

Tujuan khusus program pendampingan tahap II, yaitu :

- Memfasilitasi dan memediasi masyarakat serta aparat pemerintahan desa dalam menyiapkan sistem dan implementasi program pengembangan masyarakat yang telah direncanakan secara partisipatif pada lokakarya desa dan kecamatan sebagai kelanjutan pendampingan tahap I.
- Memfasilitasi dan membantu proses kordinasi dan komunikasi lintas desa serta kecamatan yang disusun secara partisipatif pada lokakarya desa dan kecamatan.
- Memfasilitasi dan membantu proses kordinasi dan komunikasi program pengembangan masyarakat pada instansi terkait.
- Memfasilitasi dan membantu peningkatan efektivitas implementasi program pengembangan masyarakat PT. Inco.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan.

BAB 4

TEMUAN LAPANGAN

4.1. Pelaksanaan CSR PT. Inco

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program CSR PT. Inco, peneliti tidak mendapatkan data-data pendukung berkaitan dengan pelaksanaan program CSR sebelum fase tahun 2004 dikarenakan pejabat *External Relation* PT. Inco yang menjadi informan peneliti tidak memiliki dokumen-dokumen penunjang dan informasi yang detail tentang program CSR pada fase tersebut, sehingga peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada fase setelah tahun 2004 dengan menitikberatkan program CSR pada bidang pendidikan dan kesehatan saja.

Pasca revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Ekspansi perusahaan dalam berbagai bentuk, turut mendorong terjadinya kolonialisme pada masa silam. Bahkan jejak tersebut masih muncul pada saat ini dalam wujud barunya. Perusahaan yang sedemikian berpandangan bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Di Indonesia paradigma ini bertahan lebih dari 3 (tiga) dekade. Dalam perkembangan berikutnya tuntutan terhadap perusahaan untuk lebih dari sekedar penyediaan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial. Hal ini disebabkan karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat disekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak yang negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep CSR mula-mula yang didominasi perspektif kedermwanaan bersifat karitatif.

Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan

sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Dengan pengaturan dan tuntutan dari arus bawah, dunia usaha semakin menyadari akan urgensi mengadaptasi konsep CSR yang lebih baik, tidak sekedar kedermawanan. Upaya mengadaptasi konsep tersebut di internal PT. Inco terlihat dari rumusan visi dan misi perusahaan.

Dalam wawancara dengan Manajer *Community Relation* PT. Inco pada tanggal 02 April 2009, bahwa proses internalisasi visi misi perusahaan berupaya mengadaptasi konsep CSR. Pada wawancara tersebut pihak perusahaan dalam hal ini diwakili oleh Manajer *Community Relation* PT. Inco, memaparkan bagaimana PT. Inco memandang aktivitas CSR dalam operasinya, hal itu tergambar pada petikan wawancara berikut:

"PT. Inco melihat bahwa aktifitas CSR ini merupakan suatu aktifitas yang terintegrasi dalam operasi perusahaan. Hal ini mengandung arti bahwa semua nafas operasi dari PT. Inco harus mencerminkan nilai-nilai luhur dari CSR. Semua departemen harus memiliki kontribusi terhadap CSR, bukan hanya disederhanakan menjadi tanggung jawab bagian *community relation* khususnya. Aktifitas CSR PT. Inco merupakan bagian yang terintegrasi menjadi suatu sistem yang harus dipenuhi oleh sepanjang *supply chain* (rantai pasokan) PT. Inco yang meliputi seluruh departemen PT. Inco hingga pada kontraktor-kontraktor lokal yang menjadi mitra dari PT. Inco" (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2008).

Perusahaan dalam memandang CSR tidak hanya sebagai *lip service* tapi merupakan komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasinya. Hal ini dibuktikan dengan menempatkan CSR pada semua mata rantai aktivitas perusahaan tersebut.

Bagi perusahaan, peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program CSR sangatlah penting. Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* yang ada secara otomatis dibutuhkan koordinasi dan komunikasi terutama dengan masyarakat melalui pemahaman budaya lokal yang mendalam merupakan salah satu kunci sukses. Hal ini dapat dilihat pada petikan wawancara dengan pihak perusahaan sebagai berikut :

“.. Keberhasilan program pengembangan masyarakat PT. Inco saat ini tidak terlepas dari kontribusi mereka. Mereka memiliki kapabilitas yang sangat mendukung dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Kemampuan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder perusahaan terutama dengan masyarakat melalui pemahaman budaya lokal yang mendalam merupakan salah satu kunci sukses program pengembangan masyarakat PT. Inco...” (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2008).

Selain itu perusahaan memandang bahwa diperlukan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah daerah selaku regulator dan masyarakat setempat sebagai subyek dalam pelaksanaan CSR tersebut. Bagi perusahaan CSR tidak semata sebagai tameng untuk meredam konflik atau kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat setempat, tapi merupakan kewajiban perusahaan sebagai dampak dari kegiatan bisnis pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara dengan pihak perusahaan sebagai berikut :

“....Secara mandatory (kewajiban), sumbangsih PT. Inco dalam pembangunan negara ini sudah sangat jelas. PT. Inco selalu membayarkan royalti, pajak, dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab PT. Inco sebagai konsekuensi dalam beroperasi di negara ini dengan tepat waktu. Bahkan PT. Inco saat ini telah bekerja secara “*beyond regulation*” dengan mengintegrasikan semua pemahaman mengenai konsep CSR sepanjang rantai pasokannya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sistem nilai-nilai yang dianut PT. Inco dengan sistem nilai yang diterapkan oleh mitra PT. Inco. Hal ini merupakan syarat utama dalam menjalin kemitraan dengan PT. Inco (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2008).

Adapun pandangan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan CSR dari segi penganggaran, pihak perusahaan pada dasarnya tidak mematok besaran anggaran CSRnya. Anggaran CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan penjaringan kebutuhan yang dilakukan bersama antara pihak perusahaan

dalam hal ini melalui pendampingan masyarakat dengan masyarakat sendiri. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh manager *External Relation* PT. Inco, peneliti tidak merasa pihak perusahaan terkesan tertutup dalam hal penganggaran ini. Namun menurut pihak perusahaan menerapkan skala prioritas dan penafsiran subyektifitas perusahaan mana yang paling riil. Hal ini disebabkan karena jika menentukan alokasi anggaran terlebih dahulu maka yang terjadi adalah masyarakat akan berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang ada, bukan berbasis pada kebutuhan, hal ini dapat dilihat pada petikan wawancara sebagai berikut :

“...Sampai saat ini kita tidak ada plafon anggaran karena kita berprinsip bahwa sumber dana itu bisa dicari tapi yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat yang paling riil itu seperti apa dan prioritas program seperti apa, karena selama ini kalau kita menentukan anggaran duluan maka orang akan berpikir bahwa bagaimana menghabiskan anggaran yang ada. Sekarang kita melihat bahwa, hal yang paling prinsip adalah bagaimana mendefinisikan kebutuhan masyarakat (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2008).

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab 3 penelitian ini, bahwa PT. Inco dalam melaksanakan CSR nya menjadikan *comdev* sebagai salah satu ujung tombak dalam melaksanakan program-program CSR bagi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dalam hal ini diwakili oleh *Manager Community Relation* hal tersebut tergambar dalam petikan wawancara sebagai berikut :

“...dalam melaksanakan CSR bagi masyarakat yang berada pada daerah pemberdayaan kami, pihak perusahaan melaksanakan CSR dengan menggunakan pendekatan *community development*, hal ini dilakukan seiring dengan terjadinya perubahan paradigma perusahaan dalam memandang CSR sebagaimana yang kami tuangkan dalam paradigma baru *comdev* PT. Inco....”
(Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2008).

Dalam merumuskan program CSR bagi masyarakat utamanya yang berhubungan dengan *comdev*, PT. Inco selanjutnya mengadopsi pendekatan

Participatory Rural Appraisal (PRA). Salah satu hal yang mempengaruhi hal ini adalah terjadinya pergantian personel pada departemen *external relation* PT. Inco pada tahun 2000 an dan selanjutnya terjadi perubahan dalam paradigma pelaksanaan *comdev* sebagaimana yang tertuang dalam paradigma baru *comdev* PT. Inco (lihat pada bab 3 bagian gambaran umum program CSR PT. Inco).

Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dapat terlihat bagaimana strategi perusahaan dalam melaksanakan CSRnya. Dimana *community empowerment* merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan mengawal proses-proses pendampingan bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan kapasitas bagi masyarakat utamanya perubaha pola pikir sehingga tidak selamanya menggantungkan dirinya dengan keberadaan perusahaan, namun suatu saat jika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi kelak masyarakat tersebut sudah berdaya dan mampu mandiri. Berikut kutipan wawancara dengan pihak perusahaan :

“...Oleh karena itu, visi dan misi program pengembangan masyarakat PT. Inco kita arahkan agar terjadi proses transformasi sosial yang meliputi proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan juga adanya proses perubahan pola pikir masyarakat yang sebelumnya sangat tergantung pada kegiatan pertambangan PT. Inco menuju pada masyarakat yang mandiri dengan mengembangkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selain pada sektor pertambangan. Kemandirian lokal melalui usaha pengembangan masyarakat yang meliputi bidang pertanian, pengembangan usaha lokal, pendidikan, dan bidang kesehatan, yang akan kita support supaya sektor-sektor kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak hanya tergantung kepada hasil tambang yang notabene merupakan *unrenewable resources* kepada sektor-sektor *renewable resources*, sehingga ketika PT. Inco sudah tidak lagi beroperasi di daerah ini masyarakatnya sudah bisa mandiri” (PT. INCO : SM, April 2009).

Tahapan pelaksanaan Program CSR yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di daerah pendampingan perusahaan mengadopsi pendekatan perencanaan partisipatif dimana masyarakat yang menjadi pelaku pada pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan monitoring. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Universitas Indonesia

"...tahapan pelaksanaan *community developmen* kita laksanakan dalam 4 (empat tahap, yakni pertama, tahap persiapan dan konsolidasi. Tahap ini merupakan tahap awal dimana pertama kali paradigma baru kami jabarkan dalam perusahaan. Hal ini penting guna mensosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* yang ada. Tahap kedua, yakni pemetaan kebutuhan secara partisipatif. Tahap ini melibatkan semua *satakeholder* dalam mendefenisikan dan memprioritaskan program. Tahap ke tiga kami sebut sebagai tahap penyusunan strategi atau rencana tindak. Tahap ini mensyaratkan tersusunnya program prioritas di masing-masing wilayah pemberdayaan kami, pada tahap ini juga termaksud aturan main pelaksanaan program, bahkan sampai pada pembagian peran dalam pelaksanaan program. Tahap yang terakhir adalah implementasi strategi rencana tindak. Pada tahap ini seluruh program prioritas dilaksanakan berdasarkan komitmen pembagian peran yang telah disepakati bersama" (PT. INCO : SM, April 2009).

Dengan strategi belajar bersama melalui proses transformasi sosial yang meliputi pertukaran informasi, pengetahuan dan juga adanya perubahan pola pikir dari masyarakat diharapkan terjadi kemandirian lokal sehingga masyarakat tidak sepenuhnya tergantung dengan keberadaan perusahaan. Dari kutipan wawancara di atas, juga dapat dilihat strategi perusahaan dalam mempersiapkan masyarakat sampai pada pasca tambang, karena harus diakui bahwa ketersediaan sumberdaya alam yang merupakan bahan tambang sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga kelak suatu saat keberadaan perusahaan di daerah tersebut sewaktu-waktu dapat berhenti beroperasi.

4.2. Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Dan PT. Inco

Sebagaimana Visi PT. Inco, "menjadi salah satu diantara produsen nikel utama terkemuka di dunia" dan Misi "mengembangkan sumber daya Indonesia yang dipercayakan kepada kami sebaik-baiknya bagi manfaat semua pemangku kepentingan". Maka PT. Inco berupaya menjadi perusahaan yang tidak saja menguntungkan perusahaan. Upaya itu ditunjukkan dengan mengakomodir kepentingan berbagai kelompok melalui tanggung jawab sosial perusahaan sejak

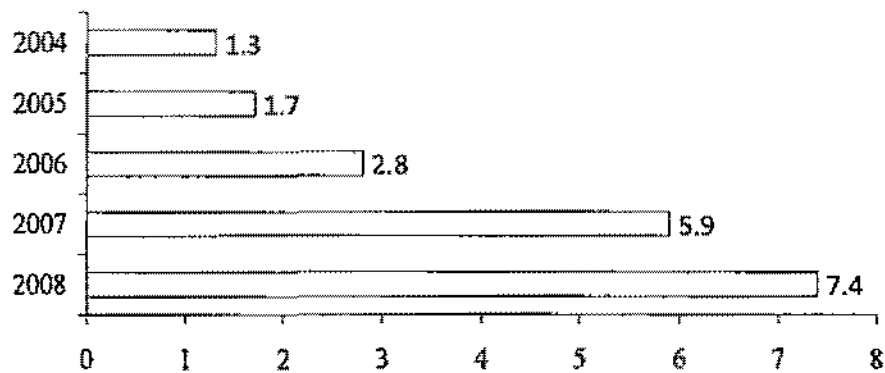
berdiri. Berbagai kelemahan konsep tanggung jawab sosial direvisi seiring perkembangan situasi dan kondisi global dan lokal.

Secara khusus dalam implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Inco, dapat terekam berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan PT. Inco. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sebagaimana layaknya warga negara yang baik (*good corporate citizenship*) telah sejak lama merupakan sasaran pokok PT. Inco. Selama lebih dari 40 tahun di Indonesia, sejak mendapatkan hak untuk menambang di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah. Hal itu yang coba direalisasikan oleh PT. Inco melalui program pengembangan masyarakat. Dari penelusuran dokumen resmi perusahaan dan wawancara yang dilakukan setidaknya dapat diuraikan manfaat dari implementasi CSR oleh PT. Inco. Pertama, manfaat yang dapat diperoleh oleh PT. Inco. Kedua, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

4.2.1. Manfaat yang diperoleh Masyarakat

PT. Inco menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan operasi diperlukan kemitraan yang kuat antara perusahaan, penduduk setempat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Indonesia maupun organisasi-organisasi non pemerintahan. Dengan demikian melalui implementasi CSR, PT. Inco memprakarsai program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengorganisasian program sesuai kondisi objektif (masalah-masalah yang dihadapi) masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai subyek penentu dalam merancang, implementasi, monitoring dan evaluasi program yang bekerjasama dengan PT. Inco yang khusus membidangi program pengembangan masyarakat.

Dalam upaya program pengembangan masyarakat yang dijalankan, PT. Inco pada tahun 2007 mengeluarkan dukungan dana sebesar \$5,9 juta atau naik dua kali lipat dari \$2,8 juta pada tahun 2006. Pada tahun 2008 ini, pengeluaran untuk program pengembangan masyarakat meningkat tajam menjadi \$ 7,4 juta.



Gambar 4.1. Pengeluaran PT. Inco bagi Program Pengembangan Masyarakat 2004-2008 dalam juta dolar

Sumber : Laporan Pemberdayaan Masyarakat PT. INCO Tahun 2007

Sesuai dengan hasil penjarangan kebutuhan (*need assessment*) pada tahun 2004, PT. Inco menitikberatkan program pengembangan masyarakat pada enam bidang utama, yaitu : pendidikan, kesehatan, infrastruktur (fasilitas dan infrastruktur), pertanian, pengembangan usaha-usaha lokal, dan sosial budaya. Di samping program pemberdayaan masyarakat, PT. Inco juga melakukan program konservasi dan rehabilitasi lingkungan, antara lain melalui upaya penghutanan kembali lahan pasca tambang, menjaga kualitas air, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui program pengembangan masyarakat pada enam bidang utama diatas, masyarakat mendapatkan manfaat (langsung atau tidak langsung) yang besar sebagaimana yang terekam pada petikan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan operasi PT. Inco

“... PT.Inco ada membantu di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan. Ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk warga sekitar perusahaan...” (wawancara N, Masyarakat, 26 April 2009).

Berikut ini dapat diuraikan manfaat yang diperoleh masyarakat pada enam bidang utama dan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang turut mendukung kegiatan program pengembangan masyarakat.

4.2.1.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan ibarat “pembekalan” bagi seseorang dalam mengarungi hidup ini, juga menjadi investasi yang menghasilkan sosok cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Berlandaskan kesadaran semacam itu, program pengembangan masyarakat PT. Inco menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu fokus kegiatan. Upaya-upaya pengembangan dalam bidang pendidikan diantaranya dalam bentuk beasiswa (untuk tingkat sekolah dasar hingga tingkat doktoral), dukungan bagi para guru dalam merancang kursus dan mengembangkan metode pengajaran, serta pemberian insentif kepada para guru yang bekerja di daerah terpencil. Tidak ketinggalan pula penyediaan prasarana pendidikan, antara lain pembangunan gedung belajar taman kanak-kanak di desa Baruga, Malili, dan Sorowako. Ditambah lagi dengan penyediaan berbagai macam fasilitas, mulai dari buku cetak, komputer, hingga pengadaan laboratorium dan perpustakaan sekolah.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dan Camat Nuha terekam manfaat yang diperoleh masyarakat dalam bidang pendidikan. Berikut petikan wawancaranya :

“Selain di bidang kesehatan, di bidang pendidikan hasilnya juga bagus. Salah satu contohnya adalah program guru magang. Selama ini kita kekurangan guru, kita bisa menambah guru-guru melalui program magang karena dana dari program pengembangan masyarakat PT. Inco. Begitu pula dengan program pelatihan-pelatihan guru juga tidak bisa diadakan tanpa ada bantuan dari PT. Inco. Hal ini sangat berguna dalam menambah kapasitas dan kualitas guru-guru kita. Satu hal yang juga sangat berhasil adalah program untuk meningkatkan keterampilan di sejumlah sekolah” (Wawancara AH, Pemerintah Kecamatan Nuha, 03 April 2009).

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat di daerah tersebut. Berikut petikan wawancaranya :

“Di bidang pendidikan juga ada bantuan untuk guru-guru. Yaitu berupa bantuan untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut, misalkan: guru yang tamatan D3 mendapatkan bantuan biaya kuliah untuk meneruskan pendidikan ke S1. Akan tetapi bantuan ini hanya diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah negeri saja” (Wawancara RB, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Sejak tahun 2004, PT. Inco bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur menggalang Program Pelatihan Industri (PPI). Program pelatihan yang berlangsung selama 24 bulan bagi pemuda-pemuda lokal ini terbukti berhasil mencetak tenaga kerja siap pakai dalam bidang industri. Sebagian besar lulusan PPI juga diserap oleh PT. Inco sebagai tenaga kerja terampil di sejumlah departemen produksi.

Wawancara dengan Ketua KAWAS (Kerukunan Warga Asli Sorowako) turut memperkuat pernyataan Camat Nuha tentang upaya program tanggungjawab sosial PT. Inco. Berikut ini petikan wawancaranya :

“Selain itu, persoalan mendasar kami adalah minimnya SDM yang tersedia, oleh karena itu kami sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan pendidikan seperti pemberian beasiswa kepada putra-putri kami, pembangunan sarana pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi (S3), pelatihan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap bidang yang kita alami” (Wawancara A, LSM KAWAS, 06 April 2009).

Hal yang sama juga dipertegas oleh salah seorang warga yang berada di sekitar PT. INCO dalam wawancara sebagai berikut:

“PT. Inco selama ini sudah banyak membantu. Banyak warga kami bekerja di perusahaan itu. Selain itu, PT. Inco juga membantu di bidang pendidikan. Ada anak-anak yang menerima beasiswa...”(Wawancara N, Masyarakat, 26 April 2009).

Pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh salah seorang warga yang berada di sekitar daerah pemberdayaan PT. Inco, berikut petikan wawancaranya:

“...Untuk pendidikan ada bantuan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah yang memang penduduk asli di daerah tersebut. Bantuan ini diberikan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri di daerah Lutim. Tapi tidak semua anak yang mendapatkan bantuan beasiswa, karena mereka harus melengkapi berkas-berkas persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Inco. Jadi, klo mereka tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan oleh PT. Inco, otomatis bantuan beasiswa tersebut tidak bisa mereka terima” (Wawancara RB, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa dalam dalam bidang pendidikan, PT. Inco membantu masyarakat dengan memberikan beasiswa, namun ini hanya dilakukan bagi masyarakat asli sorowako, adapun tentang syarat dan mekanisme untuk mendapatkan beasiswa tersebut bagi masyarakat terkadang masih susah. Hal ini terangkum dalam petikan wawancara di bawah ini yang menyebutkan hal tersebut, berikut petikan wawancaranya :

“...Persyaratan utamanya adalah mereka harus benar-benar penduduk yang berdomisili di daerah pemberdayaan, dan sedang bersekolah di daerah Lutim, diluar itu tidak akan diberikan bantuan apa-apa oleh perusahaan. Di lutim sendiri sebenarnya biaya pendidikan untuk anak sekolah sudah digratiskan oleh pemda, jadi bantuan beasiswa dari perusahaan dalam bentuk uang saku dan biaya penunjang pendidikan seperti biaya transportasi, biaya buku-buku sekolah dan lain-lain yang besarnya direkomendasikan oleh pihak sekolah tempat siswa tersebut. Keputusannya ada di pihak govrel” (Wawancara RB, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Selain hal tersebut di atas, PT. Inco juga membantu dalam bidang pendidikan, dalam hal ini pengadaan angkutan bis sekolah di daerah pemberdayaannya, meski meskipun demikian, namun tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas bis sekolah ini, mengingat wilayah pemberdayaan PT.

Inco ini tidak seluruhnya dapat dijangkau dengan angkutan bis ini karena faktor jalannya yang berbukit-bukit, selain itu juga terdapat daerah dimana transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah angkutan air yang dalam bahasa local disebut sebagai “*katinting*”. Berikut petikan wawancara dengan masyarakat sekitar daerah pemberdayaan PT. Inco :

“Selain itu juga ada bantuan fasilitas berupa mobil angkutan sekolah. Pihak perusahaan sebenarnya sudah menyediakan mobil angkutan sekolah untuk setiap daerah pemberdayaan, tapi tidak semua daerah-daerah tersebut dapat dijangkau oleh mobil sekolah tersebut, sudah ada ditentukan *halted an terminalnya*. Jadi tidak semua juga siswa di sini yang menikmati fasilitas tersebut” (Wawancara RB, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Sebenarnya kepedulian PT. Inco pada bidang pendidikan telah dimulai jauh-jauh hari. Melalui Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS), PT. Inco mengelola dan menyediakan lembaga-lembaga pendidikan dari strata dasar hingga menengah untuk masyarakat. Sampai saat ini, program pendidikan YPS telah dimanfaatkan oleh 1856 pelajar. Awalnya YPS ini didirikan hanya untuk keperluan keluarga staf dan karyawan PT. Inco saja, namun setelah reformasi, tepatnya tahun 2000, masyarakat sekitar tambang menuntut pihak perusahaan untuk membuka akses pendidikan ini untuk umum juga, mengingat di daerah ini tidak ada sekolah negeri, yang ada hanya sekolah milik perusahaan dan sekolah swasta yang fasilitasnya juga sangat minim. Dengan adanya tuntutan masyarakat tersebut, pihak perusahaan bersedia memberikan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar daerah tersebut dengan terlebih dahulu calon siswa dari kalangan masyarakat yang non karyawan harus lulus dalam 3 tahapan seleksi yakni seleksi berkas, tes tertulis, dan tes wawancara. Dalam proses berjalan, tepatnya tahun 2006, YPS tidak lagi memberlakukan sistem seleksi masuk untuk masyarakat yang non karyawan, tapi cukup dengan menyertakan Surat Keterangan Penduduk Sorowako dan sekitarnya. Namun demikian prosentase kuota untuk masyarakat non karyawan ini tetap di batasi oleh pihak Yayasan. Sejak tahun 1993, YPS juga mengelola Akademi Teknik Sorowako (ATS). Lembaga pendidikan tinggi yang berada di Sorowako ini dikelola secara profesional dan telah memiliki rencana

strategis untuk meningkatkan mutu lulusannya sehingga mampu menjawab kebutuhan industri. Berkaitan dengan hal tersebut, ATS mengajukan permohonan penilaian mutu kepada TUV International Indonesia, yaitu suatu lembaga pengujian standar mutu yang berpusat di Berlin, Jerman. Hasilnya, pada Juni 2006, ATS berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000. Sertifikat mutu ini meliputi tiga bidang yaitu, edukasi, sistem manajemen mutu produksi, dan sistem manajemen mutu pelatihan.

PT. Inco juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Universitas Negeri Makasar (yang dulu dikenal dengan nama IKIP Makasar) menawarkan beberapa program pendidikan untuk para guru dan kepala sekolah. PT. Inco juga bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makasar untuk melatih tenaga geologi untuk PT. Inco dan menerima sekitar 20 mahasiswa dari semua jurusan di Universitas Hasanuddin dalam program pemagangan (INCOOP) di PT. Inco setiap semester yang diharapkan dapat menjadi contoh hubungan sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri.

4.2.1.2. Bidang Kesehatan

Peningkatan perawatan kesehatan bagi karyawan dan masyarakat merupakan prioritas tanggung jawab sosial bagi PT. Inco. PT. Inco mengoperasikan rumah sakit yang dilengkapi dengan baik di Sorowako dan membina klinik-klinik pengobatan di Wasuponda, Wawondula, dan Malili. PT. Inco juga membangun posyandu di Tabarano guna memastikan adanya akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Sebagai upaya member pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, PT. Inco bekerja sama dengan Pemkab Luwu Timur membangun Puskesmas Plus di Sorowako dan Kecamatan Towuti. Nilai plus Puskesmas ini adalah pada kelengkapan fasilitasnya, seperti ruang perawatan, UGD, laboratorium, apotik, dan kunjungan secara berkala dokter-dokter spesialis, seperti internis, gigi, dan dokter anak sehingga tidak kalah dibandingkan dengan rumah sakit. Diharapkan Puskesmas Plus ini menjadi rujukan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Sejak beroperasi pada 15 Januari 2005, kunjungan rata-rata per hari sekitar 50-80 pasien.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Nuha memperkuat pemaparan yang disampaikan dalam laporan tahunan PT. Inco. Berikut petikan wawancaranya :

“Secara umum saya menilai program pengembangan masyarakat PT. Inco sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut saya, program pengembangan masyarakat yang paling menonjol adalah di bidang kesehatan, karena bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan itu terutama pada percepatan peningkatan kualitas pelayanan, contohnya peralatan medis Puskesmas. Bila melalui pemerintah prosesnya lama, karena kita harus mengusulkan terlebih dahulu, karena harus melalui APBN dengan proses tertentu. Melalui PT. Inco, semua peralatan bisa diadakan dengan cepat. Selain itu, pelayanannya 24 jam. Saya pikir tidak ada puskesmas di luar yang memberikan pelayanan 24 jam seperti di Sorowako, Wasuponda, dan Wawondula”(Wawancara AH, Pemerintah Kecamatan Nuha, 03 April 2009).

PT. Inco memberikan pelayanan pengobatan berkualitas secara cuma-cuma dan terjangkau kepada penduduk setempat khususnya kepada penduduk asli. PT Inco juga mensponsori kegiatan bakti sosial kesehatan berupa sunatan massal, penyuluhan kesehatan, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma ke beberapa wilayah terpencil. Untuk mencegah wabah demam berdarah, *Public and Community Health* Rumah Sakit PT. Inco melakukan penyemprotan *dengue hemmoregic fever (DHF)* di daerah Sorowako dan Wawondula.

Kegiatan CSR di bidang kesehatan juga mendapat pengakuan dari Bupati Kabupaten Luwu dalam petikan wawacaranya sebagai berikut:

“...di bidang kesehatan PT. Inco Tbk. telah bekerjasama dengan Pemda Membangun Puskesmas Plus; memberikan bantuan tenaga medis pada Puskesmas di wilayah operasinya; - memfasilitasi pembangunan Rumah Sakit untuk para karyawan dan bagi penduduk asli daerah Sorowako (KAWAS) Wasuponda, Wawondula, dan (PASITABE). PT. Inco Tbk. juga telah memediasi pakar kesehatan dengan tenaga medis dalam meningkatkan sumber

daya manusia; memediasi Penyuluhan terhadap penanganan HIV AID dan pemberantasan narkoba....” (Wawancara AHM, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 20 April 2009).

Salah seorang warga masyarakat yang ada di sekitar area tambang tersebut mengemukakan manfaat program CSR yang dilakukan oleh PT. Inco untuk bidang kesehatan. Berikut petikan wawancaranya :

“Untuk kesehatan, pada prinsipnya kami sebagai masyarakat cukup terbantu dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan PT. Inco. Semua masyarakat yang berobat di puskesmas tidak dipungut biaya apapun. Hanya saja jika keadaan pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, biasanya puskesmas akan merujuk pasien ke rumah sakit perusahaan. Disini prosedurnya mulai susah. Karena masyarakat yang non karyawan harus membayar deposit (pembayaran awal) dulu ke pihak rumah sakit atau ada karyawan perusahaan yang menjamin baru pihak rumah sakit mau menerima pasien tersebut, meskipun pasien tersebut ada surat rujukan dari puskesmas setempat”(wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009)

Terjadi pendikotomian dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang non karyawan dengan pelayanan kesehatan bagi staf/karyawan dan keluarganya. Untuk staf/karyawan dan keluarganya semua ditanggung oleh perusahaan dan dengan pelayanan yang terbaik sementara untuk masyarakat umum yang non karyawan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yakni untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumahsakit perusahaan, terlebih dahulu mendapatkan penjamin dari kalangan staf atau karyawan, jika hal ini tidak dapat dilakukan maka masyarakat, maka harus membayar deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- kepada pihak rumah sakit.

Bagi masyarakat non karyawan mengeluhkan prosedur seperti ini, bahkan menurut masyarakat hal ini memberatkan, sebagaimana petikan wawancara berikut :

“..Sebenarnya prosedur ini bagi kami, sangat berat karena harus mencari penjamin atau terpaksa harus membayar 1,5 juta untuk uang penjamin baru

pihak rumah sakit mau menerima pasien dari masyarakat (wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009)

”

Keadaan di atas, dimana terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara keluarga karyawan dengan masyarakat sekitar dalam hal standar pelayanan yang diterima masyarakat, khususnya dibidang kesehatan secara tersirat dari petikan wawancara di bawah ini, peneliti menilai bahwa terjadi kecemburuan sosial di masyarakat dengan adanya keadaan tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan salah seorang warga masyarakat yang berada di daerah pemberdayaan PT. Inco menyebut kata “mereka” untuk menunjuk keluarga karyawan perusahaan. Berikut petikan wawancaranya :

“..Kalo untuk karyawan, enak sekali karena mereka akan ditanggung oleh pihak perusahaan, mulai dari lahir sampai matinya sepanjang orang tuanya masih menjadi karyawan di perusahaan. Untuk pendidikan, mereka bebas memilih sekolah di mana pun mau di YPS atau di luar sorowako misalnya di Makassar atau di Jakarta, semuanya akan ditanggung oleh perusahaan. Begitu juga dengan jaminan kesehatannya. Mereka semua ditanggung oleh perusahaan...”(wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009)

Pengakuan dari masyarakat yang lainnya yang berada di sekitar perusahaan membenarkan kegiatan CSR perusahaan di bidang kesehatan, sebagaimana petikan wawancara berikut :

“.....Semua bidang diperhatikan. Tergantung dari hasil pembicaraan warga bersama pemerintah dan pihak perusahaan. Ada kegiatan di bidang pendidikan, ada di bidang pertanian, ada fasilitas kesehatan....” (wawancara N, Masyarakat, 26 April 2009).

4.2.1.3. Bidang Sarana dan Prasarana

PT. Inco telah mengambil sejumlah inisiatif dalam pengembangan program infrastruktur dan pelayanan publik, diantaranya adalah : penyediaan bus sekolah, pengumpulan sampah, pembangunan jembatan, perbaikan dan pengaspalan jalan untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil,

pendistribusian air bersih, lampu jalan, pengiriman generator ke desa-desa yang tidak mendapatkan listrik, dan perbaikan fasilitas saluran air (*drainase*).

Dalam pengadaan sarana dan prasarana, secara tegas pihak pemerintah menyatakan peranan atau manfaat yang diperoleh dari CSR PT. Inco. Berikut petikan wawancara dengan Bupati Kabupaten Luwu Timur :

“Seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, memang terkesan bahwa PT. Inco mengambil tugas dari pemerintah daerah dalam pengembangan masyarakat terutama pada penyediaan infrastruktur yang saat ini pemerintah daerah masih belum bisa menyediakannya dalam waktu cepat, akan tetapi kerjasama diantara kami sangat terjalin dengan baik. Hal-hal yang merupakan kewajiban dari pemerintah tetapi belum bisa dilakukan, dibantu oleh PT. Inco. Hal ini bukan karena paksaan atau tekanan dari pemerintah daerah untuk membebaskan kepada PT. Inco tetapi ini merupakan inisiatif dari pihak perusahaan (Wawancara AHM, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 20 April 2009).

Saat ini, PT. Inco lagi berkonsentrasi membangun proyek penyediaan lahan siap bangun bagi masyarakat Sorowako seluas 40 hektar, yang akan menampung keluarga-keluarga yang dipindahkan dari Desa Nikel, dan juga karyawan-karyawan PT. Inco. PT. Inco juga membangun fasilitas olah raga dan taman bermain yang dapat digunakan secara umum.

Selain itu PT. Inco juga membantu membangun fasilitas pendidikan antara lain dengan membangun sarana dan prasarana sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMA yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS) dan Institut Teknologi Sorowako (ITS) serta menyediakan angkutan bis sekolah. Dalam bidang Kesehatan PT. Inco membantu dalam pembangunan fisik puskesmas di semua daerah pemberdayaan beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada petikan wawancara berikut :

“...di semua daerah pemberdayaan, PT. Inco membangun puskesmas lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana penunjang lainnya. Pemda menempatkan

dokter-dokter dan tenaga kesehatan lainnya ...”(wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009).

“...selain itu juga ada bantuan fasilitas berupa mobil angkutan sekolah. Pihak perusahaan sebenarnya sudah menyediakan mobil angkutan sekolah untuk setiap daerah pemberdayaan...” (Wawancara RB, Masyarakat, 07 Juli 2009).

4.2.1.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Dalam bidang pertanian, Camat Nuha menyampaikan manfaat CSR di bidang Pertanian, berikut petikan wawancara dengan Camat Nuha:

“Juga di bidang pertanian, salah satu persoalan adalah masalah modal. Dengan adanya program pengembangan masyarakat PT. Inco, modal yang diperlukan bisa dibantu. Belum lagi dengan bantuan peralatan pertanian mekanis. Pendek kata, percepatan pembangunan bisa dilakukan karena ada program pengembangan masyarakat PT. Inco” (Wawancara AH, Pemerintah Kecamatan Nuha, 03 April 2009).

Di bidang pertanian, disusun paket program pengembangan usaha pertanian berupa pelatihan dan pengadaan sarana produksi pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat atau kelompok tani terhadap penguasaan teknologi, produktivitas, dan kemampuan berusaha ke arah kemandirian yang berkelanjutan.

Dilakukan juga upaya mengembangkan komoditas dan varietas unggul yang bebas residu pestisida berbasis agribisnis, memfasilitasi proses perencanaan dan pengelolaan sistem agrobisnis secara partisipatif (*participatory planing and management*), peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat atau kelompok tani, dan menciptakan sistem usaha tani yang ramah lingkungan. PT. Inco juga memberikan bantuan berupa pembangunan irigasi dan pintu air irigasi, pengadaan pembibitan, sarana produksi pertanian, serta pelatihan bagi petani lokal. Hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut :

“....PT. Inco membantu kami dalam bidang pertanian dengan mebangun sarana pengairan untuk pertanian masyarakat, dengan system pengairan yang

ada petani yang ada di daerah ini dapat melakukan aktivitas pertanian dengan system pengairan tersebut. Petani dapat panen sampai 4 kali dalam setahun. Selain itu juga petani mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari perusahaan....” (wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Di bidang peternakan dijalankan program pengembangan ayam dan sapi potong di Kecamatan Wasuponda. Sementara itu, untuk pengembangan bidang perikanan PT. Inco bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berhasil mengembangkan program “Regenerasi Nelayan”. Termasuk dalam program ini adalah pengadaan keramba jaring apung, serta budidaya rumput laut. Selain itu, juga dilakukan program yang bersifat *multiyears* untuk mendukung budidaya kepiting dan ikan kerapu dikawasan hutan bakau.

4.2.1.5. Bidang Pengembangan Usaha Lokal

PT. Inco percaya bahwa berkembangnya usaha lokal akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain itu, PT. Inco juga memberikan berbagai bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi. Salah satunya dengan diadakan pelatihan manajemen usaha, serta bantuan dalam modal usaha bagi pelaku UKM. PT. Inco juga memberikan pelatihan mengenai penyusunan anggaran dan pelaporan yang terkait dengan program pengembangan masyarakat.

Dari petikan wawancara dengan masyarakat yang berada di daerah pemberdayaan PT. Inco terlihat bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat dengan adanya bantuan perusahaan dalam bentuk bantuan untuk UKM dan koperasi bagi masyarakat setempat dalam bentuk bantuan modal dan pelatihan manajemen usaha sehingga masyarakat dengan adanya modal usaha bagi UKM dan koperasi tersebut masyarakat setempat dapat menjalankan roda usahanya dan juga mengembangkan usaha tersebut, berikut petikan wawancaranya :

“...kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari perusahaan yang memberikan bantuan modal bagi kami yang tergabung dalam koperasi sehingga usaha-usaha masyarakat seperti UKM mendapatkan bantuan modal usaha. Kami dapat tarus menjalankan usaha kami bahkan dapat

mengembangkan usaha tersebut. Selain bantuan modal usaha kami juga diberikan pelatihan-pelatihan dalam kaitannya dengan manajemen usaha dan pelaporan sesuai dengan standar yang dipakai oleh perusahaan”..... (wawancara MAI, Masyarakat, 07 Juli 2009).

Pemberian modal usaha kepada UKM sebagai program pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung bisnis atau usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat lokal sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu juga, dukungan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki usaha yang bermanfaat dan legal mengingat banyak masyarakat yang menjadi penambang liar ketika mereka terbelit masalah modal dan kekeringan pada saat musim kering. Diharapkan, semua usaha dan bisnis yang tumbuh dan berkembang berkat keberadaan tambang PT. Inco dapat berlanjut meskipun kegiatan tambang telah usai.

4.2.1.6. Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Perdamaian

Aspek sosial budaya tidak luput dari sentuhan program pengembangan masyarakat PT. Inco. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, PT. Inco senantiasa mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan seperti perayaan hari-hari besar nasional, pembinaan remaja melalui olahraga, dan festival Danau Matano, yang digelar setiap tahun dan menampilkan upacara *Meopudi* (menangkap ikan *Opudi*-spesies ikan endemik Danau Matano). Ritual ini merupakan budaya masyarakat setempat yang masih terpelihara secara baik hingga hari ini. Program-program lainnya meliputi bantuan untuk Kejuaraan Renang Air Terbuka Danau Matano Tingkat Nasional, yang tidak hanya merupakan kontribusi bagi pembangunan olahraga tetapi juga menggarisbawahi kepengurusan lingkungan oleh PT. Inco dalam melindungi Danau Matano.

Kepekaan perusahaan terhadap segala upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal tercermin pula dalam dukungan terhadap perayaan *Padungku* atau pesta panen, musik bambu dan pelestarian budaya *Pasitabe*, yang baru-baru ini menyelenggarakan seminar dan musyawarah adat. PT. Inco berharap, dengan kegiatan-kegiatan tersebut kebudayaan tiga etnis lokal (*Padoe*, *Karonsie*, dan *Tambe'e*) muncul kembali sebagai kekayaan budaya asli lokal.

Dalam hal budaya (dalam pemaknaan luas), dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua KAWAS (Kerukunan Warga Asli Sorowako), mengemukakan suatu refleksi dari dampak program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Inco, berikut petikan wawancaranya :

"Tantangan terbesar kami adalah bagaimana merubah pola kehidupan dari masyarakat yang sudah menjadi budaya di masyarakat. Contohnya adalah cara menanam padi. Pada dasarnya masyarakat disini sangat terbuka sekali terhadap perubahan cuma kadang karena keterbatasan SDM makanya mereka belum mengerti dan cenderung untuk menolak cara-cara baru dalam menanam padi. Oleh karena itu, program community development PT. Inco terhadap kami dilakukan dengan memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat seperti proyek sawah percontohan dengan padi organik. Pada awalnya masyarakat menolak tetapi ketika sudah melihat hasil yang diperoleh dan harga padi organik di pasar, sedikit banyak mereka sekarang telah berubah dengan sendirinya. Proyek padi organik ini telah dilaksanakan di semua daerah pemberdayaan masyarakat PT. Inco" (Wawancara A, LSM KAWAS, 06 April 2009).

Dukungan lain diberikan pada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), sebuah perkumpulan antar agama yang giat melakukan kampanye perdamaian. PT. Inco bersama FKUB terus-menerus mengkampanyekan kehidupan yang toleran, saling memahami, dan kerja sama di antara masyarakat Luwu Timur yang multi agama dan multi etnis. PT. Inco juga mengambil bagian dalam pemberian bantuan pada bencana-bencana nasional seperti Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta. PT. Inco dan Inco Limited menyalurkan bantuan senilai Rp.5 miliar. Sementara itu, sumbangan hasil pundi amal karyawan PT. Inco, masyarakat Sorowako dan sekitarnya, organisasi keagamaan, sekolah, serta mitra bisnis PT. Inco sebesar Rp.263.628.700 diserahkan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua Forum Sulsel Peduli Aceh.

4.2.1.7. Bidang Lingkungan

Realisasi program lingkungan hidup PT. Inco tahun 2006 adalah dengan cara melakukan dan memperbaiki sistem evaluasi pemantauan lingkungan. Program lingkungan hidup PT. Inco terutama difokuskan pada upaya penghutanan kembali, menjaga kualitas air, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Aktivitas penghutanan kembali berupaya untuk memulihkan kembali ekosistem dan tegakan seperti sedia kala, sehingga ragam flora dan fauna endemik Sulawesi tetap terjaga. Walaupun kita sadari semua, bahwa hutan tidak akan pulih 100% seperti sebelum penambangan tetapi usaha yang dilakukan PT. Inco sedikit banyak mengurangi dampak negatif dari operasinya terhadap lingkungan. Selain itu, aktivitas ini juga mampu membangkitkan kegiatan susulan berikutnya berupa kegiatan pembibitan, industri pendukung pembibitan, sarana pendidikan dan sarana rekreasi masyarakat sekitar. Program penghutanan kembali PT. Inco telah memperoleh pengakuan sebagai *benchmark* Internasional.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga kualitas air sebagai sumber kehidupan, PT. Inco melakukan proses pengolahan limbah air hasil tambang sehingga kualitas air yang dialirkan ke danau lebih baik dari batas aman yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, dalam rangka mengurangi emisi gas dan rumah kaca, PT. Inco telah memasang alat pengontrol debu dan penangkap debu sehingga emisi yang dikeluarkan turun dibawah ambang batas. Melalui berbagai upaya mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, PT. Inco berhasil memperoleh sertifikat ISO 17025 untuk Laboratorium Process Technology. Selain itu, PT. Inco juga memperoleh penghargaan emas dalam pengendalian sedimen dan erosi dari Departemen ESDM.

Hal ini diakui oleh Bupati Kabupaten Luwu dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“.....tidak dapat disangkal pula bahwa telah ada hal-hal yang dilakukan oleh PT. Inco Tbk. di Kabupaten Luwu Timur yang perlu diapresiasi dengan sebaik-baiknya, antara lain di bidang lingkungan hidup:

- a. PT. Inco Tbk. telah melakukan penanganan limbah pabrik dan limpahan lumpur dari kawasan tambang, yang hingga kini dapat dianggap cukup baik penanganannya, sehingga air danau di kawasan PT.INCO tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;
- b. PT. Inco Tbk. telah memasang penangkap debu pada pabrik pengolahan nikel mereka, sehingga dapat mengurangi debu yang bertebaran di atas wilayah pabrik dan sekitar pemukiman semaksimal mungkin.
- c. PT. Inco Tbk., sejauh ini telah melakukan penanganan reklamasi terhadap lokasi purna tambang dengan menanami kawasan tersebut dengan tumbuhan pioneer sehingga daerah purna tambang tidak terlihat gersang dan dapat dimanfaatkan kembali;
- d. PT. Inco Tbk. sejauh ini telah berupaya menyiapkan perencanaan komprehensif mengenai “pasca tambang 2025” yang dikenal dengan “Soft Landing Mining Closure 2025” melalui studi yang mendalam antara lain dengan melakukan studi banding di berbagai daerah yang telah mengakhiri tambang, termasuk pada kegiatan pasca tambang Vale di Brasil, sehingga mendapatkan Piagam Emas Lingkungan Pertambangan dan Penghargaan Tropi Aditama, karena konsep penanganan pasca tambang yang menjangkau masa depan dan integralitasnya dengan program pengembangan masyarakat...”(Wawancara AHM, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 20 April 2009).

4.2.2. Manfaat yang Diperoleh PT. Inco

Dalam menjalankan usaha tambang yang dilakukan oleh PT. Inco, komunikasi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan merupakan salah satu hal mendasar dalam keberhasilan dan kesuksesan perusahaan untuk mencapai visi-misi dan motif bisnisnya. Melalui program pengembangan masyarakat yang kemudian dikembangkan dengan mengadaptasi program CSR, PT. Inco dapat memperoleh manfaatnya. Melalui CSR yang diterapkan PT. Inco lebih mudah berkomunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara dengan Manajer Community Relation PT. Inco dapat tergambar bahwa konsep CSR yang “*bottom up*” menjadi syarat utama dalam menjalin kemitraan. Konsep ini

sekaliigus menganulir kepentingan orang per orang atau kelompok yang mengatasnamakan warga. Berikut petikan wawancara dengan SM:

“Secara mandatory (kewajiban), sumbangsih PT. Inco dalam pembangunan negara ini sudah sangat jelas. PT. Inco selalu membayarkan royalti, pajak, dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab PT. Inco sebagai konsekuensi dalam beroperasi di negara ini dengan tepat waktu. Bahkan PT. Inco saat ini telah bekerja secara “beyond regulation” dengan mengintegrasikan semua pemahaman mengenai konsep CSR sepanjang rantai pasokannya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sistem nilai-nilai yang dianut PT. Inco dengan sistem nilai yang diterapkan oleh mitra PT. Inco. Hal ini merupakan syarat utama dalam menjalin kemitraan dengan PT. Inco” (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2009).

Melalui promosi konsep CSR (paradigma baru) yang dijalankan oleh PT. Inco, efektifitas dan efisiensi sumberdaya perusahaan dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan dapat lebih sistematis, terarah, dan terukur. Melalui konsep CSR dan strategi digariskan melalui alur pemberdayaan serta implementasi program-program yang dirancang secara partisipatif, transparan dan akuntabel, PT. Inco mendapatkan manfaat pencitraan yang baik diberbagai kelompok kepentingan. Dengan strategi CSR tersebut, komunikasi dengan kelompok kepentingan menjadi lebih mudah dalam mewujudkan kemitraan yang diinginkan perusahaan. Dalam pandangan Perusahaan yang terekam dalam wawancara dengan Manager Community Relation PT. Inco, kemitraan merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan. Berikut petikan wawancaranya :

“...Kemitraan ini adalah suatu keniscayaan, karena tanpa kemitraan tiga pihak mustahil program-program pengembangan secara spesifik akan berhasil dengan baik. Secara umum, hubungan kerja sama antar perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat terjalin baik. masyarakat berkontribusi dengan terlibat dalam proses penjarangan kebutuhan yang kemudian akan menjadi program bersama antara PT. Inco dengan pemerintah daerah yang terlebih dahulu mensinergikan program dengan pembagian peran

masing-masing pihak sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pengembangan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan program-program perusahaan. Sejauh ini, PT. Inco tetap konsisten dalam mensinergikan program pengembangan masyarakat PT. Inco dengan program-program pembangunan pemerintah daerah (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2009)

Hal yang sama juga dipertegas oleh Bupati Luwu Timur dalam petikan wawancara pada tanggal 20 April 2009 sebagai berikut:

“...Dalam kaitan CSR, sesungguhnya keterlibatan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Masyarakat dengan PT. Inco Tbk. merupakan keharusan yang tidak terelakkan dan senantiasa harus diupayakan. Pada konteks perencanaan CSR, pihak PT. Inco Tbk. memiliki kewajiban untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, antara lain guna menghindari “tumpang tindih” perencanaan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk di wilayah operasi PT. Inco Tbk (Wawancara AHM, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 20 April 2009).

Namun dalam pelaksanaannya, menurut Bupati belum dapat disinkronkan dengan sebaik-baiknya yang disebabkan lemahnya koordinasi dan kerjasama. Dalam perencanaan terkesan perencanaan Pemerintah Daerah berjalan sendiri dan pihak PT. Inco.Tbk pun berjalan sendiri. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa lemahnya koordinasi dan kurangnya intensitas kerjasama disebabkan belum ada kesamaan persepsi dan pembagian peran yang jelas. Hal senada juga diperkuat oleh pernyataan pihak perusahaan dimana dalam pelaksanaan penjarangan kebutuhan (*need assessment*), pendekatan yang digunakan pihak perusahaan mengadopsi sistem *participatory (bottom up)* sedangkan pihak pemerintah daerah masih menggunakan sistem *top down*, bahkan dalam banyak program comdev perusahaan yang telah diterminasi dan diambilalih oleh pemerintah malah yang terjadi adalah program tersebut mandek atau terhenti.

Universitas Indonesia

“...Kemudian tantangan kedepan adalah model perencanaan dan penjangkangan kebutuhan yang berbeda sistemnya antara PT. Inco dengan Pemerintah Daerah. Dalam artian bahwa, PT. Inco sudah mengadopsi metode partisipatory (bottom up), kabupaten masih mengadopsi sistem yang top down dalam perencanaan program bahkan banyak program comdev dari perusahaan yang ketika diterminasi dan diambil alih oleh pemerintah daerah, program tersebut malah terhenti atau mandek (Wawancara SM, PT. INCO, 02 April 2009)

Walaupun masih ada kelemahan dalam kemitraan antara PT. Inco dengan Pemerintah Daerah, Bupati mencatat adanya kerjasama yang sudah terbangun lewat kemitraan ini. Berikut petikan wawancaranya :

“...Meskipun demikian, hingga saat ini, dapat dicatat adanya keterlibatan dan kerjasama antara para pihak, antara lain:

Penanganan keamanan dan ketentraman di wilayah tambang dari ancaman eksternal dan internal PT.INCO;

- a. Penanganan ketenagakerjaan baik asing maupun domestik;
- b. Bagi Hasil Scraft dalam peningkatan PAD di Kabupaten Luwu Timur;
- c. Penanganan pendidikan;
- d. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; Pengentasan Kemikiskinan” (Wawancara AHM, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 20 April 2009).

4.2.3. Manfaat yang diperoleh Karyawan

Dalam melaksanakan program CSRnya, PT Inco tidak hanya melakukan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat di sekitar PT. INCO tetapi juga terhadap karyawan. Pelaksanaan CSR untuk karyawan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perusahaan.

Selain fasilitas di bidang kesehatan dan pendidikan terutama untuk karyawan dan keluarga, karyawan juga ditingkatkan kapasitasnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang karyawan PT.Inco dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“.....Kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan di tahun 2008 setara dengan 42 jam pelatihan per karyawan. Perhatian khusus diberikan untuk meningkatkan keterampilan teknis bagi karyawan non manajerial, dan meningkatkan keterampilan manajemen para supervisor...”(Wawancara NZ, Karyawan PT. INCO, 21 April 2009).

Pada tahun 2009 ini, banyak kemajuan yang sudah terlihat dimana karyawan mencapai kemampuan teknis ke tingkat yang lebih baik, berdasarkan akreditasi nasional dan standar-standar internasional. Demikian menurut NZ dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“...pada tahun 2008, 25 pelatih dan koordinator pelatihan dan penilaian (sertifikasi pelatih dan penilaian professional). Karyawan kami di pabrik pengolahan, operasional tambang, utilitas dan rumah sakit telah menyelesaikan sekitar 800 program pelatihan. PT. Inco bekerjasama dalam mengembangkan dan menilai program-program pelatihan dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan dua lembaga pendidikan yaitu University of Victoria dan Hobart Institute di Australia (Wawancara NZ, Karyawan PT. INCO, 21 April 2009).

PT. Inco juga memberikan program-program pelatihan bagi kontraktor, 40 penyelia dan manajer proyek yang dipekerjakan oleh kontraktor-kontraktor menyelesaikan modul-modul pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Inisiatif ini akan terus dilanjutkan di tahun 2009.

BAB 5 PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan CSR PT. Inco

Merujuk pada rumusan visi PT. Inco *"Menjadi salah satu di antara produsen nikel utama terkemuka di dunia"*. Dengan Misi *"Mengembangkan sumberdaya Indonesia yang dipercayakan kepada kami sebaik-baiknya bagi manfaat semua pemangku kepentingan"*, PT. Inco menghendaki suatu harmoni antar berbagai kelompok kepentingan. Tidak hanya PT. Inco sendiri tetapi juga adanya keterlibatan antara negara, dunia usaha dan masyarakat sipil. Negara dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi perusahaan dan masyarakat sipil untuk berkembang dan menjalankan fungsinya, perusahaan memberikan keuntungan lewat pajak, retribusi dan kesempatan kerja kepada masyarakat sedangkan masyarakat sipil memiliki modal sosial untuk mengembangkan sikap saling percaya, kerjasama, toleransi (Ismid Hadad dalam Fajar Nursahid, Bab 2, h. 31). Dalam konteks CSR yang dilakukan oleh PT. Inco, maka perusahaan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Luwu bersinergi untuk mensejahterakan rakyat lewat kegiatan CSR. Pemerintah Luwu memberikan ruang bagi PT. Inco dan masyarakat agar program-program yang direncanakan terkoordinir dengan baik dan tidak memiliki perencanaan yang tumpang tindih. Masyarakat sudah menjadi bagian dari pemangku kepentingan PT. Inco dimana hal ini terwujud melalui perlakuan terhadap masyarakat melalui berbagai program, seperti tanggungjawab sosial dan pengembangan komunitas sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Nursahid (Bab 1, h. 10; Bab 2, h. 31) bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan begitu perusahaan berkewajiban menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat, bukannya malah merugikan para *stakeholder*-nya.

Pandangan PT. Inco terhadap pentingnya keterlibatan stakeholder masyarakat lebih dipertegas lagi secara utuh dalam visi pemberdayaan masyarakatnya, yakni "Tumbuh bersama masyarakat yang mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan". Dengan Misi "Memfasilitasi transformasi sosial dalam meningkatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan melalui asistensi teknis, tukar informasi dan diskusi publik, peningkatan kapasitas serta penerapan hasil-hasil penelitian secara berkelanjutan"

Berbeda pada fase sebelum tahun 2004 dimana pelaksanaan CSR PT. Inco masih bersifat karitatif, dimana pelaksanaan CSR lebih didasarkan atas desakan dan tekanan dari elit-elit masyarakat sekitar daerah tambang, bukan dari kesadaran atau dorongan yang berasal dari dalam perusahaan. Visi ini terutama didasarkan pada suatu analisa kondisi yang telah berkembang dalam memandang CSR tidak lagi dalam bentuk karitatif pada fase setelah tahun 2004. Merujuk pada pendapat Carrol (Bab 2, h. 49-51) yang membagi 4 (empat) tipe perusahaan dalam melaksanakan CSR sesuai dengan piramida CSR, maka pada fase ini perusahaan masih termasuk pada fase yang paling bawah, yakni hanya melakukan tanggungjawab ekonomi saja. Lebih lanjut menurut Carrol (Bab 2, h. 50), selayaknya perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya haruslah memahami piramida tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Atas kondisi tersebut PT. Inco berupaya mengadaptasi konsep CSR yang lebih maju, transparan, *bottom up*, dan demokratis (lihat halaman 77 – 78). Pada fase setelah tahun 2004, dengan melakukan perubahan paradigma dalam perencanaan pengembangan masyarakatnya (lihat hal 65) PT. Inco mulai mengadopsi konsep CSR dengan pendekatan yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dengan mengadopsi teknik PRA dan menjadikan program CSR mandat perusahaan sebagai konsekwensi kegiatan operasi pertambangan perusahaan di daerah tersebut. Program CSR tersebut selanjutnya diinternalisasikan ke dalam setiap mata rantai kegiatan operasional PT. Inco bahkan sampai pada kontraktor-kontraktor lokal yang menjadi mitra perusahaan dalam menjalankan bisnis pertambangannya.

Bila ditinjau dari pandangan Carrol (Bab 2, h. 50) dalam teori piramida CSR dimana tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Berdasarkan pandangan tersebut maka secara ekonomis, PT. Inco sebagai perusahaan haruslah menghasilkan laba dan merupakan hasrat yang natural dan primitif dari perusahaan sebagai penghasil laba. Pandangan ini merupakan pandangan *be profitable* (tanggungjawab ekonomi). Dengan adanya tanggungjawab ekonomi memungkinkan PT. Inco mengalokasikannya untuk kegiatan CSR. Untuk mendapatkan laba, maka PT. Inco juga harus taat terhadap hukum yang ada supaya proses memperoleh laba tidak merugikan pihak lain termasuk masyarakat. Dalam melakukan proses memperoleh untuk PT. Inco sebagai perusahaan tambang juga memperhatikan aspek lingkungan agar pengelolaannya tidak membawa dampak negatif terhadap negara maupun masyarakat. Hal ini yang disebut Carol sebagai pandangan *obey the law* (tanggungjawab secara hukum).

Lebih lanjut Carol (Bab 2, h. 49) juga mengatakan bahwa perusahaan juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang merupakan tanggungjawab etis sebuah perusahaan. Norma-norma masyarakat yang berlaku di sekitar PT. Inco menjadi acuan PT. Inco dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan PT. Inco. Hal ini juga tergambar dalam kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Inco, dimana sebelum melakukan kegiatan PT. Inco melakukan assessment terhadap masyarakat. Selain untuk melihat kebutuhan masyarakat, proses assessment ini juga tidak bisa berjalan tanpa melihat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga tergambar dari hasil wawancara dengan Bapak Andi, Ketua Kawas yang mengatakan bahwa kegiatan CSR PT. Inco disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pada tingkatan selanjutnya, PT. Inco juga telah melakukan tanggungjawab filantropis dimana perusahaan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya tanggungjawab filantropis ini tercermin dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, dimana terungkap bahwa dengan keberadaan PT. Inco melalui program-program CSR nya

telah banyak membantu masyarakat sekitar dan meringankan beban pemerintah daerah di 4 (empat) kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan PT. Inco yakni Kecamatan Nuha, Kecamatan Towoti, Kecamatan Wosponda dan Kecamatan Malili.

CSR merupakan suatu bentuk kepedulian yang didasari oleh 3 (tiga) prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yakni *profit*, *people* dan *planet* pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh PT. Inco namun belum sepenuhnya maksimal.

Bila dilihat dari pendapat Jeremy Moon (Bab 2, h. 41) yang mengelompokkan CSR ke dalam tiga gelombang, maka PT. Inco dalam melakukan program CSR masuk ke dalam gelombang kedua dan ketiga. Dalam gelombang kedua dan ketiga, perubahan paradigma CSR merupakan refleksi bagaimana bisnis dijalankan dan menjadi bagian *inheren* di dalam kebijakan dan praktik bisnis suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan SM (pihak perusahaan) yang mengatakan bahwa aktivitas CSR merupakan suatu aktivitas yang terintegrasi dalam operasi perusahaan. Hal ini berarti bahwa semua nafas operasi PT. Inco harus mencerminkan nilai-nilai luhur CSR. Lebih lanjut SM menegaskan bahwa semua departemen harus memiliki kontribusi terhadap CSR, bukan disederhanakan menjadi tanggungjawab bagian *Community Relation* saja.

Kesadaran tentang pentingnya implementasi tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat merupakan faktor yang mendorong PT. Inco untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan (*internal driven*). Dengan kebijakan yang terintegrasi dalam semua departemen dan mitra bisnis perusahaan serta penyelesaian dampak negatif dari perusahaan, keberhasilan program pengembangan masyarakat akan tercapai. PT. Inco juga menyadari bahwa untuk mewujudkan keberhasilan operasi diperlukan kemitraan yang kuat antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah. Kemitraan yang kuat itu dapat terjalin dengan komunikasi dua arah dan model pembangunan masyarakat yang partisipatif.

Secara konseptual dan praktis, CSR yang diselenggarakan oleh PT. Inco telah ada kemajuan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan konsep dan

praktek yang digunakan sebelum mengadaptasi konsep CSR terkini. Namun dalam hal memperbandingkan konsep dan praktek yang dilakukan masih terdapat bias dalam hal pengertian CSR. Hal ini terekam dalam pandangan SM, Manajer *Community Relation* PT. Inco pada wawancara yang dilakukan (lihat halaman 78)

Pemahaman tersebut menjadi bias sebab memposisikan warga sebagai subjek yang memiliki ketergantungan pada perusahaan. Bila dicermati secara lebih objektif, bahwa ketergantungan pada perusahaan tidak saja terletak pada warga yang menerima manfaat dari beroperasinya tambang, tetapi juga pihak perusahaan tergantung pada potensi tambang masyarakat dalam upaya mendapatkan keuntungan dari bisnis pertambangan tersebut. Pengertian yang demikian merupakan kemunduran dalam hal pemahaman terhadap tanggungjawab sosial pada awal perkembangannya yang berdasarkan motivasi *charity* dan kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial* dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekedar *do good* dan *to look good* (berbuat baik agar terlihat baik). Berdasarkan tujuan CSR maka perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori perusahaan *impresif* yang lebih mementingkan tebar pesona (promosi) ketimbang tebar karya (pemberdayaan) (Suharto, Bab. 2. h, 43).

Hal tersebut juga sesuai dengan harapan Bupati Kabupaten Luwu agar program CSR yang dilakukan oleh PT. Inco benar-benar meletakkan kerangka CSR di atas kepentingan daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah operasi perusahaan dan daerah Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, bukan semata-mata untuk kepentingan "peningkatan citra perusahaan" saja.

Menurut Suharto (Bab 2. h, 31) CSR dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* namun dapat pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk secara terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggungjawab ke CEO atau ke dewan direksi. Hal yang berbeda terjadi pada perusahaan PT. Inco dimana pelaksanaan CSR secara eksternal dalam hal ini untuk masyarakat dan pemerintah menjadi kewenangan Departemen *External Relation*, sedangkan untuk pelaksanaan CSR secara internal seperti peningkatan kapasitas dan performa karyawan, merupakan kewenangan departemen *Human Resource Development*.

Sesuai dengan hasil penelitian, dalam melakukan CSR PT. Inco telah melakukan kegiatan CSRnya dengan dua paradigma yang mereka sebut paradigma lama yakni penerapan CSR sebelum tahun 2004 dan paradigma baru yakni penerapan CSR yang dimulai tahun 2004 hingga sekarang. Dalam paradigma lama, penerapan CSR dengan pendekatan *top down*. Program yang muncul adalah berdasarkan usulan-usulan para kontraktor-kontraktor yang mencari peluang dari proyek-proyek pengembangan masyarakat PT. Inco. Dengan demikian usulan tersebut mengandung kepentingan *elite* yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas, dan sering kali para elit menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak perusahaan dengan mengatasnamakan rakyat. Disini kita dapat melihat bahwa strategi perusahaan dalam melaksanakan CSR hanya berdasar atas desakan dan tekanan dari kelompok masyarakat, bukan lahir dari kesadaran perusahaan. Pada fase ini CSR hanya dilakukan atas dasar belaskasih perusahaan saja. Disamping itu, CSR pada fase ini hanya merupakan candu bagi masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Suharto (Bab 2, h, 25) dimana CSR dapat berubah menjadi sandera (menjadi alat bagi masyarakat untuk memeras perusahaan). Jika ditinjau dari sisi perusahaan menurut Stainer (Bab 2, h, 35) seringkali motif kedermwanaan sosial perusahaan tidak didasarkan atas panggilan tanggungjawab sosial. Sehingga lebih lanjut menurut Stainer yang membagi dalam 5 tipologi perusahaan dalam memerikan kedermwanaan sosial, maka perusahaan pada fase ini masuk dalam kategori *charity*, *image building* dan *security*.

Dalam paradigma baru, pendekatan ini berubah dengan melakukan pendekatan *bottom up* yang menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendekatan ini bertitik tolak pada pendekatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga metode yang digunakan dalam perencanaan program adalah metode yang partisipatif. Dalam paradigma baru ini, program langsung direncanakan dan diterapkan bersama-sama masyarakat tanpa melibatkan kontraktor-kontraktor. Keputusan perencanaan dan pelaksanaan program diintegrasikan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah sehingga sebisa mungkin tidak terjadi tumpang tindih.

Bila merujuk pada pendapat Supomo (Bab 2. h, 46) dimana CSR yang baik memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*, secara harmonis. Tiga prinsip utama yakni *fairness*, *transparency* dan *accountability* cenderung merupakan kepentingan *shareholder* sedangkan prinsip ketiga *responsibility* berkaitan dengan kepentingan mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan yang disebut sebagai *stakeholder*. *Stakeholders* perusahaan dapat mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku regulator. Program CSR yang dilakukan oleh PT. Inco telah memadukan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan programnya, prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel merupakan prinsip yang digunakan sejak saat perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring. Secara umum ada empat tahapan yang dilakukan oleh PT. Inco dalam melaksanakan program CSRnya.

Tahap pertama merupakan tahap persiapan dan konsolidasi. Pada tahapan ini PT. Inco menjelaskan perubahan paradigma dan pendekatan yang akan dilakukan yakni pendekatan *bottom up*. Hal ini merupakan pendekatan awal agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Dengan demikian diharapkan akan terangun pemahaman, penerimaan dan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Menurut Suharto (Bab 2. h, 47), tahapan ini disebut tahapan *Engagement* yang merupakan modal sosial yang bisa dijadikan dasar untuk membangun kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

Tahapan kedua yang dilakukan oleh PT. Inco adalah tahap pemetaan kebutuhan secara partisipatif. Menurut PT. Inco dalam bab sebelumnya, tahapan ini sangat penting karena melibatkan seluruh *stakeholder* di masyarakat. Tahapan ini merupakan proses identifikasi masalah dan kebutuhan yang akan dijadikan merumuskan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan ini tidak hanya milik masyarakat semata, tetapi menjadi milik desa yang akan tercermin dalam visi, misi serta perencanaan desa. Karena program ini partisipatif, maka alat-alat yang digunakan untuk identifikasi permasalahan dan

kebutuhan juga harus partisipatif. PT. Inco menggunakan alat-alat PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dapat merangkul kebutuhan masyarakat.

Lebih menarik lagi, proses ini tidak hanya sekedar merangkul kebutuhan masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran di tingkat masyarakat bahwa mereka tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga subjek pembangunan.

Menurut Suharto (Bab 2. h, 47), tahapan ini disebut tahapan *assessment* dan bila dilihat dari tahapannya maka dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil dari *assessment* ini adalah perencanaan aksi (*Plan of action*) di tingkat desa baik jangka pendek, menengah dan panjang. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan (*shareholders*) di pihak lain.

Tahapan berikutnya adalah *action in facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Tahapan ini dilakukan oleh PT. Inco dengan melakukan pendampingan tahap I terhadap masyarakat. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam menentukan kriteria penerima manfaat, penyusunan usulan kegiatan ke PT. Inco. Pendampingan (fasilitasi) yang dilakukan oleh PT. Inco diharapkan akan memampukan masyarakat mengelola program di tingkat komunitas serta mampu menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan ke PT. Inco. Dengan demikian model yang diterapkan PT. Inco merupakan program yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Pendampingan Tahap II dimana pada tahapan ini PT. Inco membantu masyarakat dan pemerintah desa membangun sistem dan implementasi program pengembangan masyarakat yang telah direncanakan secara partisipatif. Pada tahapan ini proses penguatan masyarakat dilakukan agar dapat secara mandiri melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Pada tahapan ini monitoring dan evaluasi menjadi bagian pelaksanaan program CSR dalam pendampingan tahap II.

Jika merujuk kepada wawancara dengan warga, problem utama mereka ada pada kondisi pasca tambang. Dalam menghadapi hal ini PT. Inco telah mengintegrasikannya pada konsep CSR dengan program penghutan kembali.

Program ini melibatkan warga sekitar, yang pada akhirnya dapat membangkitkan kegiatan ikutan yang bernilai ekonomis, antara lain dalam hal penyediaan bibit. Bagian ini merupakan salah satu *exit strategy* yang dilakukan oleh PT. Inco apabila ada pengakhiran kontrak pihak-pihak yang terlibat. Menurut Suharto (Bab 2. h, 46, 48) bila akan dilakukan terminasi terhadap program maka diperlukan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. *Exit strategy* ini mengacu terhadap hasil monitoring dan evaluasi serta keberadaan PT. Inco di masa yang akan datang sehingga masyarakat tidak mengalami ketergantungan terhadap perusahaan. Pemilihan *exit strategy* yang tepat tentunya akan sangat membantu masyarakat menjadi mandiri dan mampu menjadi kader yang selanjutnya dapat pula melakukan fungsi-fungsi pendampingan bagi masyarakat yang lain. Salah satu contoh bentuk *exit strategi* yang dapat dilakukan perusahaan ketika sebuah program akan di terminasi atau di reformasi yakni dengan memberikan *training of trainer* (TOT) kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang nantinya akan melanjutkan program yang diterminasi tersebut.

Hal ini juga untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap PT. Inco karena sumberdaya alam adalah terbatas. Dari sudut pandang perusahaan, sangatlah jelas bahwa ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan tidak diinginkan, karena dapat membebani perusahaan terus-menerus dan merupakan pertanda hubungan yang memburuk antara perusahaan dan masyarakat. Program pengembangan masyarakat yang berhasil haruslah menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat, dengan sedikit demi sedikit mengurangi beban perusahaan untuk berhubungan dengan kelompok masyarakat itu. Dalam hal ini, perusahaan perlu menciptakan program-program yang memang dirancang untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat sasaran, sehingga sumberdaya yang bersedia dicurahkan oleh perusahaan dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat atau wilayah lain.

5.2. Manfaat yang diperoleh masyarakat dan PT. Inco

Banyak hal yang telah dilakukan oleh PT. Inco melalui program pemberdayaan masyarakat. Realisasi program tersebut tentunya suatu perkembangan yang sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama oleh masyarakat sekitar.

Merujuk pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka PT. Inco telah mendapat tempat di hati masyarakat. Masyarakat sudah merasakan manfaat program CSR PT. Inco dan hal ini juga terungkap dari pernyataan masyarakat dalam petikan wawancara di atas. Dengan demikian sudah terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan PT. Inco yang merupakan salah satu modal sosial bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Akibatnya selama 40 tahun berada di daerah Sulawesi Selatan, perusahaan ini hampir tidak pernah mendapat penolakan (konflik) dari masyarakat sekitar tambang. Keunikan itu adalah penduduk asli maupun penduduk pendatang, hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Juga patut dikemukakan adalah tidak ada batas fisik yang menghalangi antara perumahan karyawan atau fasilitas pendukung PT. Inco dengan masyarakat setempat termasuk penggunaan aparat keamanan yang berlebihan untuk mengamankan fasilitas vital PT. Inco.

PT. Inco bersungguh-sungguh dalam menjaga keadaan ini dan tidak berkeinginan untuk menghancurkan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, PT. Inco mendesain program pengembangan masyarakat yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mengakomodir semua kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan *community development* banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* selanjutnya menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR (Suharto, Bab 2. h, 31).

Manfaat lain yang diperoleh PT. Inco adalah adanya tenaga kerja yang terlatih yang pada akhirnya bermanfaat bagi penambahan karyawan di tingkat PT. Inco. Dalam program CSRnya, masyarakat lokal dilibatkan dalam program pendidikan yang dikenal dengan nama Program Pelatihan Industri (PPI) yang sudah berlangsung selama 24 tahun. Tidak hanya lewat PPI, tetapi masyarakat juga sudah dibantu dalam pendidikan formal hingga jenjang doktoral (S3). Lewat program ini masyarakat merasakan manfaatnya, salah satunya menjadi karyawan di PT. Inco. Hal ini juga tergambar dari hasil wawancara manfaat PT. Inco bagi masyarakat.

Bagi PT. Inco, program ini merupakan manfaat di bidang *Human resources* yang membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Sedangkan bagi karyawan, manfaat program CSR juga dirasakan adanya peningkatan kapasitas lewat pengembangan sumberdaya manusia. Bila sudah ada peningkatan kapasitas, diharapkan akan ada peningkatan karir dan pendapatan. Di satu sisi, PT. Inco akan merasakan dampak adanya karyawan yang tangguh dalam menjalankan bisnisnya.

Program CSR PT. Inco juga telah mendorong pemerintah untuk memberikan ijin dalam menjalankan bisnisnya. Bila dilihat dari kegiatan utama PT. Inco yakni pertambangan, tentu saja hal ini akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Bisa dikatakan, apabila penambangan telah berakhir akan meninggalkan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Tetapi hal ini tidak akan dilakukan oleh PT. Inco karena PT. Inco telah membuktikannya lewat program-program pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berdampak terhadap masyarakat. Perusahaan memperoleh *license to operate*. PT. Inco telah menjalankan CSR dan dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan ijin atau restu bisnis, karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

Selain itu, program CSR ini juga merupakan salah satu bagian dari *Risk Management* yang akan memberikan citra yang baik bagi PT. Inco dalam mengelola risiko-risiko bisnisnya. Hubungan kemitraan antara PT. Inco, masyarakat dan pemerintah harus ditingkatkan untuk memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Menurut Wilson (Bab 2. h, 34) hubungan integratif antara pemerintah (negara) dan dunia usaha dalam melihat berbagai persoalan masyarakat dijelaskan oleh teori *welfare system* yang berpandangan bahwa negara dan dunia usaha (bisnis) berusaha bersama-sama mengentaskan kemiskinan karena kemiskinan dipandang sebagai bagian dari ketidak beruntungan masyarakat.

Namun demikian harus diakui bahwa dari pelaksanaan CSR perusahaan utamanya dalam bidang kesehatan masih terlihat ketidakpuasan masyarakat atas program tersebut. Dari petikan temuan lapangan terlihat bahwa secara umum masyarakat terbantu untuk pelayanan di bidang kesehatan akan tetapi hanya

sebatas di tingkat puskesmas saja, karena apabila kondisi kesehatan mereka tidak bisa di tangani di puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit perusahaan, maka mereka mulai terbentur dengan aturan yang ada. Dari petikan wawancara tersebut terlihat bahwa masih terjadi pendikotomian pelayanan kesehatan antara masyarakat umum yang non karyawan dan keluarga staf/karyawan perusahaan, dimana masyarakat hanya dapat berobat di puskesmas, sedangkan pihak keluarga karyawan di rumah sakit perusahaan. Bagi masyarakat, keadaan ini sebenarnya sangat berat, mengingat masyarakat yang berada di sekitar daerah pemberdayaan PT. Inco pada umumnya tergolong dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah (lihat hal 94).

Pelaksanaan CSR PT. Inco pada prinsipnya telah membangun hubungan kemitraan antara pihak perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan. Menurut Daniri (Bab 2. h, 46) program CSR yang baik setidaknya akan memberikan peran kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan elemen masyarakat, perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR sehingga sinergisitas yang terbangun dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif, dan mandiri, dan bagi pemerintah daerah program CSR perusahaan dapat membantu meringankan peran dan tanggungjawabnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari temuan lapangan dimana 4 (empat) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah sasaran Comdev PT. Inco. Kehadiran comdev PT. Inco ini sedikit banyak telah membantu pemerintah setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hubungan kemitraan tersebut belum sepenuhnya terjalin dengan baik sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Luwu Timur dan Manager *Community Relation* PT. Inco. Menurut Bupati Luwu Timur, hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi dan pembagian peran yang kurang jelas antara PT. Inco dan Pemerintah Daerah. Sementara menurut Manager *Community Relation* PT. Inco, program comdev perusahaan setelah terminasi dan yang selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Daerah, ternyata program tersebut menjadi mandek atau terhenti. Disamping itu juga perbedaan sistem penjangkaran kebutuhan antara PT. Inco dan

pemerintah daerah berbeda dimana PT. Inco telah mengadopsi sistem partisipatori (*bottom up*), hal ini dapat dilihat pada strategi yang dilakukan oleh perusahaan pada program comdev yang dimulai dari tahap persiapan dan konsolidasi desa, tahap pemetaan kebutuhan secara partisipatif, tahap penyusunan strategi atau rencana tindak lanjut sampai pada tahap implementasi. Sedangkan pemerintah daerah masih menggunakan sistem *top down* dalam artian bahwa dalam penjangkaran memang dimulai dari desa (MUSRENBANGDES) dilanjutkan ke tingkatan kecamatan dan kabupaten melalui BAPPEDA yang selanjutnya dinegosiasikan dengan panitia anggaran di DPRD. Sehingga sebuah program sangat ditentukan oleh proses negosiasi antara eksekutif dan legislatif di tingkat atas.

Kondisi di atas seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Inco agar mempersiapkan *exit strategy* yang lebih tepat dengan pihak-pihak yang terlibat. Menurut Suharto (Bab 2. h, 47, 48) salah satu penilaian keberhasilan pelaksanaan program CSR adalah dengan melakukan *evaluation and termination or reformation*. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak yang terlibat misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat dan atau pemerintah yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan, maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan peneliti dalam memperoleh data primer untuk penelitian ini. Hal ini disebabkan antara lain keterbatasan akses peneliti di perusahaan, kecenderungan pihak perusahaan yang berkeberatan jika peneliti melaksanakan wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer. Menurut peneliti, keterbatasan penelitian sangat penting untuk diungkapkan agar pembaca dapat memahami hal penelitian ini berdasarkan konteks situasi dan kesulitan selama pelaksanaan di lapangan.

Hal lain yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini adalah tidak didapat informasi yang akurat tentang besaran prosentase anggaran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR dan sumber pembiayaan tersebut diambil dari keuntungan bersih atau keuntungan kotor perusahaan. Hal ini mengakibatkan peneliti tidak dapat melakukan analisis tentang kategorisasi perusahaan dalam pembiayaan CSR nya sebagaimana Suharto (Bab 2, h, 44 - 45) memberikan kategorisasi perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR.

Hal yang terkait adalah bagaimana pelaksanaan CSR secara internal dalam hal ini perlindungan dan jaminan keselamatan kerja karyawan, prosedur kerja perusahaan berkaitan dengan pengelolaan tambang, limbah dan lingkungan, dan lain-lain, peneliti tidak mendapatkan akses yang lebih besar untuk melakukan observasi dan wawancara selain di Departemen *External Relation* PT. Inco. Pertanyaan wawancara yang diperuntukkan untuk CEO perusahaan dan Departemen HRD yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR, terutama yang berkaitan dengan CSR internal tidak dapat dianalisis lebih lanjut oleh peneliti, sebagaimana Carrol (Bab 2, h, 49) menyebutkan bentuk tanggungjawab perusahaan yang meliputi antara lain tanggungjawab Ekonomis (mencari keuntungan untuk kelangsungan dunia usaha), tanggungjawab legal (taat dan tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku), dan tanggungjawab etis (menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*).

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

CSR merupakan suatu komitmen dari dunia usaha untuk bertindak secara etis dengan memberi kontribusi bagi pengembangan masyarakat di sekitar operasionalisasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak semata mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya sebagaimana yang dikatakan Elkington sebagai *triple bottom line* yaitu perhatian pada *profit*, *people* dan *planet* (mencari keuntungan, memperhatikan masyarakat dan lingkungan alam sekitar perusahaan).

Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Perusahaan Tambang ini dilaksanakan di PT. Inco yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan yakni *pertama*, untuk menjajaki pelaksanaan CSR PT. Inco, *kedua* untuk menjajaki manfaat yang diperoleh masyarakat dan pihak perusahaan pada penerapan konsep CSR tersebut. Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan konsep CSR PT. Inco di daerah Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil temuan lapangan dan analisis peneliti sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagaimana di bawah ini.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan visi dan misi PT. INCO serta visi dan misi pemberdayaan masyarakatnya, maka perusahaan menggunakan sumberdaya yang ada untuk dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, keterlibatan perusahaan, negara dan masyarakat untuk kesejahteraan bersama merupakan suatu modal untuk membangun sebuah hubungan yang harmoni.

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Inco melakukan perubahan mendasar dari segi perencanaan dengan mengganti paradigma pemberdayaan masyarakat dari *top down* menjadi *bottom up* yang selanjutnya diinternalisasikan ke dalam seluruh departemen yang ada di perusahaan termasuk mitra bisnis perusahaan, sehingga CSR bukan saja menjadi tanggungjawab Departemen *Community Relation* tapi semua departemen memberikan kontribusinya. Selanjutnya PT. Inco merekrut tenaga-tenaga profesional dari latar belakang NGO, mantan aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat dari daerah tersebut untuk selanjutnya ditepatkan sebagai tenaga *comdev*.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT. INCO telah menerapkan Teori Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis). Pada awalnya ketika fase sebelum tahun 2004 masih berada pada tahap filantropis saja dan fase setelah tahun 2004 telah melaksanakan CSR dengan melihatnya sebagai satu kesatuan.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *top down* pada fase sebelum tahun 2004, sedangkan pada fase setelah tahun 2004 PT. Inco melakukan pendekatan *bottom up* yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat di sekitar tambang yang dimulai sejak perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan demikian program-program CSR PT. Inco dirasa telah menjawab kebutuhan dan permasalahan mendasar dari masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kegiatan-kegiatan seperti penjarangan kebutuhan (*need assessment*), program pendampingan tahap I, dan program pendampingan tahap II, dinilai telah merubah paradigma lama dalam pembangunan maupun pelaksanaan program pengembangan masyarakat, dari program yang berdasarkan keinginan sekelompok kecil elite masyarakat menjadi program yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Selain melaksanakan kewajibannya melalui program CSR, perusahaan juga tidak lalai terhadap kewajibannya kepada Negara dalam membayar pajak kepada Negara dalam bentuk royalti, pajak, retribusi dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat, dengan adanya program CSR dari PT. Inco, masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung merasakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian serta saran

dan prasarana. Dalam bidang pendidikan masyarakat mendapatkan bantuan beasiswa bag masyarakat yang berada di daerah pendampingan PT. Inco, selain itu juga disediakan fasilitas angkutan sekolah dari perusahaan dan pembangunan fasilitas sekolah untuk menunjang peningkatan kualitas proses belajar-mengajar. Untuk bidang kesehatan, dengan kerjasama antara PT. Inco dan pemerintah daerah setempat, masyarakat menikmati pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas yang ada di daerah pemberdayaan PT. Inco. Bidang pertanian, masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan untuk petani, pemberian pupuk dan pembangunan sarana irigasi, sehingga pendapatan petani di daerah tersebut dapat meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya program CSR dari perusahaan.

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan adanya program CSR ini adalah adanya pencitraan yang baik di masyarakat, tersedianya karyawan yang handal (*human resources*), memperoleh ijin untuk tetap beroperasi dari perusahaan dan mengurangi risiko perusahaan. Bagi masyarakat, kehadiran PT Inco lewat program CSRnya dirasakan sangat bermanfaat karena adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lewat penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sarana dan prasarana, lingkungan.

6.2. Saran

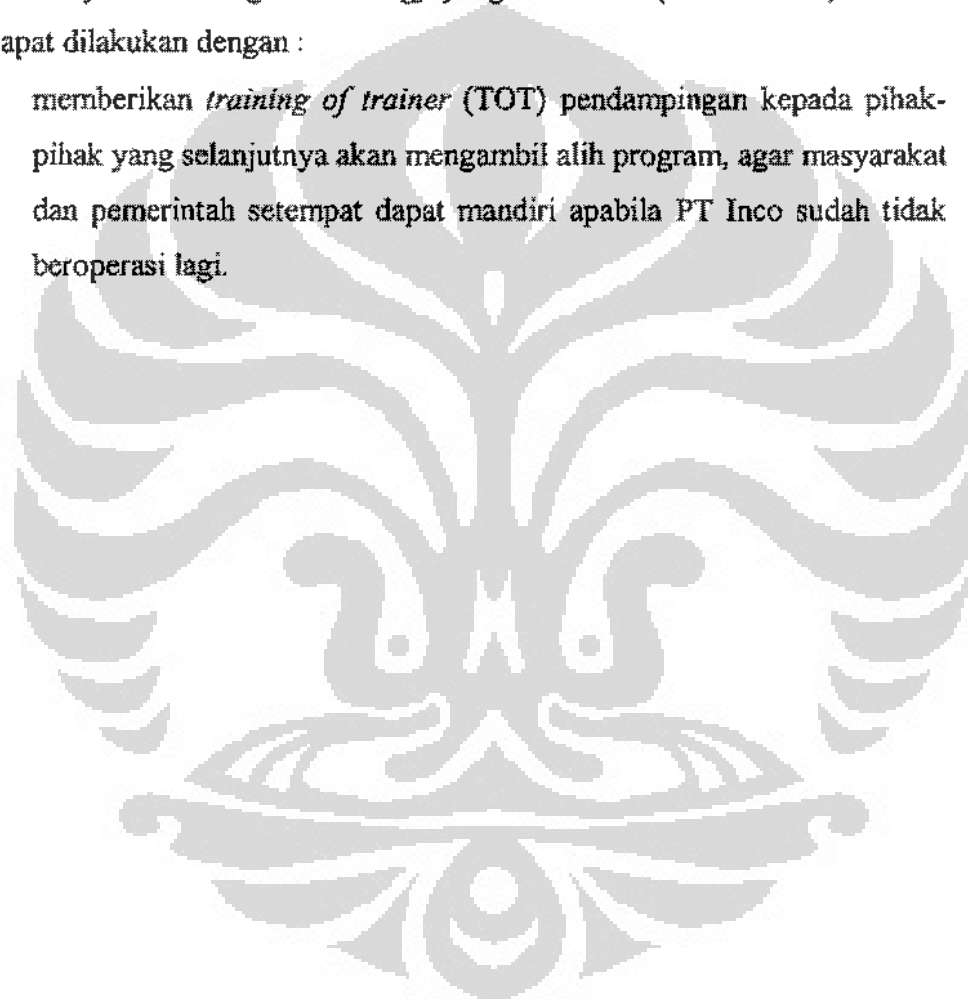
Dari hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan masukan atau saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah operasi PT. Inco terdapat di 3 (tiga) propinsi yang berbeda yakni Sulawesi selatan, Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara, sehingga secara otomatis juga masyarakat di daerah tersebut berbeda secara adat dan budaya. Perbedaan kultur masyarakat yang dihadapi tentunya akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, sehingga antara pihak perusahaan, masyarakat dan pemerintah serta kondisi lingkungan yang ada tetap dalam keadaan kondusif untuk bisnis perusahaan pertambangan ini (lihat hal 55). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- Melakukan kajian awal tentang kultur masyarakat setempat termasuk di dalamnya melakukan pengkajian nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat.
 - Bersama-sama dengan masyarakat setempat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat) membentuk forum bersama antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
2. Untuk menghindari tumpah tindih program antara PT Inco dengan Pemerintah Daerah, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi, atau pembagian peran sehingga target sasaran program atau desa atau kecamatan tidak mendapat program yang sama dari dua sumber yang berbeda (lihat hal 98). Hal ini dapat diminimalkan dengan cara :
- membentuk forum *regular meeting* antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan program pendampingan masyarakat dari pihak perusahaan dan program-program serupa dari pihak Pemerintah daerah.
 - Dalam pelaksanaan MUSRENBANGDES bukan hanya antara pihak pemerintah dan masyarakat tapi pihak perusahaan juga dilibatkan sehingga terjadi sinergisitas antara perencanaan program pemerintah dengan pihak perusahaan.
 - dengan demikian dapat dilakukan pembagian peran antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah.
3. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit perusahaan bagi masyarakat yang non karyawan, kiranya pihak perusahaan memberikan kelonggaran, mengingat keterbatasan pelayanan di puskesmas dimana seringkali pasien yang tidak dapat ditindak di puskesmas, selanjutnya akan dirujuk ke Rumah Sakit perusahaan (lihat hal 89, 90). Kelonggaran tersebut antarlain berupa :
- Bagi pasien yang berasal dari masyarakat dampingan PT. Inco, diberikan kelonggaran dengan memberikan syarat administrasi seperti surat rujukan dari puskesmas setempat dan surat keterangan

berdomisili di daerah pendampingan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat.

- Memberikan persyaratan lain misalnya untuk setiap masyarakat yang dapat menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah setempat seperti kelurahan/desa.
4. Mengingat terbatasnya sumberdaya alam (tambang) yang saat ini merupakan bisnis PT. Inco, maka program-program CSR PT Inco sebaiknya merancang *exit strategy* yang lebih baik (lihat hal 113). Hal ini dapat dilakukan dengan :
- memberikan *training of trainer* (TOT) pendampingan kepada pihak-pihak yang selanjutnya akan mengambil alih program, agar masyarakat dan pemerintah setempat dapat mandiri apabila PT Inco sudah tidak beroperasi lagi.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU-BUKU

- Aditjondro, George Yunus. (2006). *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa*. Yogyakarta : LKIS.
- Blakemore, Ken. (1998). *Social Policy: An Introduction*. Buckingham United Kingdom : Open University Press.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. (1984). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke teori dan Metode*. Jakarta : PAU-UT.
- Bourdieu, P. (1990). *Social Space and The Genesis of Classes*. Cambridge.
- Carrol, Archie B. (1996). *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*. Ohio, USA : South Western College Publishing.
- Chambers, Robert. (1996). *PRA Participatory Rural Appraisal; Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Penerbit kanisius.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Daniri, Ahmad. (2008). *Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Galang : Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Pirac.
- Denzin, Norman K., dan Yona S. Lincoln. (1985). *Handbook of qualitative Research*. Thousand Oaks. London : Sage.
- Elkington, John. (1998). *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Gabriola Island, BC : New Society Publishers.
- Gibbs, C.J.N. dan D. W. Bromley. (1989). *Institutional arrangements for management of rural resources : Common property regimes*. In F. Berkes (ed.) *Common Property Resources: Ecology and community-based sustainable development*. London : Belhaven Press.
- Giddens, Anthony. (1995). *Politics, Sociology and Social Theory*. London : Stanford University Press.
- Hendrarso, Emy Susanti. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Editor Bagong Suyanto & Sutinah. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
- Irawan, Prasetya. Dr. Msc. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk*

Ilmu-Ilmu Sosial. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Jhamtani, Hira dkk. (2006). *Politik Lingkungan Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Jakarta : Ford foundation.

Jones, Gareth R. (2001). *Organization Theory*. New Jersey, USA : Prentice-Hall, Inc.

Locke, E. A., dan Schweiger, D.M. (1979). *Participation in Decision Making: One More Look. Research in Organizational Behavior*. Greenwich, CT : JAI Press.

Marshall, Cathrine dan Rossmann Gretchen B. (1989). *Designing Qualitative Research*. London : Sage.

Mauss, Marcell. (1992). *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Jakarta : Yayasan Obor. (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia).

Miller, Lawrence M. (2001). *Vision of a New Corporate Culture*, dalam William Du Bois and R. Dean Wright. *Applying Sociology: Making a Better World*, Needham Heights, MA, A Pearson Education Company.

Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Tjetjep Rohendi Rohidi, Penerjemah)*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Mishra, Ramesh. (2002). *Globalization and the Welfare State*. London : McMillan.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Morimoto, Ash dan Hope .(2004). *Corporate Social Responsibility Audit : From Theory to Practice*. Cambridge : The Judge Institute of Management, University of Cambridge

Neuwman, W, Lawrence. (2000). *Sosial Research Methods Quantitative & Qualitative Approaches*. A Pearson Education Company, Needham Heights.

Nugroho, Yanuar. (2003). *Demokratisasi Kekuasaan Bisnis: Sebuah Pegangan Bagi Aktiuis Sosial*. Salatiga : Widya Sari Press.

Nursahid Fajar. (2006). *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta : Piramedia.

- Pambudi, Teguh Sri. (2005). *CSR Sebuah Keharusan dalam Nugraha, Setia Benny dkk.,ed. Investasi Sosial*. Jakarta : Puspensos.
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Newbury Parks : Sage Publicatios Inc.
- Saidi, Zaim, dkk (2003). *Sumbangan Sosial Perusahaan; Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia; Survei 226 Perusahaan di 10 Kota oleh PIRAC*. Jakarta : Ford Foundation.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Piramedia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1981). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sitorus. (1998). *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor : Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.
- Suharto, Edi. (2005). *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung : Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik : Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Sukada, Sony, dkk. (2008). *Membunikan Bisnis Berkelanjutan : Memahami Konsep dan Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta : Indonesia Business Links.
- Suprayitno,G., et.al. (2004). *Good Corporate Governance : Learning Toward A New Stage*. Jakarta : The Indonesia Institute for Corporate Governance.
- Suyatno, Bagong, dkk. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.

- Stainer, George A. dan John F Stainer. (1994). *Business, Government, and Society : a Managerial Perspective*. Text and Cases. Singapore : McGraw-Hill Book Co.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to qualitative research methods : The search for meanings*. New York : John Wiley & Sons.
- Tanaya, Jimmy. (2004). *Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) : Sebuah Pengantar*. Surakarta : The Business Watch Indonesia.
- Velasco, Gisela T. (1996). *Overview of Organize Philantropy in the Philippines*, dalam Tadashi Yamamoto, *Emerging Civil Society in the Asia Pasific Community*. Japan : JCIE.
- Wermasubun, D. Savio. (2003). *Corporate Social Responsibility*. Surakarta : The Business Watch Indonesia.
- Wilson, Graham K. (1990). *Business and Politic*. London : United Kingdom, MacMillan Education.
- Witoelar, Erna. (2005). *Tata Kelola Filantropi*. Jakarta : Ramadhan Magazine, Dompot Dhuafa Republika.

II. BAHAN-BAHAN LAIN

- Bandu. A. Dachlan. (2001). *Tanggungjawab osial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap Masyarakat Lingkar Tambang : Studi Kasus terhadap Masyarakat Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tnggara Barat*. Tesis. Pascasarjana Fisip UI.
- Friedman. (2007). *A Friedman Doctrine : The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*. New York Times Magazine tanggal 13 September 2007.
- Jahya, Rusfadia Saktiyanti. (2004). *Efektifitas Program TSP kepada Komunitas : Sebuah Evaluasi Program Komdev di 6 Kampung Dampingan PT. Berau Coal, Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. Tesis Pasca Sarjana UI
- Jalal. (2006). *Menimbang CSR Secara Rasional*, dalam Kompas, September 2006. Laporan *Community Development* PT. Inco Tahun 2004.
- Laporan CSR PT. Inco Tahun 2005
- Laporan CSR PT. Inco Tahun 2006
- Laporan Tahunan Program Pengembangan Masyarakat oleh PT. Inco Tahun 2007.

Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2003.

Majalah Bisnis dan CSR (2007). *Regulasi Setengah Hati*. Edisi Oktober.

Majalah Bisnis dan CSR (2007), *Memaknai CSR*, Edisi Oktober.

Prayogo, Dody. (2004). *Konflik Antara Korporasi dan Komunitas : dalam Masyarakat*. Jurnal Sosilogi, Depok, Lab Sosio Fisip UI.

Radyan, (2007). *Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Tambang*. Majalah Tambang, Edisi Juli 2007. Jakarta

Rustam Ibrahim, et.al. (2002). *Membangun Hubungan Yang Sehat, Produktif dan Setara antara Pemerintah, Swasta dan LSM*. Makalah Tim LP3ES untuk Program Perumusan Kode Etik LSM Kerja Sama Partnership-LP3ES

Suharto, Edi. (2008). *Menggagas Standar Audit Program CSR*. Makalah. Disajikan pada 6th Round Table Discussion : Implementasi UU Perseroan Terbatas, 27 Maret 2008. Jakarta

Suharto, Edi. (2008). *Corporate Social Responsibility : What is and Benefit for Corporate*, makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility : Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari

Suharto, Edi. (2008). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Harian Pikiran rakyat. Edisi 22 April 2008. Jakarta.

Sukada, Sonny dan Jalal. (2008). *Pelaporan Keberlanjutan : Alat Akuntabilitas dan Manajemen* makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility : Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari

Supomo, Sita. (2004). *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG*. Harian Republika. Edisi 20 Oktober.

Suratmo, Sribugo (2008), *Implementasi CSR di Perusahaan* makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility : Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wahjoedi. (2004). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan : Implikasi dan Makna Ekonominya bagi Perusahaan dan Masyarakat*. Tesis. Fakultas Ekonomi UI.

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Boyd, Graham (1998), Social Auditing : A Method of Determining Impact, <http://www.caledonia.org.uk/socialand/social.htm> (diakses 10 Maret 2008)

CSR Review. <http://www.csr-review-online.com> (diakses pada tanggal 27 Februari 2009)

Tempo Interaktif.com . Bisnis Pertambangan di Indonesia edisi Kamis, 08 September 2005



Lampiran 1. Framework Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ASPEK	PERTANYAAN DASAR	SUMBER DATA/ RESPONDEN
Profit	<ul style="list-style-type: none"> • Seberapa besar proporsi uang yang dikeluarkan perusahaan untuk CSR ? • Dari mana pos anggaran CSR tersebut diambil, apakah diperhitungkan sebagai biaya perusahaan atau diambil dari laba kotor atau bersih perusahaan ? 	CEO, <i>Board of Directors</i> , pegawai/staf perusahaan, LSM mitra, kontraktor
Planet	<ul style="list-style-type: none"> • Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ? • Apa dampaknya bagi kondisi lingkungan sekitar 	Pegawai perusahaan, kontraktor, <i>supplier</i> , pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa
People	<ul style="list-style-type: none"> • Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial? • Apa dampaknya bagi kondisi masyarakat, khususnya komunitas lokal 	Pegawai perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa
Procedure	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana program CSR tersebut dilaksanakan ? • Apakah prosesnya dilakukan sesuai prosedur yang benar? 	Pegawai perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa, asosiasi profesi, akademisi

Lampiran 2. Panduan Wawancara

Pertanyaan penelitian	Sumber data/ informan	Pertanyaan wawancara
<p>Bagaimana pandangan perusahaan mengenai fenomena CSR</p>	<p>CEO/Board of Director</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan perusahaan terkait dengan pengembangan Konsep CSR ? 2. Sejauh mana konsep CSR ditransformasikan dalam misi, visi serta kultur perusahaan ? 3. Bagaimana pandangan perusahaan terkait dengan pencapaian-pencapaian konsep CSR di Perusahaan ? 4. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengharuskan setiap perusahaan mengeluarkan dana CSR sebesar 1% dari laba Perusahaan. Bagaimana pencapaian perusahaan mengenai angka 1 % tersebut? 5. Dari mana pos anggaran CSR tersebut diambil, apakah diperhitungkan sebagai biaya perusahaan atau diambil dari laba kotor atau laba bersih perusahaan ? 6. Apakah porsi anggaran CSR yang dikeluarkan perusahaan membebani struktur keuangan Perusahaan ?
	<p>Kepala Departemen External Relation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan/Program apa yang yang menjadi focus konsep CSR di Perusahaan misalnya: UKM, Infrastruktur, Lingkungan dll? 2. Apa alasannya sehingga memilih kegiatan/program tersebut sebagai focus pengembangan CSR? 3. Apakah dana yang dialokasikan oleh perusahaan dapat memenuhi program CSR yang dilaksanakan?
	<p>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda tentang CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan 2. Seperti apa peran LSM dalam

	Pemerintah Daerah	<p>program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pandangan Bapak tentang pelaksanaan CSR PT. INCO bagi Daerah Bapak? 2. Sejauh mana keterlibatan dan kerjasama antara instansi Bapak dalam pelaksanaan program CSR PT. INCO ?
	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keberadaan PT. INCO di daerah Bapak ? 2. Tahukah bapak tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat sekitar ?
Bagaimana strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam melakukan CSR	CEO/Board of Director	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan? 2. Apa saja kegiatan CSR yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan social ? 3. Bagaimana program CSR tersebut dilaksanakan ? 4. Bagaimana prosedur pelaksanaan program atau kegiatan CSR dilakukan ? 5. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan CSR di perusahaan ?
	Kepala Departemen External Relation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dukungan Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan Program CSR? 2. Sejauh mana keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan CSR? 3. Apa hambatan operasional dalam pelaksanaan CSR?
	Lembaga Swadaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa hambatan yang selama ini dihadapi Lembaga anda ?

	<p>Masyarakat (LSM) mitra perusahaan</p> <p>Pemerintah Daerah</p> <p>Masyarakat</p>	<p>2. Sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan CSR?</p> <p>1. Apa hambatan kerjasama antara instansi Bapak dan Perusahaan dalam pelaksanaan CSR PT. INCO ?</p> <p>1. Apakah pernah/biasa atau sering terjadi konflik antara masyarakat sekitar dengan pihak perusahaan ?</p> <p>2. Apa saja program atau kegiatan CSR perusahaan yang bapak ketahui yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ?</p>
<p>Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dan pihak perusahaan pada penerapan konsep CSR</p>	<p>CEO/Board of Director</p> <p>Kepala Departemen External Relation</p>	<p>1. Apa dampaknya bagi kondisi kondisi lingkungan sekitar?</p> <p>2. Apa dampaknya bagi kondisi masyarakat khususnya komunitas local ?</p> <p>3. Sejak kapan melaksanakan CSR ? dan apa perbedaan yang dirasakan persahaan sebelum melaksanakan CSR dan setelah melaksanakan CSR ?</p> <p>4. Apa manfaat CSR bagi perusahaan dan bagi masyarakat?</p> <p>1. Sejauh mana manfaat yang dihasilkan dari program CSR bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan?</p> <p>2. Sejauh mana dampak bagi masyarakat, Pemda dan Perusahaan dengan adanya program CSR?</p>

	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra perusahaan	<ol style="list-style-type: none">1. Sejauhmana manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dan juga pihak perusahaan terkait dengan CSR?2. Apakah CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat?
	Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah program CSR PT. INCO mempunyai kontribusi positif bagi target/pencapaian dengan fungsi dan tugas pokok instansi Bapak?2. Apa harapan bapak pada masa yang akan datang tentang perbaikan-perbaikan program CSR?
	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana manfaat program/kegiatan CSR bagi masyarakat juga bagi perusahaan ?

Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Sumber Data/Responden: Bapak Sawedi Muhammad, Manajer Community Relation PT. Inco, dilakukan pada tanggal 02 April 2009, bertempat di ruang kerjanya di External Departement PT. Inco

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
<p>1. <i>Bisa Bapak jelaskan mengenai visi dan misi program pengembangan masyarakat PT. Inco ?</i></p>	<p>1. Berbicara mengenai visi dan misi program pengembangan masyarakat PT. Inco, perlu saya gambarkan di sini bahwa pihak manajemen PT. Inco menginginkan perusahaan ini untuk memberikan suatu kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Oleh karena itu, visi dan misi program pengembangan masyarakat PT. Inco kita arahkan agar terjadi proses transformasi sosial yang meliputi proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan juga adanya proses perubahan pola pikir masyarakat yang sebelumnya sangat tergantung pada kegiatan pertambangan PT. Inco menuju pada masyarakat yang mandiri dengan mengembangkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selain pada sektor pertambangan.</p> <p>Kemandirian lokal melalui usaha pengembangan masyarakat yang meliputi bidang pertanian, pengembangan usaha lokal, pendidikan, dan bidang kesehatan, yang akan kita <i>support</i> supaya sektor-sektor kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak hanya tergantung kepada hasil tambang yang notabene merupakan <i>unrenewable resources</i> kepada sektor-sektor <i>renewable resources</i>, sehingga ketika PT. Inco sudah tidak lagi beroperasi di daerah ini masyarakatnya sudah bisa mandiri.</p>
<p>2. <i>Bagaimana PT. Inco memandang aktivitas CSR dalam operasinya?</i></p>	<p>2. PT. Inco melihat bahwa aktifitas CSR ini merupakan suatu aktifitas yang terintegrasi dalam operasi perusahaan. Hal ini mengandung arti bahwa semua nafas operasi dari PT. Inco harus mencerminkan nilai-nilai luhur dari CSR. Semua departemen harus memiliki kontribusi terhadap CSR, bukan hanya disederhanakan menjadi tanggung jawab bagian <i>community relation</i> khususnya. Aktifitas CSR PT. Inco merupakan bagian yang terintegrasi menjadi suatu sistem yang harus dipenuhi oleh sepanjang <i>supply chain</i> (rantai pasokan) PT. Inco yang meliputi seluruh departemen PT. Inco</p>

	<p>hingga pada kontraktor-kontraktor lokal yang menjadi mitra dari PT. Inco.</p> <p>Secara mandatory (kewajiban), sumbangsih PT. Inco dalam pembangunan negara ini sudah sangat jelas. PT. Inco selalu membayarkan royalti, pajak, dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab PT. Inco sebagai konsekuensi dalam beroperasi di negara ini dengan tepat waktu. Bahkan PT. Inco saat ini telah bekerja secara "beyond regulation" dengan mengintegrasikan semua pemahamannya mengenai konsep CSR sepanjang rantai pasokannya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sistem nilai-nilai yang dianut PT. Inco dengan sistem nilai yang diterapkan oleh mitra PT. Inco. Hal ini merupakan syarat utama dalam menjalin kemitraan dengan PT. Inco.</p> <p>dalam melaksanakan CSR bagi masyarakat yang berada pada daerah pemberdayaan kami, pihak perusahaan melaksanakan CSR dengan menggunakan pendekatan <i>community development</i>, hal ini dilakukan seiring dengan terjadinya perubahan paradigma perusahaan dalam memandang CSR sebagaimana yang kami tuangkan dalam paradigma baru <i>comdev</i> PT. Inco</p> <p>3. Berapa jumlah personel perusahaan yang terlibat dalam program pengembangan masyarakat PT. Inco?</p> <p>3. Jumlah karyawan dalam <i>community relation</i> PT. Inco ada 15 orang, tetapi untuk <i>External Relations Department</i> secara keseluruhan berjumlah 30 orang yang semuanya membantu dalam proses implementasi program PT. Inco.</p> <p>4. Bagaimana bapak menilai kinerja mereka?</p> <p>4. Keberhasilan program pengembangan masyarakat PT. Inco saat ini tidak terlepas dari kontribusi mereka. Mereka memiliki kapabilitas yang sangat mendukung dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Kemampuan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> perusahaan terutama dengan masyarakat melalui pemahaman budaya lokal yang mendalam merupakan salah satu kunci sukses program pengembangan masyarakat PT. Inco.</p>
--	---

<p>5. <i>Bagaimana bapak menilai hubungan PT. Inco dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mensukseskan program pengembangan masyarakat?</i></p> <p>6. <i>Apa tantangan dan hambatan</i></p>	<p>Memang yang menjadi salah satu kendala adalah permasalahan jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki PT. Inco, karena dengan melihat luasnya daerah pemberdayaan dan banyaknya program pengembangan yang di implementasikan terkadang proses pemantauannya menjadi kurang fokus. Oleh karena itu, PT. Inco berkomitmen untuk menambah jumlah <i>resources</i> itu. Sekarang ini, PT. Inco sedang mencoba untuk mendiskusikan alternatif pembentukan suatu yayasan. Yayasan ini yang nanti fokus untuk menyampaikan program-program pengembangan masyarakat PT. Inco.</p> <p>5. Kemitraan ini adalah suatu keniscayaan, karena tanpa kemitraan tiga pihak mustahil program-program pengembangan secara spesifik akan berhasil dengan baik. Secara umum, hubungan kerja sama antar perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat terjalin baik. masyarakat berkontribusi dengan terlibat dalam proses penjangkaran kebutuhan yang kemudian akan menjadi program bersama antara PT. Inco dengan pemerintah daerah yang terlebih dahulu mensinergikan program dengan pembagian peran masing-masing pihak sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pengembangan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan program-program perusahaan. Sejauh ini, PT. Inco tetap konsisten dalam mensinergikan program pengembangan masyarakat PT. Inco dengan program-program pembangunan pemerintah daerah.</p> <p>Sedikit banyak persoalan yang kami hadapi adalah masih terdapat gap-gap yang harus ditingkatkan lagi terutama yang berkaitan dengan anggaran pemerintah yang dialokasikan melalui APBD. Kemudian tantangan kedepan adalah model perencanaan dan penjangkaran kebutuhan yang berbeda sistemnya antara PT. Inco dengan Pemerintah Daerah. Dalam artian bahwa, PT. Inco sudah mengadopsi metode partisipatory (<i>bottom up</i>), kabupaten masih mengadopsi sistem yang top down dalam perencanaan program. bahkan banyak program comdev dari perusahaan yang ketika diterminasi dan diambil alih oleh pemerintah daerah, program tersebut malah terhenti atau mandek.</p> <p>6. Tantangan terbesar yang dihadapi PT. Inco dalam pelaksanaan program adalah mengenai pembagian peran</p>
--	---

<p><i>pelaksanaan program dalam masyarakat?</i></p>	<p>dari masing-masing pihak. Masyarakat perlu diberikan pengertian yang jelas bahwa yang mana yang menjadi porsi dari perusahaan, mana yang akuntabilitas dari pemerintah daerah dan masyarakat seperti apa.</p> <p>Perlu diketahui bahwa, peran PT. Inco dalam kehidupan masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan sangat besar. Dengan kata lain, dari lahir hingga matinya masyarakat disekitar wilayah perusahaan semuanya berkaitan dengan PT. Inco. Kenapa bisa saya katakan begitu karena masyarakat lahir di rumah sakit yang di sediakan PT. Inco, sampai dengan dia meninggal juga PT. Inco masih membrikan fasilitas transportasi untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa derajat ketergantungan masyarakat kepada perusahaan sangatlah tinggi. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanggung jawab serta peran dari masing-masing pihak terutama PT. Inco dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Karena sejatinya perusahaan bukan merupakan agen tunggal dalam pembangunan dan sebenarnya peran dari perusahaan adalah hanya sebagai <i>supporting</i> bagi program-program yang dilaksanakan pemerintah. Tetapi tentu saja hal ini sedang diterapkan secara pelan-pelan untuk merubah pola pikir masyarakat seperti ini dan perusahaan juga sadar bahwa perusahaan tidak bisa langsung berdiam diri terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.</p>
<p>7. <i>Bagaimana mekanisme penentuan dana program pengembangan masyarakat PT. Inco?</i></p>	<p>7. Sampai saat ini kita tidak ada plafon anggaran karena kita berprinsip bahwa sumber dana itu bisa dicari tapi yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat yang paling rill itu seperti apa dan prioritas program seperti apa, karena selama ini kalau kita menentukan anggaran duluan maka orang akan berpikir bahwa bagaimana menghabiskan anggaran yang ada. Sekarang kita melihat bahwa, hal yang paling prinsip adalah bagaimana mendefinisikan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>8. <i>Apa harapan bapak mengenai perkembangan konsep CSR ke depan?</i></p>	<p>8. Harapan saya mengenai perkembangan konsep CSR ke depan adalah konsep CSR dalam implementasinya jangan hanya menitikberatkan pada akuntabilitas dari perusahaan tetapi juga bagaimana pembagian peran bagi semua pihak sehingga semua pihak dapat berperilaku dan memposisikan diri dalam mensukseskan program CSR. Salah satu contoh adalah, bagaimana sih sebenarnya</p>

	peran dari Pemerintah Kabupaten dalam implementasi CSR karena seolah-olah konsep CSR selama ini dari aspek perencanaan hingga implementasinya dilapangan diserahkan kepada perusahaan. Padahal, implementasi di lapangan seluruh <i>stakeholder</i> seharusnya bertanggung jawab.
--	---

2. Sumber Data/Responden: Bapak Anwar Hafid, Kepala Kecamatan Nuha, wawancara dilaksanakan pada hari senin tanggal 03 April 2009, bertempat di Kantor Camat Nuha.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1. Bisa bapak jelaskan mengenai sejarah pembentukan kabupaten ini (Luwu Timur) dan peran PT. Inco sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ?	1. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003. Sebagai kabupaten yang baru seumur jagung, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih berbenah dan tidak bisa dipungkiri bahwa program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT. Inco pada beberapa hal tampak seperti mengambil tugas dan fungsi pemerintah. PT. Inco telah memainkan peran sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur dengan sangat baik sekali. PT. Inco memberikan kontribusi sebesar 77,97% dari produk regional bruto Luwu Timur.
2. Bagaimana bapak menilai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Inco ?	2. Secara umum saya menilai program pengembangan masyarakat PT. Inco sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut saya, program pengembangan masyarakat yang paling menonjol adalah di bidang kesehatan, karena bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan itu terutama pada percepatan peningkatan kualitas pelayanan, contohnya peralatan medis Puskesmas. Bila melalui pemerintah prosesnya lama, karena kita harus mengusulkan terlebih dahulu, karena harus melalui APBN dengan proses tertentu. Melalui PT. Inco, semua peralatan bisa diadakan dengan cepat. Selain itu, pelayanannya 24 jam. Saya pikir tidak ada puskesmas di luar yang memberikan pelayanan 24 jam seperti di Sorowako, Wasuponda, dan Wawondula.

	<p>Hal yang terpenting dalam program pengembangan masyarakat PT. Inco adalah program telah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Bila dulu dana mengikuti program, saat ini program mengikuti dana. Maksudnya adalah dulu setiap kecamatan diberikan dana dalam jumlah tertentu tanpa melihat kebutuhan riil yang ada di masyarakat, sekarang tidak ada penjatahan dana untuk setiap wilayah atau dengan kata lain pendekatan program pengembangan masyarakat PT. Inco tidak berdasarkan platform anggaran tetapi berdasarkan platform kegiatan. Dana yang diberikan tergantung kepada kelayakan proposal dan program yang hendak dijalankan. Selain itu, proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat PT. Inco telah melalui proses diskusi antara PT. Inco Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ini tentunya sebuah sinergi yang akan memberikan hasil yang optimal.</p>
<p>3. <i>Bagaimana dengan program pengembangan masyarakat PT. Inco di bidang lain?</i></p>	<p>3. Selain di bidang kesehatan, di bidang pendidikan hasilnya juga bagus. Salah satu contohnya adalah program guru magang. Selama ini kita kekurangan guru, kita bisa menambah guru-guru melalui program magang karena dana dari program pengembangan masyarakat PT. Inco. Begitu pula dengan program pelatihan-pelatihan guru juga tidak bisa diadakan tanpa ada bantuan dari PT. Inco. Hal ini sangat berguna dalam menambah kapasitas dan kualitas guru-guru kita. Satu hal yang juga sangat berhasil adalah program untuk meningkatkan keterampilan di sejumlah sekolah.</p> <p>Juga di bidang pertanian, salah satu persoalan adalah masalah modal. Dengan adanya program pengembangan masyarakat PT. Inco, modal yang diperlukan bisa dibantu. Belum lagi dengan bantuan peralatan pertanian mekanis. Pendek kata, percepatan pembangunan bisa dilakukan karena ada program pengembangan masyarakat PT. Inco.</p>
<p>4. <i>Bagaimana bapak menilai hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. Inco dalam</i></p>	<p>4. Seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, memang terkesan bahwa PT. Inco mengambil tugas dari pemerintah daerah dalam pengembangan masyarakat terutama pada penyediaan infrastruktur yang saat ini pemerintah daerah masih belum bisa menyediakannya dalam waktu cepat, akan tetapi kerjasama diantara kami sangat terjalin dengan baik. Hal-hal yang merupakan kewajiban dari pemerintah tetapi belum bisa dilakukan,</p>

<p><i>program pengembangan masyarakat.</i></p>	<p>dibantu oleh PT. Inco. Hal ini bukan karena paksaan atau tekanan dari pemerintah daerah untuk membebankan kepada PT. Inco tetapi ini merupakan inisiatif dari pihak perusahaan.</p> <p>Dalam penentuan program pengembangan masyarakat terutama dalam penentuan program prioritas, hal ini dilakukan dengan sejumlah lokakarya dari tingkat desa hingga ke kecamatan sehingga pembagian tugas diantara pihak sangat terjalin dengan baik. Selain itu juga kegiatan ini meminimalkan terjadinya tumpang tindih program. Jadi program yang sudah diprogramkan pemerintah di tahun berjalan tidak lagi dilakukan oleh PT. Inco, begitupun sebaliknya.</p>
<p>5. Bagaimana harapan bapak kedepan mengenai program pengembangan masyarakat PT. Inco ?</p>	<p>5. Harapan kedepan, program-program pengembangan masyarakat yang dijalankan haruslah betul-betul mencerminkan semangat untuk mengubah paradigma masyarakat dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi pasca tambang, sehingga masyarakat betul-betul mandiri bila tambangnya ditutup dikemudian hari. Niat dan keikhlasan hati dari semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, dan pelaksana program pengembangan masyarakat khususnya Perusahaan, hendaknya didukung untuk kebaikan kita semua.</p>

3. Sumber Data/Responden: Bapak Andi, Ketua KAWAS (Kerukunan Warga Asli Sorowako), Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2009, bertempat di Pusat Pengembangan Padi Sorowako.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
<p>1. Apa pengertian dari KAWAS?</p>	<p>1. Kerukunan Warga Asli Sorowako. Maksudnya adalah warga asli yang mendiami daerah ini sebelum masuknya PT. Inco. Warga asli Sorowako ini merupakan pengikut DI/TII Kahar Muzakar yang lari kemudian tempat tinggal mereka merupakan cikal bakal kampung-kampung di sekitar daerah operasional PT. Inco sekarang seperti Nuha, Matano, Wasuponda, dan Sorowako.</p>
<p>2. Kapan terbentuknya dan hal apa yang melatarbelakangi</p>	<p>2. KAWAS terbentuk 10 tahun yang lalu, yang dalam perjalanannya sempat tidak aktif. Latar belakang terbentuknya KAWAS adalah pada saat PT. Inco masuk kedaerah ini otomatis masyarakat disini menjadi masyarakat yang heterogen, oleh karena itu, dibentuk suatu ikatan kerukunan warga asli Sorowako agar dapat</p>

<p>terbentuknya KAWAS?</p>	<p>merangkul berbagai suku yang ada untuk menjaga nilai-nilai budaya asli masyarakat disini. Selain itu, tujuan KAWAS sendiri adalah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat asli terhadap keberadaan PT. Inco di daerah ini.</p>
<p>3. Pak Andi sendiri menjabat periode ke berapa?</p>	<p>3. Saya menjabat pada periode ke empat. KAWAS pada tahun 2000 baru membuat peraturan pergantian pengurus tiap 2 tahun. Sebelumnya organisasi ini masih sangat sederhana jadi pengurusannya bisa sangat lama menjabat. Anggota dari KAWAS adalah semua penduduk asli yang kami sensus secara berkala setiap 2 tahun sekali.</p>
<p>4. Apa Tujuan KAWAS?</p>	<p>4. Tujuan KAWAS adalah kami ingin mencoba memanfaatkan keberadaan PT. Inco karena kita sadar bahwa PT. Inco ini tidak akan disini selamanya. Pertanyaannya adalah apabila pasca tambang, akan jadi apa Sorowako ini apabila masyarakatnya tidak siap. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan PT. Inco melalui program <i>community development</i> (comdev) nya, kita coba untuk mengedukasi masyarakat secara pelan-pelan agar mereka bisa mandiri dan kesejahteraannya meningkat sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi tergantung kepada PT. Inco. Ketika hari ini PT. Inco tidak beroperasi lagi, tidak menjadi masalah karena masyarakat sudah siap. Itulah yang kita harapkan dari PT. Inco dan itulah yang diharapkan oleh PT. Inco jadi kita berbicara tentang kesiapan masyarakat kedepan.</p>
<p>5. Bagaimana dengan program <i>community development</i></p>	<p>5. Program <i>community development</i> PT. Inco ini diarahkan sesuai dengan "hobby" atau keinginan dari masyarakat. Karena kalau tidak "hobby" untuk merubah pola hidup masyarakat tentu tidaklah mudah. Jadi sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh masyarakat seperti bertani sawah, tanaman hortikultura, sayur mayur, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Pada awalnya, program <i>community development</i> PT. Inco adakalanya tidak menyentuh sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Oleh karena itu, PT. Inco merubah metode yang mereka gunakan dengan memberikan kesempatan yang penuh kepada masyarakat untuk membuat program, dan disini PT. Inco hanya bertindak sebagai fasilitator. Jadi hasilnya sangat tepat sasaran.</p> <p>Konsep umum program <i>community development</i> PT. Inco terhadap kami adalah bagaimana merubah pola hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan</p>

<p>7. Bagaimana bapak melihat hubungan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Inco dalam program pemberdayaan masyarakat?</p>	<p>7. Saya melihat hubungan Pemerintah Daerah dengan PT. Inco sangat baik sekali kerja samanya. Memang Pemerintah Daerah Luwu Timur masih berumur jagung karena baru berdiri sebagai kabupaten jadi saat ini mereka lebih fokus dulu pada pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) tetapi yang jelas pembagian tugas antara keduanya sangat baik. terutama menyangkut program pengembangan masyarakat sehingga tidak terjadi <i>overlapping</i> program antara program pemerintah dengan program PT. Inco.</p>
<p>8. Apa harapan bapak kedepan berkaitan dengan program <i>community development</i> PT. Inco?</p>	<p>8. Kami harapkan kedepan akan ditingkatkan kembali kerja sama PT. Inco dengan masyarakat dalam bidang pendidikan, karena itu permasalahan mendasar yang kami alami. Jadi 60% program <i>community development</i> PT. Inco pada bidang pendidikan.</p>
<p>9. Ada lagi yang ingin bapak sampaikan?</p>	<p>9. Saya sebagai pribadi dan sebagai ketua Kerukunan Warga Asli Sorowako sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PT. Inco dengan niat baik melalui program-program pemberdayaan masyarakatnya untuk memperhatikan masyarakat. Tidak hanya melihat bagaimana mendapatkan nikel atau keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu juga, saya sangat berterima kasih kepada manajemen PT. Inco yang sangat responsif sekali terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi tanpa masyarakat berteriak, PT. Inco telah menunjukkan dengan program-program yang dampaknya secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat.</p>

4. Sumber Data/Responden: Bupati Luwu Timur, Bapak H. A. Hatta Marakarma
Wawancara dilaksanakan pada 20 April 2009.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
<p>1. Bagaimana Pandangan Bapak tentang peran</p>	<p>1. Secara umum, Saya memahami bahwa "Tanggungjawab Sosial Perusahaan" atau yang dikenal dengan "CSR", adalah suatu upaya</p>

<p><i>Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.INCO bagi Daerah Bapak?</i></p>	<p>sistematis dalam perpektif perusahaan untuk mewujudkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan itu beroperasi. Tanggungjawab tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab pemerintahan dan masyarakat untuk bergerak maju.</p> <p>Dalam pemahaman seperti itu, maka sudah barang tentu, pihak perusahaan sebagai “pemegang kepentingan utama” (<i>prime key stakeholders</i>) atau pihak yang paling diuntungkan oleh aktivitas bisnis mereka, sudah selayaknya menjadikan CSR menjadi “motor penggerak” (<i>prime mover</i>) pembangunan pada wilayah operasi perusahaan, meskipun terdapat tanggungjawab sosial yang juga harus diemban oleh pemerintah (<i>government responsibility</i>) dan tanggungjawab masyarakat (<i>community responsibility</i>).</p> <p>Pada konteks itu, Saya melihat dan merasakan bahwa meskipun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat belum berjalan secara maksimal, tidak dapat disangkal pula bahwa telah ada hal-hal yang dilakukan oleh PT. Inco Tbk. di Kabupaten Luwu Timur yang perlu diapresiasi dengan sebaik-baiknya, antara lain:</p> <p>A. Bidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Inco Tbk. telah melakukan penanganan limbah pabrik dan limpahan lumpur dari kawasan tambang, yang hingga kini dapat dianggap cukup baik penanganannya, sehingga air danau di kawasan PT.INCO tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar; b. PT. Inco Tbk. telah memasang penangkap debu pada pabrik pengolahan nikel mereka, sehingga dapat mengurangi debu yang bertebaran di atas wilayah pabrik dan sekitar pemukiman semaksimal mungkin. c. PT. Inco Tbk., sejauh ini telah melakukan penanganan reklamasi terhadap lokasi purna tambang dengan menanami kawasan tersebut dengan tumbuhan pioneer sehingga daerah purna tambang tidak terlihat gersang dan dapat dimanfaatkan kembali; d. PT. Inco Tbk. sejauh ini telah berupaya menyiapkan perencanaan komprehensif mengenai “pasca tambang 2025” yang dikenal dengan “<i>Soft Landing Mining Closure 2025</i>”
--	---

melalui studi yang mendalam antara lain dengan melakukan studi banding di berbagai daerah yang telah mengakhiri tambang, termasuk pada kegiatan pasca tambang Vale di Brasil, sehingga mendapatkan Piagam Emas Lingkungan Pertambangan dan Penghargaan Tropi Aditama, karena konsep penanganan pasca tambang yang menjangkau masa depan dan integralitasnya dengan program pengembangan masyarakat.

B. Bidang Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan:

- a. PT. Inco Tbk. berupaya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Community Development bagi masyarakat, antar lain dengan memberikan modal usaha, pembinaan karang Taruna, dan pembinaan masyarakat nelayan pada Budidaya rumput laut; Pembangunan Posyandu di desa-desa kawasan konsesi perusahaan; memfasilitasi terlaksananya pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) di Kabupaten Luwu Timur; dan membangun gedung perpustakaan umum yang akan difungsikan sebagai taman baca dan pusat pengembangan minat baca di Malili.
- b. PT. Inco Tbk. telah berupaya mengintegrasikan kegiatan tahunan program pemberdayaan masyarakat (*multi years*) dengan kegiatan Pasca Tambang 2025 dengan melakukan pengkajian tentang kemasyarakatan, kelembagaan dan cara pengakhiran tambang yang dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara saksama dengan melibatkan sejumlah ahli yang berkompeten, untuk menyusun model dan sistematika pengakhiran tambang 2025 dengan sebaik-baiknya.

C. Bidang Pendidikan :

- a. PT. Inco Tbk. telah membantu melakukan Sertifikasi bagi Guru Magang pada wilayah operasinya yang dirasakan cukup bermanfaat bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar di Kabupaten Luwu Timur; memberikan Beasiswa bagi Siswa yang berprestasi di kawasan wilayah operasinya; telah memberikan bantuan

	<p>melalui Direktorat Pembinaan Sekolah untuk melakukan penyusunan Buku-buku Referensi dari tingkat TK sampai SLTA dengan bekerjasama Universitas Negeri Makassar dan sejumlah tenaga ahli; memberikan bantuan Buku-buku pelajaran pada sekolah-sekolah di konsesi PT.INCO dan secara berkala memberikan pembinaan bagi guru-guru sekolah Unggulan;</p> <p>b. PT. Inco Tbk. telah mendirikan yayasan (YPS) dari TK s/d Perguruan Tinggi (ATS) untuk anak-anak karyawan dan anak-anak yang berprestasi di kawasan operasinya; membuka pendidikan dan pelatihan Industri (PPI) setingkat D2 untuk mempersiapkan tenaga-tenaga siap pakai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Tambang Nikkel;</p> <p>c. PT. Inco Tbk. telah membangun gedung RKB SD kelas Jauh Lasulawai Kec. Wasuponda, gedung RKB Kelas Unggulan SD Kompleks Sorowako Kec.Nuha, Rehab SDN 276 Tokalimbo kec.Towuti;</p> <p>D. Bidang Kesehatan:</p> <p>a. PT. Inco Tbk. telah bekerjasama dengan Pemda Membangun Puskesmas Plus; memberikan bantuan tenaga medis pada Puskesmas di wilayah operasinya; - memfasilitasi pembangunan Rumah Sakit untuk para karyawan dan bagi penduduk asli daerah Sorowako (KWAS) Wasuponda, Wawondula, dan (PASITABE);</p> <p>b. PT. Inco Tbk. telah memediasi pakar kesehatan dengan tenaga medis dalam meningkatkan sumber daya manusia; memediasi Penyuluhan terhadap penanganan HIV AID dan pemberantasan narkoba;</p>
<p>2. Sejauh mana keterlibatan dan kerjasama antara Instansi Bapak dalam pelaksanaan Program tanggung Jawab sosial perusahaan</p>	<p>2. Dalam kaitan CSR, sesungguhnya keterlibatan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Masyarakat dengan PT. Inco Tbk. merupakan keharusan yang tidak terelakkan dan senantiasa harus diupayakan.</p> <p>Pada konteks perencanaan CSR, pihak PT. Inco Tbk. memiliki kewajiban untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>

<p>(CSR) PT.INCO?</p>	<p>Luwu Timur, antara lain guna menghindari "tumpang tindih" perencanaan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk di wilayah operasi PT. Inco Tbk.</p> <p>Hal ini, terlihat belum dapat disinkronkan dengan sebaik-baiknya, terutama disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi dan kerjasama, sehingga secara umum, terkesan dalam perencanaan pihak Pemerintah Daerah berjalan sendiri dan pihak PT. Inco Tbk. pun berjalan sendiri. Lemahnya koordinasi dan kurangnya intensitas kerjasama tersebut, secara umum disebabkan karena persepsi yang belum sama peranan apa sesungguhnya yang dapat diambil oleh para pihak dalam proses pembangunan daerah.</p> <p>Dalam kaitan ini, pihak PT. Inco Tbk. seharusnya dapat menyadari peranan sentral pemerintah daerah dalam proses perencanaan daerah, dimana pihak PT. Inco Tbk. semestinya senantiasa melakukan konsultasi secara terus menerus dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program CSR mereka yang bersentuhan dengan masyarakat di daerah ini, khususnya di wilayah operasi perusahaan mereka.</p> <p>Meskipun demikian, hingga saat ini, dapat dicatat adanya keterlibatan dan kerjasama antara para pihak, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan keamanan dan ketentraman di wilayah tambang dari ancaman eksternal dan internal PT.INCO; b. Penanganan ketenagakerjaan baik asing maupun domestik; c. Bagi Hasil Scraft dalam peningkatan PAD di Kabupaten Luwu Timur; d. Penanganan pendidikan; e. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, f. Pengentasan Kemikiskinan;
<p>3. Apakah program CSR mempunyai kontribusi positif bagi</p>	<p>3. Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, merasakan bahwa program CSR PT. Inco Tbk. belum memberikan kontribusi maksimal kepada kemajuan daerah Kabupaten Luwu Timur, disebabkan perbedaan persepsi yang mendasar,</p>

<p><i>target dan pencapaian dengan fungsi dan Tugas pokok institusi Bapak?</i></p>	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan CSR PT. Inco Tbk. tampaknya tidak dilakukan secara komprehensif, karena terkesan dilakukan dalam konteks tahunan dan menghindari perencanaan <i>multi-years</i> yang diduga berimplikasi terhadap pembiayaan. Kesan yang ditimbulkan dari perencanaan seperti ini, adalah perencanaan yang terlihat lebih banyak bersifat "pemadam kebakaran" dan "pembiayaan seefisien mungkin"; serta untuk memenuhi "akuntabilitas tahunan" semata-mata. b. Dalam banyak realitas, dirasakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan CSR PT. Inco Tbk. tidak sejalan dan selaras dengan kerangka perencanaan umum kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pada kenyataannya, cukup banyak dilemma yang dihadapi ketika menghadapi permasalahan tidak sinkronnya perencanaan umum daerah dengan perencanaan CSR PT. Inco Tbk., yang diperkirakan akan menimbulkan konflik yang tidak perlu.
<p><i>4. Apa Hambatan kerjasama antara instansi Bapak dan perusahaan dalam pelaksanaan CSR?</i></p>	<p>4. Selain dari permasalahan yang bersifat internal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terkendala pada masih lemahnya sumberdaya manusia aparat terkait dengan program-program CSR PT. Inco Tbk., maka dapat dikemukakan sejumlah hambatan yang ada dalam kaitan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Inco Tbk., antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inkonsistensi manajemen PT. Inco Tbk. dalam mewujudkan komitmen yang telah dicapai dengan Pemerintah Daerah. Cukup banyak program yang disepakati dan dijanjikan, mengalami penundaan ataupun pembatalan secara sepihak dan tidak jelas alasannya. Dalam kaitan ini, tampaknya antara lain disebabkan karena tidak jelasnya wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada officer pembuat komitmen pada PT. Inco Tbk., sehingga kadang-kadang komitmen yang telah diberikan tidak dapat diwujudkan. b. Masih banyaknya kewajiban-kewajiban PT. Inco Tbk. sebagaimana yang tercantum di dalam Kontrak Karya yang belum diwujudkan, tanpa penjelasan yang memadai. c. Masih adanya perbedaan persepsi dan apresiasi terhadap tanggungjawab sosial yang harus

	<p>diemban oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan CSR, baik yang terkait dengan Program Comdev maupun Program Donasi yang diberikan oleh PT. Inco Tbk. Secara nyata hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pandangan mengenai: (1) pembukaan sejumlah fasilitas milik PT. Inco Tbk., antara lain Pelabuhan Balantang dan Bandara Sorowako untuk kepentingan umum dan daerah; (2) Lambannya pelaksanaan komitmen yang terkait dengan Pembangunan Dam Karebbe; dan (3) Perencanaan Pasca Tambang 2025 yang terkesan akan didegradasi dan menghindari komitmen awal yang sudah dibangun sebelumnya.</p> <p>d. Masih belum terciptanya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan CSR antara manajemen PT. Inco Tbk. dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dimana terdapat kesan yang cukup kuat untuk “memandang remeh” pemerintah daerah kabupaten dan lebih menghargai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p>
<p>5. Apa harapan Bapak pada masa yang akan datang tentang perbaikan-perbaikan program CSR?</p>	<p>5. Harapan saya antara lain:</p> <p>a. Adanya sinergitas yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hendaknya dapat tercipta antara semua lapisan manajemen PT. Inco Tbk. dengan aparat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Konsultasi intensif antar aparat Pemkab dan Officer PT. Inco Tbk. seharusnya dapat dilakukan secara berkesinambungan.</p> <p>b. Agar pihak PT. Inco Tbk. dapat mengembangkan strategi <i>multi years</i> dan berorientasi pandang ke arah masa depan, dalam perencanaan dan pelaksanaan Program CSR, disamping keniscayaan adanya kepaduserasian dengan perencanaan umum daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.</p> <p>c. Agar pihak PT. Inco Tbk., benar-benar meletakkan kerangka CSR di atas kepentingan daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah operasi perusahaan dan daerah Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, bukan semata-mata untuk kepentingan “peningkatan citra perusahaan” saja.</p> <p>d. Agar pihak PT. Inco Tbk. dapat mematuhi dan memegang segala komitmen yang telah disepakati dan direncanakan secara bersama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah</p>

	<p>Kabupaten Luwu Timur, termasuk komitmen yang telah dituangkan dalam MOU Pembangunan Dam Karebbe yang mengalami kelambanan perwujudan dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak semestinya.</p> <p>e. Agar pihak PT. Inco Tbk., secara sangat serius memperhatikan keberlanjutan perencanaan Pasca Tambang 2025 yang dikenal sebagai "<i>Soft Landing Mining Closure</i>" sebagai "komitmen unggulan" yang terpadu antara kegiatan reklamasi purna tambang dan kegiatan community development, dimana hal itu telah dipublikasikan sehingga mendapatkan apresiasi yang sangat baik dan mendapat pujian dari berbagai kalangan, serta mengingatkan PT. Inco Tbk. agar tidak mencoba untuk mendegradasi komitmen tersebut, karena kaitannya menyangkut masa depan daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur di masa depan, ketika perusahaan sudah mengakhiri kegiatannya di daerah ini.</p>
--	---

5. Sumber Data/Responden: Karyawan PT. Inco. Wawancara dilaksanakan pada 21 April 2009.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
<p>1. Bagaimana Pandangan Bapak tentang peran Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.INCO bagi karyawan?</p>	<p>Kalau menurut saya tanggungjawab sosial itu merupakan tanggungjawab sosial untuk warga sekitar dan juga tanggungjawab perusahaan terhadap karyawan. Jadi ada ke luar dan ada ke dalam.</p>
<p>2. Sejauh mana keterlibatan karyawan dalam implementasi Program tanggung Jawab sosial perusahaan (CSR) PT.INCO?</p>	<p>Dalam hal ini, ada bagian/departemen tersendiri yang menanganinya. Bagian itu yang melakukan program pemberdayaan. Khusus untuk tanggungjawab perusahaan ke dalam, dilakukan melalui program pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Banyak program yang diselenggarakan untuk peningkatan kemampuan karyawan.</p>
<p>3. Program apa yang pernah</p>	<p>Program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan di tahun</p>

<p><i>dilakukan dalam peningkatan kapasitas SDM Perusahaan dalam kaitannya dengan CSR?</i></p>	<p>2008 setara dengan 42 jam pelatihan per karyawan. Perhatian khusus diberikan untuk meningkatkan keterampilan teknis bagi karyawan non manajerial, dan meningkatkan keterampilan manajemen para supervisor.</p> <p>Tahun ini juga ditandai oleh kemajuan di mana karyawan mencapai kemampuan teknis ke tingkat yang lebih baik, berdasarkan akreditasi nasional dan standar-standar internasional. Contohnya, pada tahun 2008, 25 pelatih dan koordinator pelatihan dan penilaian (sertifikasi pelatih dan penilaian profesional). Karyawan kami di pabrik pengolahan, operasional tambang, utilitas dan rumah sakit telah menyelesaikan sekitar 800 program pelatihan. PT. Inco bekerjasama dalam mengembangkan dan menilai program-program pelatihan dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan dua lembaga pendidikan yaitu University of Victoria dan Hobart Institute di Australia.</p> <p>PT. Inco juga memberikan program-program pelatihan bagi kontraktor, 40 penyelia dan manajer proyek yang dipekerjakan oleh kontraktor-kontraktor menyelesaikan modul-modul pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Inisiatif ini akan terus dilanjutkan di tahun 2009.</p>
<p><i>4. Bagaimana pandangan Bapak tentang sasaran CSR, apakah sebaiknya difokuskan pada internal atau eksternal perusahaan?</i></p>	<p>Kalau menurut saya sebaiknya dilakukan kedalam dan keluar. Sebab masyarakat sekitar dan karyawan memiliki hak atas tanggungjawab sosial perusahaan itu. Selama ini CSR selalu dipandang untuk masyarakat sekitar. Padahal kita sebagai karyawan juga memiliki hak atas tanggungjawab sosial perusahaan. Bentuk kegiatannya yang mungkin berbeda. Dan sebaiknya ada waktu tertentu diintegrasikan kegiatannya</p>
<p><i>5. Apa harapan Bapak pada masa yang akan datang tentang perbaikan-perbaikan program CSR?</i></p>	<p>Harapan saya program CSR hendaknya lebih di fokuskan pada program-program jangka panjang, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan karyawan untuk masa yang akan datang. Sumberdaya alam kita ini tentunya terbatas, suatu waktu habis, lalu bagaimana jika tidak dipersiapkan sejak dari saat ini. Jadi program pengembangan sumberdaya manusia harus menjadi fokus utama.</p>

6. Sumber Data/Responden: Nasrudin, Warga di sekitar PT. Inco. Wawancara dilaksanakan pada 26 April 2009.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap PT. Inco	PT. Inco selama ini sudah banyak membantu. Banyak warga kami bekerja di perusahaan itu. Selain itu, PT. Inco juga membantu di bidang pendidikan.
2. Apakah PT. Inco berkontribusi terhadap masyarakat sekitar tambang?	Ya, PT. Inco ada membantu di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan. Ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk warga sekitar perusahaan. Ada pertemuan yang membahas yang akan dilakukan oleh masyarakat bersama perusahaan.
3. Bagaimana PT. Inco melakukan kontribusinya terhadap masyarakat?	Pihak perusahaan bersama masyarakat membicarakan apa-apa yang akan dilakukan bersama. Ada pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan. Bersama dengan aparat pemerintah itu dibicarakan mana yang harus dikerjakan dalam tahun ini.
4. Bidang apa yang menjadi perhatian PT. Inco yang pernah Bapak rasakan?	Semua bidang diperhatikan. Tergantung dari hasil pembicaraan warga bersama pemerintah dan pihak perusahaan. Ada kegiatan di bidang pendidikan, ada di bidang pertanian, ada fasilitas kesehatan, ada juga bidang peternakan. Ada anak-anak yang menerima beasiswa.
5. Apakah Bapak pernah mendengar CSR atau community development?	Pernah. Dari pihak pemerintah dan perusahaan, juga dari teman-teman. Itu program perusahaan untuk memperhatikan masyarakat.
6. Apakah PT. Inco melaksanakan tanggungjawab sosialnya?	Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang membiayai itu dari perusahaan, dilaksanakan oleh warga.
7. Apa harapan Bapak terhadap tanggungjawab sosial PT. Inco	Kami berharap untuk dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Terutama untuk yang akan datang. Bagaimana supaya anak-anak kami juga dapat sekolah dan bekerja.

7. Sumber Data/Responden: RB, dan MAI, Warga di sekitar PT. Inco. Wawancara dilaksanakan pada 7 Juli 2009.

PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1. Apa saja program CSR perusahaan dibidang pendidikan ?	Untuk pendidikan ada bantuan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah yang memang penduduk asli di daerah tersebut. Bantuan ini diberikan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri di daerah Lutim. Tapi tidak semua anak yang mendapatkan bantuan beasiswa, karena mereka harus melengkapi berkas-berkas persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Inco. Jadi, klo mereka tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan oleh PT. Inco, otomatis bantuan beasiswa tersebut tidak bisa mereka terima
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana mekanismenya?	Persyaratan utamanya adalah mereka harus benar-benar penduduk yang berdomisili di daerah pemberdayaan, dan sedang bersekolah di daerah Lutim, diluar itu tidak akan diberikan bantuan apa-apa oleh perusahaan. Di lutim sendiri sebenarnya biaya pendidikan untuk anak sekolah sudah digratiskan oleh pemda, jadi bantuan beasiswa dari perusahaan dalam bentuk uang saku dan biaya penunjang pendidikan seperti biaya transportasi, biaya buku-buku sekolah dan lain-lain yang besarannya direkomendasikan oleh pihak sekolah tempat siswa tersebut. Keputusannya ada di pihak govrel
3. Bukannya perusahaan sudah menyediakan mobil bis sekolah untuk masyarakat?	Memang di semua daerah pemberdayaan sudah disediakan mobil angkutan sekolah dari perusahaan, tapi tidak semua daerah-daerah tersebut dapat dijangkau oleh mobil sekolah tersebut, sudah ada ditentukan halte dan terminalnya. Jadi tidak semua juga siswa di sini menikmati fasilitas tersebut.
4. Apa lagi bantuan perusahaan yang lain dalam bidang pendidikan?	selain itu ada juga bantuan bagi guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Mereka mendapatkan bantuan untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut, misalkan : Guru yang tamatan D3 mendapatkan bantuan biaya kuliah untuk meneruskan pendidikan ke S1
5. Bagaimana dengan bidang kesehatan ?	Untuk kesehatan, pada prinsipnya masyarakat cukup terbantu dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan PT. Inco. Di semua daerah pemberdayaan, PT. Inco membangun puskesmas lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana penunjang lainnya. Pemda menempatkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Semua masyarakat yang berobat di puskesmas tidak dipungut biaya apapun. Hanya saja jika keadaan pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, biasanya

	<p>puskesmas akan merujuk pasien ke rumah sakit perusahaan. Disini prosedurnya mulai susah. Karena masyarakat yang non karyawan harus membayar deposito dulu ke pihak rumah sakit atau ada karyawan perusahaan yang menjamin baru pihak rumah sakit mau menerima pasien tersebut, meskipun pasien tersebut ada surat rujukan dari puskesmas setempat.</p>
<p>6. <i>Bagaimana prosedur ini menurut anda ?</i></p>	<p>Sebenarnya prosedur ini bagi kami, sangat berat karena harus mencari penjamin atau terpaksa harus membayar 1,5 juta untuk uang penjamin baru pihak rumah sakit mau menerima pasien dari masyarakat.</p> <p>Biasanya memang setelah pasien keluar, nanti ada keringanan dari pihak perusahaan, biasanya potongan biaya. Ada yang 25%, 50%,75% atau bahkan ada juga yang dapat potongan 100%. Itu tergantung pihak perusahaan yang menentukan.</p>
<p>7. <i>Kalo untuk karyawan bagaimana?</i></p>	<p>Kalo untuk karyawan, enak sekali karena semua anggota keluarganya akan ditanggung oleh pihak perusahaan, mulai dari lahir sampai matinya sepanjang orang tuanya masih menjadi karyawan di perusahaan. Untuk pendidikan, mereka bebas memilih sekolah di mana pun mau di YPS atau di luar sorowako misalnya di makassara atau di jakarta, semuanya akan ditanggung oleh perusahaan. Begitu juga dengan jaminan kesehatannya. Mereka semua ditanggung oleh perusahaan. Di makassar, di jogja, bandung atau di jakarta ada beberapa rumah sakit yang memang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Jadi kalo ada anak karyawan yang punya kartu asuransi kesehatan mau berobat di sana, langsung masuk saja. Nanti pihak rumah sakitnya yang akan klaim ke perusahaan. Kalaupun tidak ada rumah sakit yang merupakan kerjasama dengan perusahaan, mereka bisa saja berobat di rumah sakit mana saja, nanti biayanya rumah sakitnya dibayar sendiri dulu, setelah itu baru bukti peembayarannya dilaporkan ke inco, nanti inco akan ganti semuanya.</p>
<p>8. <i>Bagaimana dengan bidang pertanian dan yang lainnya? Apa saja yang PT. Inco bantu</i></p>	<p>PT. Inco membantu kami dalam bidang pertanian dengan membangun sarana pengairan untuk pertanian masyarakat, dengan system pengairan yang ada petani yang ada di daerah ini dapat melakukan aktivitas pertanian dengan system pengairan tersebut. Petani dapat panen sampai 4</p>

<p><i>dan apa manfaatnya bagi masyarakat</i></p>	<p>kali dalam setahun. Selain itu juga petani mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari perusahaan.</p> <p>kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari perusahaan yang memberikan bantuan modal bagi kami yang tergabung dalam koperasi sehingga usaha-usaha masyarakat seperti UKM mandapatkan bantuan modal usaha. Kami dapat tarus menjalankan usaha kami bahkan dapat mengembangkan usaha tersebut. Selain bantuan modal usaha kami juga diberikan pelatihan-pelatihan dalam kaitannya dengan manajemen usaha dan pelaporan sesuai dengan standar yang dipakai oleh perusahaan</p>
--	---

